

**PELAKSANAAN PROGRAM JARING PENGAMAN EKONOMI
DAN SOSIAL (JPES) DI KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ARIE DWI ARDINA

NIM. 0410310013



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MALANG

2009

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI FAKULTAS
ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA :

HARI : KAMIS
TANGGAL : 22 JANUARI 2009
JAM : 08.00-09.00
SKRIPSI ATAS NAMA : ARIE DWI ARDINA
JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM JARING
PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL (JPES)
DI KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO

DAN DINYATAKAN LULUS

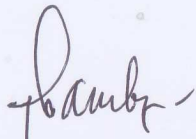
MAJELIS PENGUJI



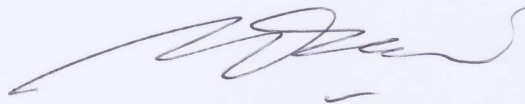
Prof. Dr. Sumartono, MS.
KETUA



Dr. Suryadi MS
ANGGOTA



Dr. Bambang Supriyono, MS
ANGGOTA



Drs. Muh. Shobaruddin, MA.
ANGGOTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial
(JPES) di Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo

Disusun oleh : Arie Dwi Ardina.

NIM : 0410310013

Fakultas : Ilmu Administrasi

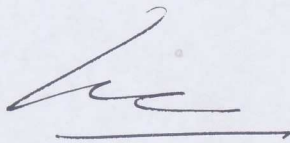
Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, November 2008

Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Sumartono, MS
NIP. 131 131 029

Anggota



Dr. Suryadi, MS
NIP. 131 697 689

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dihalaman naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebut sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

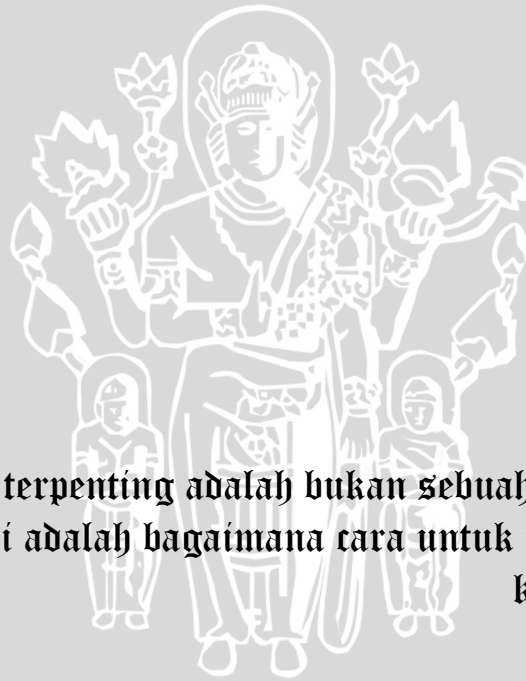
Malang, Desember 2008



Arie Dwi Ardina

NIM: 0410310013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**Dang terpenting adalah bukan sebuah kemenangan,
Akan tetapi adalah bagaimana cara untuk meraih sebuah
kemenangan...**

***Fly like a Butterfly
And
Sting like a Bee...
(Muhammad Ali)***

Skripsi ini adalah satu dari sekian banyak fase yang telah aku lalui dalam hidup. Banyak hal yang aku dapatkan ketika proses penulisan ini berlangsung; tentang arti keyakinan, optimis, tekanan mental & bathin, pantang menyerah, persahabatan, luv, arti keluarga dan banyak hal lain yang membuat aku dewasa...

Aku berterima kasih pada :

Allah SWT... Subhanallah... Tuhan yang maha segalanya, kuasa-Mu tiada hentinya memberikan aku jalan yang terang. Maafkan hamba-Mu ini yang kurang mensyukuri rahmat-Mu dan terkadang melupakan-Mu. Ampuni hamba-Mu yang hina ini...

Muhammad SAW... Nabi-ku, pembimbing hidupku...

Pap's Nardi n Mam's Erli, terima kasih telah membesarkan, mendidik, serta melimpahkan do'a yang tiada henti pada anakmu yang nakal dan terkadang tidak patuh....

My Sista; Mba' Ferry (n family), Mba' Mita (n family) & De' Oky; kalian penyemangatku untuk aku agar segera menyelesaikan kuliah ini...

Prof. Dr. Soemartono, MS & Dr. Suryadi MS, dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membagi ilmu. Terima kasih atas pressmental-nya...

Sari Dewi A. (n family), terima kasih banyak atas semua support, do'a, kebaikan dan segalanya...

Dimaz" zamid", Setyo" kang yo", Singgih" timbil", Choirul" ndut", Tomik" mamat", Furqon" o'on", Dian" qutjur", Galoe" ganong", Adhiz" endel", Eko" pak_oke", Endri" E'en", penghuni jln. Kratatau 39 (empunya rumah; om Nono, tante Titik, Mbak Maya, Mbak Dita), & temen2 yang sering kongkow di Krakatau 39 (crew 39) yang ga' bisa aku sebutin satu persatu; senang bisa kenal kalian. Keep our brotherhood 4ever...

Temen2 kost; Iqbal (tlnxz bwt pinjaman komputernya), Cesar, pk, Sarmidi dan yang lainnya.

Temen2 FIA Publik '04 A (khususnya, dan tidak bisa aku sebutkan satu persatu); gimana kabar kalian??? Terlalu banyak kenangan yang kita buat...

Temen2 FIA Publik '04; jaga almamater kita...

Temen2 seperjuangan ujian komprehensif 22 Januari '09; akhirnya....

Mas Erdi (Bageur comp n crew); sorry mas sering ngrepotin...

Buat semua temen2ku yang ga' bisa aku sebutin satu persatu, Save The Earth...

My bike, Yamaha Vega R '03 (N 3564 NY); alat transportasi andalanku.



RJ3'...

DAFTAR ISI

Halaman

TANDA PENGESAHAN	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
MOTTO	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR / BAGAN	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika penelitian.	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	
1. Definisi Administrasi Pembangunan	9
2. Strategi Pembangunan	9
3. Definisi Program dan Proyek	11
4. Tahapan atau Siklus Pengelolaan Program dan Proyek	12
B. Program Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial (JPES)	
1. Maksud Dan Tujuan.....	17
2. Ruang Lingkup, Sasaran dan Target.....	18
3. Kriteria Anggota Kelompok Sasaran dan Hasil yang Diharapkan.....	19
C. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat	
1. Pemberdayaan Masyarakat	19
2. Definisi Pembangunan Masyarakat	22
3. Pendekatan Pembangunan Masyarakat	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi dan Situs Penelitian	29

D. Sumber Data dan Jenis Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Instrumen Penelitian	32
G. Analisis Data	32

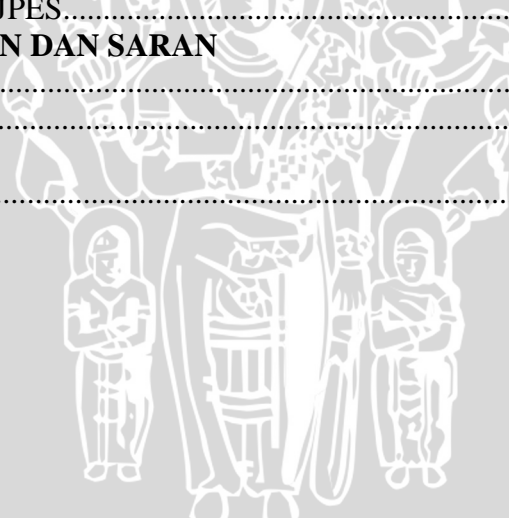
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Pelaksanaan Program JPES.....	45
a. Organisasi Pelaksana Program JPES.....	47
b. Tahapan Program JPES.....	54
c. Mekanisme Program JPES.....	80
C. Hasil yang di raih dalam pelaksanaan Program JPES.....	101
a. Hasil Pelaksanaan Program secara fisik.....	102
b. Hasil Pelaksanaan Program secara non fisik.....	104
D. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program JPES...	105
a. Faktor Pendukung.....	106
b. Faktor Penghambat.....	107
E. Pembahasan.....	109
a. Pelaksanaan Program JPES.....	108
b. Hasil yang diraih dalam pelaksanaan Program JPES.....	112
c. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program JPES.....	113

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA.....	118
----------------------------	------------



RINGKASAN

ARIE DWI ARDINA 2008, **Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial (JPES) di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo**, Prof. Dr. Sumartono, MS; Dr. Suryadi, MS. 117 hal+x

Pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia khususnya, telah menjadi suatu kata kunci dalam segala bidang. Indikasi ini dapat dilihat dari konsepsi pembangunan yang telah menjadi suatu *trade mark* atau ciri khas dalam kondisi peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan di negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Menurut data Susenas tahun 1998, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menangani kemiskinan. Salah satunya adalah pelaksanaan program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur sejak tahun 2007 lalu. Pelaksanaan program ini merata diseluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Timur.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program JPES di Propinsi Jawa Timur. Selain itu untuk mengetahui hasil yang dicapai serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa pendekatan kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif yang menggambarkan suatu situasi atau kejadian dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagai sesuatu yang saling terikat pada saat sebelum, selama dan setelah pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program JPES di Kecamatan Banyuanyar sudah sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan. Tahapan atau proses pelaksanaan program ini merupakan tahapan yang panjang. Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan program ini terbagi menjadi 2 yaitu secara fisik dan non fisik. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah masyarakat, anggaran atau pembiayaan dan sarana. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah serta kurang profesionalnya lembaga atau birokrasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program ini perlu adanya perbaikan dalam sector kelembagaan agar dapat menciptakan suasana atau tercipta keselarasan pelaksanaan program. Hal itu perlu dilaksanakan agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan program.

SUMMARY

ARIE DWI ARDINA 2008, **Implementation of Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Program in Sub District of Banyuwang District of Probolinggo**, Prof. Dr. Sumartono, MS; Dr. Suryadi, MS. 117 hal+x

Development for major and especially developing countries including Indonesia has been a key word in every aspect. This indication can be viewed from the development's conception which has been some kind of trade mark or stereotype within the context of national development. The main factor obstructing this objective is poverty. Based on Susenas data (1998), Indonesia as one of the most wealthy country in their natural resources, had more than 49,5 million people categorized as in a state of poverty.

There have been many efforts done by the central government and local to overcome this problem. One of those is the holding of Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) program which has been running by East Java Provincial Government since year 2007. The holding of this program is fair in every District in East Java Provincial.

The objective of this study is to describe the holding of JPES program in East Java Provincial. Besides it is meant to know the latest result which has been achieved including its supporting factors and obstacles in the program execution.

This study takes form of descriptive analysis using qualitative analytical approach. The data used in this study will be divided into primary and secondary data collected by using observational data collecting method, interviews, and documented reports. Data analysis in this study uses descriptive analysis with qualitative method to describe a state of condition or an event by doing steps in data reduction, data presentation, and conclusion making, as related elements before, during, and after the process of data collecting.

The result of this study shows that the implementation of JPES program in Banyuwang sub district has already been sufficient due to the implementation process described in Guidance Book. The implementation process of this program is a long run. The results achieved in the implementation of this program will be divided into material and non-material results. Supporting factors in the implementation of this program are the society, funding or budget arrangements, and facilities involved. Meanwhile, the obstructive factors are the low level of education and the lack of professionalism in the involved bureaucracy and institution.

Hence, we can conclude that there area some improvements in the institutional and bureaucracy aspects in order to create harmony and constructive atmosphere in the implementation of this program. It has to be done in order to be able to run this program well and in the right timing based on the direction given in the program implementation's schedule.

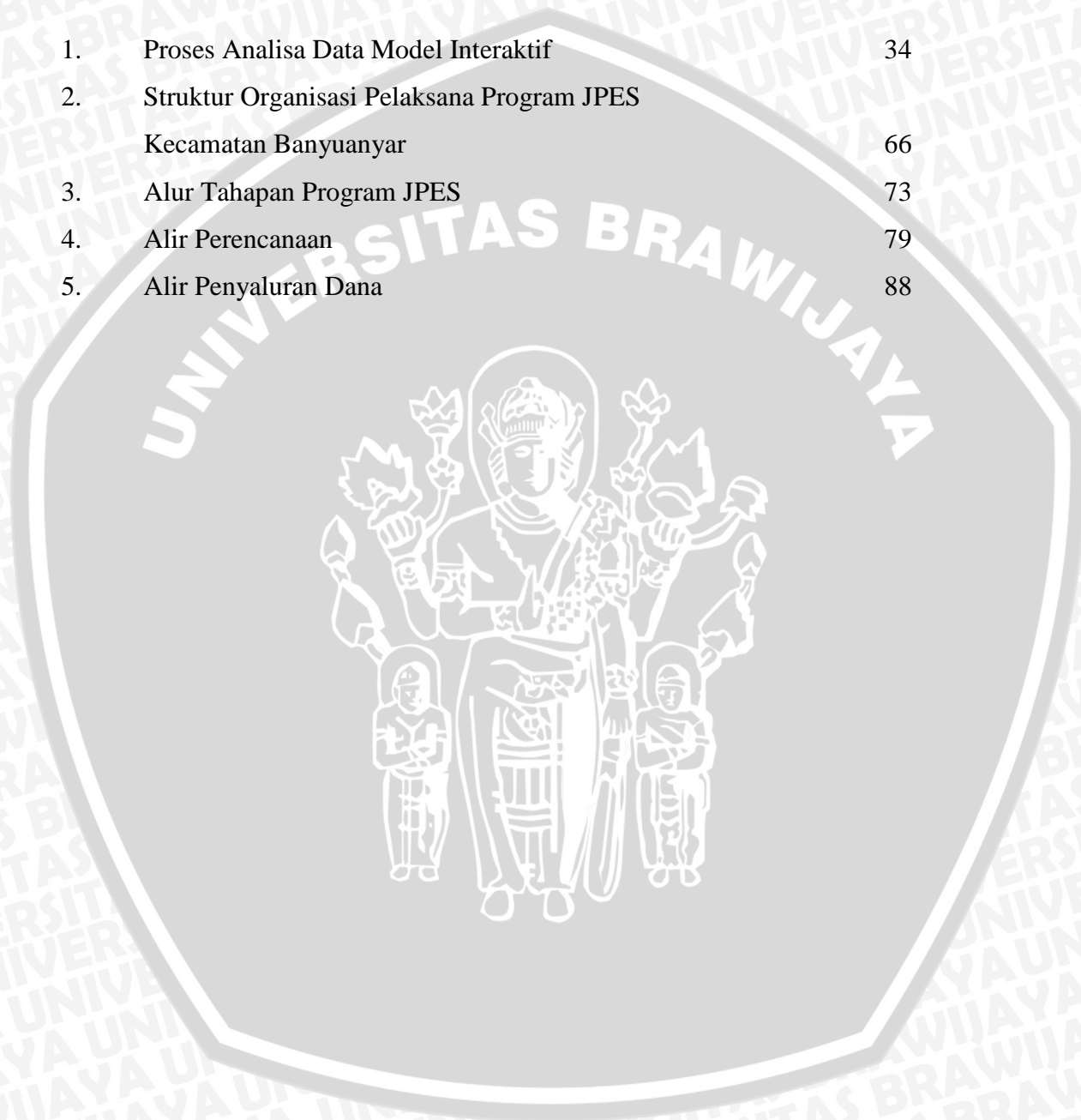
DAFTAR TABEL

Tabel :	hal
1. Data Penduduk Kecamatan Banyuanyar menurut kelompok Umur	36
2. Data Penduduk menurut Pendidikan yang ditamatkan Kecamatan Banyuanyar	37
3. Data Penduduk menurut Mata Pencapaian Kecamatan Banyuanyar	38
4. Rancangan Anggaran Biaya Program JPES 2007 Desa Banyuanyar Tengah	65
5. Rancangan Anggaran Biaya Program JPES 2007 Desa Pendil	66
6. Rancangan Anggaran Biaya Program JPES 2007 Desa Blado Wetan	67
7. Rancangan Anggaran Biaya Program JPES 2007 Desa Gunung Geni	68
8. Rancangan Anggaran Biaya Program JPES 2007 Desa Sentulan	69
9. Rancangan Anggaran Biaya Program JPES 2007 Desa Klenang Lor	70
10. Daftar Anggota Pokmas Desa Blado Wetan	74
11. Daftar Anggota Pokmas Desa Gunung Geni	74
12. Daftar Anggota Pokmas Desa Sentulan	75
13. Daftar Anggota Pokmas Desa Klenang Lor	75
14. Daftar Anggota Pokmas Desa Pendil	76
15. Daftar Anggota Pokmas Desa Banyuanyar Tengah	76
16. Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Blado Wetan Tahap I	89

17.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Blado Wetan Tahap II	90
18.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Pendil Tahap I	91
19.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Pendil Tahap II	92
20.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Sentulan Tahap I	93
21.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Sentulan Tahap II	94
22.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Banyuwanyar Tengah Tahap I	95
23.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Banyuwanyar Tengah Tahap II	96
24.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Gunung Geni Tahap I	97
25.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Gunung Geni Tahap II	98
26.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Klenang Lor Tahap I	99
27.	Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial Desa Klenang Lor Tahap II	100

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar		hal
1.	Proses Analisa Data Model Interaktif	34
2.	Struktur Organisasi Pelaksana Program JPES Kecamatan Banyuwang	66
3.	Alur Tahapan Program JPES	73
4.	Alir Perencanaan	79
5.	Alir Penyaluran Dana	88



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial (JPES) di Kecamatan Banyuwayar Kabupaten Probolinggo”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Keluargaku tercinta; Ayah dan Bunda, Kakak-kakaku dan adikku, skripsi ini aku persembahkan untuk kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya Malang beserta seluruh staf.
3. Bapak Pror. Dr. Sumartono, MS. dan Bapak Dr. Suryadi MS. selaku dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Jajaran Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada penulis selama ini.
5. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Seluruh staf pegawai Kecamatan Banyuwayar yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman FIA Publik 2004, terima kasih atas do'a, saran dan kritik yang membangun.
8. Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berdo'a semoga semua bantuan yang diberikan tersebut dinilai Allah SWT sebagai ibadah dan mendapat imbalan pahala yang sesuai dari-Nya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang ada pada diri penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiiien...

Malang, Januari 2009

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia khususnya, telah menjadi suatu kata kunci dalam segala bidang. Indikasi ini dapat dilihat dari konsepsi pembangunan yang telah menjadi suatu *trade mark* atau ciri khas dalam kondisi peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari asumsi ini, maka kita dapat memahami jika pembangunan dipandang sebagai suatu proses perubahan yang akan berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pada dasarnya, hakekat pembangunan memerlukan pertemuan dan penyesuaian di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, politik dan bidang-bidang lainnya. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan lapangan kerja produktif, pemerataan pendapatan, penanggulangan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pembangunan di bidang sosial identik dengan pembangunan di bidang ekonomi. Bertitik tolak dari hal tersebut, banyak strategi maupun kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan itu sendiri sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, terutama untuk keluar dari kondisi kemiskinan.

Akan tetapi, selama ini banyak konsep serta teori-teori pembangunan yang mengartikan pembangunan itu hanya identik dengan proses pembangunan di bidang ekonomi, yang lebih menekankan pada hasil akhir yang akan dicapai (efisiensi, produktivitas, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi). Dilihat dari segi positif dari suatu kegiatan pembangunan itu sendiri akan berdampak pada peluang lapangan kerja baru. Namun, pada sisi lain muncul berbagai ketimpangan yang ada di dalam masyarakat maupun ketimpangan antar daerah. Ketimpangan ini bisa disebabkan karena adanya perbedaan potensi yang ada pada masing-masing daerah, baik itu potensi secara sumber daya manusia (SDM) maupun potensi pada sumber daya alam (SDA).

Salah satu dampak yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan ini adalah kemiskinan. Kemiskinan ini banyak kita jumpai di daerah-daerah di Indonesia.

Kemiskinan, mengutip pendapat Waluyo Jati pada situs <http://www.damandiri.or.id/file/waluyojatiumhuksurakartabab2.pdf>. dalam Buku Panduan Keluarga Sejahtera, (1996, hal.10) adalah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya.

Hingga kini pembicaraan seputar kemiskinan tetap dipandang aktual dan diminati di belahan dunia manapun. Apalagi, belum ada teori atau konsep yang terbukti mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan secara tuntas dan universal. Salah satu penyebabnya, karena kemiskinan itu sendiri bersifat dinamis, maka ia akan senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan sosial manusia. Kemiskinan yang dihadapi oleh setiap generasi manusia pasti berbeda. Semakin tinggi taraf kehidupan suatu masyarakat, maka semakin kompleks pula permasalahan kemiskinan yang mengelilingi mereka. Karena itu, pemaknaan kemiskinan mengalami perubahan di setiap saat dan setiap tempat.

Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin dan hal tersebut sangat ironis (Susenas 1998 dalam <http://www.pu.go.id/publik/P2KP/Des/memahami99.htm>). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah. Sedangkan pada tahun 2004, menurut laporan World Bank, terjadi peningkatan kemiskinan sebanyak 29 juta penduduk miskin baru.

Kondisi itu bertambah parah ketika pada tahun 2005 hingga awal tahun 2006 terjadi kenaikan harga minyak dunia yang relatif besar dan masih terus berlangsung hingga kini. Keadaan itu memberikan beban berat bagi APBN karena subsidi yang di tanggung oleh negara akan semakin besar jumlahnya. Untuk mengurangi beban subsidi tersebut dan agar kegiatan pembangunan nasional tidak

terhambat, Pemerintah berkeinginan untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap yaitu dengan cara menaikkan harga BBM.

Kebijakan Pemerintah dengan menaikkan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005, merupakan suatu langkah yang diambil sebagai suatu usaha penyelamatan yang harus dilaksanakan untuk menghindari dampak yang lebih buruk lagi bagi bangsa ini di masa yang akan datang. Dampak kenaikan BBM ini sangat dirasakan hampir di semua sektor kehidupan masyarakat. Hal ini diperkirakan akan terus berkembang dan akan berlanjut, inflasi, pergerakan dan peningkatan harga kebutuhan, baik itu yang berupa barang ataupun jasa akan semakin merangkak naik. Hal itu berakibat menurunnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat yang sebelumnya rentan akan kemiskinan akan menjadi miskin dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin terus bertambah dari waktu ke waktu.

Kenaikan harga BBM inipun juga sangat dirasakan oleh sektor dunia usaha, dimana pelaku usaha mulai melakukan efisiensi dalam kegiatan usaha atau produksinya. Ini berdampak pada meningkatnya jumlah angka pengangguran akibat PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dilakukan oleh pelaku usaha karena sektor usahanya yang mulai *stagnan* bahkan cenderung *collapse*. PHK yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan yang tentu saja diakibatkan oleh PHK tersebut. Selain itu, penurunan mutu juga terjadi terhadap hasil produksinya. Dampak dari kenaikan BBM sangat memberatkan bagi perekonomian masyarakat dan dunia usaha yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, dari tahun 2002 hingga tahun 2004 angka kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan *trend* menurun. Pada tahun 2002, jumlah penduduk miskin sebesar 7.181.755 jiwa atau 20,34 % dan menurun pada tahun 2003 menjadi 7.064.289 jiwa atau 19,52 %. Kemudian pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 6.979.565 jiwa atau 19,10 % dari total penduduk Jawa Timur yang berjumlah 36.398.345 jiwa (Susenas 2004).

Setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Maret dan pada bulan Oktober 2005 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Jawa Timur jumlah keluarga miskin (gakin) mencapai

3.311.903 KK (*by name by address*). Jika di asumsikan tiap gakin terdiri dari 5 orang, maka jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 16.559.515 jiwa. Dari data tersebut maka hal itu menunjukkan bahwa peningkatan angka kemiskinan yang tinggi dan menjadi suatu masalah yang krusial serta mendesak yang harus segera di tangani.

Melihat kondisi di atas, sebenarnya pemerintah telah banyak melakukan langkah-langkah konkret untuk memecahkan permasalahan ini. Upaya maupun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi atau menangani permasalahan ini ditempuh melalui bermacam-macam pendekatan dan juga kebijakan, baik itu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Beberapa kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk menangani masalah kemiskinan antara lain adalah :

- a. Kompensasi BBM (seperti : Bantuan Langsung Tunai; Kompensasi BBM Pendidikan; Kompensasi BBM Kesehatan; Kompensasi BBM Infrastruktur Pedesaan; Subsidi Raskin; Dana Bergulir untuk Usaha Mikro);
- b. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
- d. Program Pengembangan Kecamatan; dan sebagainya.

Untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan serta untuk mengatasi masalah akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM secara luas yang terdapat pada wilayah Propinsi Jawa Timur maka pada tahun 2006 Pemerintah Propinsi menetapkan suatu kebijakan yang bersifat strategis yang disebut dengan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB). Program ini sepenuhnya didanai oleh APBD Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya program ini merupakan program penyelamatan, karena secara umum mempunyai tujuan meringankan beban masyarakat akibat dampak kenaikan BBM seperti memperbaiki daya beli masyarakat, kemiskinan dan aksesnya tidak meluas, ekonomi riil pada tingkat mikro tetap berjalan dan lain-lain.

Akan tetapi pada tahun 2007 PAM-DKB mengalami perubahan, yang diteruskan oleh program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial atau disingkat dengan JPES. Secara umum program ini memiliki tujuan yang hampir sama

dengan PAM-DKB yaitu menanggulangi kemiskinan yang terdapat pada Propinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan pada Propinsi Jawa Timur angka kemiskinan termasuk tinggi walaupun banyak keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, menurut data BPS Kabupaten Probolinggo pada tahun 2005 jumlah Rumah Tangga Miskin mencapai angka 114.853 KK (kepala keluarga) akan tetapi jumlah tersebut bertambah menjadi 118.869 KK setelah adanya verifikasi keluarga miskin yang dilakukan oleh BPS. Tentunya hal ini menjadi suatu masalah yang sangat serius dan harus segera ditangani. Kecamatan Banyuanyar yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Probolinggo merupakan suatu wilayah yang memiliki letak atau lokasi yang jauh dari kawasan perkotaan dan merupakan suatu wilayah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi pula. Pada tahun 2005, jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Banyuanyar mencapai 5.539 KK dan jumlah itu bertambah drastis lagi ketika adanya verifikasi data kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menjadi 7.300 KK.

Bertambahnya angka kemiskinan itu membuat proses pembangunan baik itu yang bersifat fisik ataupun non fisik menjadi terganggu. Hambatan itu membuat laju perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Probolinggo khususnya Kecamatan Banyuanyar menjadi lambat bahkan cenderung ke arah kemunduran. Dengan adanya program JPES maka diharapkan permasalahan yang timbul akibat semakin bertambahnya angka kemiskinan di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dapat berkurang bahkan mampu diatasi.

Program JPES ini memiliki fokus pada kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya. Atau dengan kata lain kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah pembangunan fisik / sarana dan prasarana. Salah satu kegiatan yang termasuk dalam fokus program ini adalah perbaikan jalan. Sasaran utama program ini adalah keluarga miskin yang masih produktif, dalam artian dapat bekerja layaknya manusia lain.

JPES ini memiliki persamaan dengan program BLT yaitu memiliki sasaran keluarga miskin. Jika BLT memfokuskan pada tiap-tiap individu atau keluarga miskin maka JPES memfokuskan pada kelompok keluarga miskin dan memberdayakan masyarakat miskin dengan melibatkan mereka di dalam program.

Program ini lebih berorientasi pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian tentang Program JPES. Dengan judul penelitian :

“Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial Dan Ekonomi (JPES) Di Kecamatan Banyuwayar Kabupaten Probolinggo”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut maka dapatlah dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan JPES di Kecamatan Banyuwayar Kabupaten Probolinggo?
2. Apa sajakah hasil yang diraih dalam pelaksanaan JPES di Kecamatan Banyuwayar Kabupaten Probolinggo?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut?

C. Tujuan:

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka peneliti dapat menurunkan adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana JPES tersebut dilaksanakan di Kecamatan Banyuwayar Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mendeskripsikan hasil yang diraih dari pelaksanaan program tersebut di lingkup Kecamatan Banyuwayar Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan JPES di Kecamatan Banyuwayar Kabupaten Probolinggo.

D. Kontribusi penelitian

Ketika melakukan penelitian, diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif. Adapun manfaat atau kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis
 - a. Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada studi tentang pelaksanaan program dan proyek JPES.
 - b. Referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
 - c. Bekal wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.
2. Secara praktis
 - a. Bagi instansi yang bersangkutan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana literatur yang terkait dengan pelaksanaan JPES.
 - b. Sebagai masukan bagi daerah yang menjadi objek peneliti, dalam mengatasi masalah-masalah yang sama dan sebagai suatu masukan untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam mengatasi masalah-masalah yang sama.
 - c. Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengenal dan menilai tentang JPES yang sedang dilaksanakan sehingga masyarakat juga dapat secara aktif berpartisipasi bersama-sama dengan instansi dan elemen yang ada.

E. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

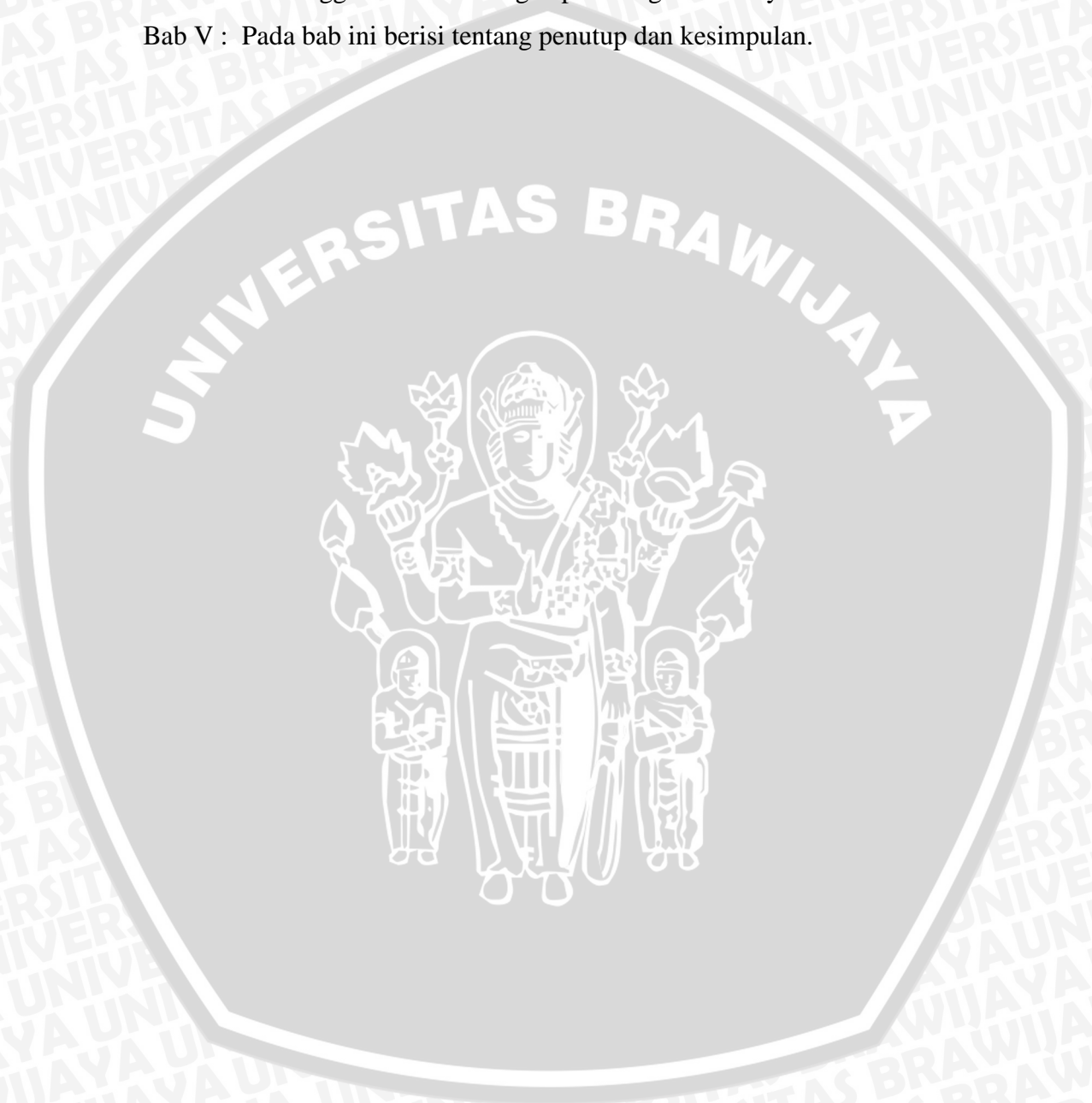
Bab I : Pada bab ini antara lain berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian itu sendiri.

Bab II : Pada bab ini antara lain berisi tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan JPES di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan pembangunan masyarakat.

Bab III : Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang terkait.

Bab IV : Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan JPES di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan pembangunan masyarakat.

Bab V : Pada bab ini berisi tentang penutup dan kesimpulan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan.

1. Definisi Pembangunan.

Kata pembangunan sangat identik dengan proses dan perubahan. Pembangunan berarti juga peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya (Bryant dan White, 1989 hal.21). Selain itu Todaro memberikan pengertian pembangunan sebagai (Todaro dalam Bryant dan White, 1989 hal.3-4):

Proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 1983, hal.2-3).

Apabila kita mencermati pengertian pembangunan itu maka ada beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan (Siagian, 1983, hal.3-4), antara lain:

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
4. Pembangunan mengarah pada modernitas.
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensionil
6. Kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Strategi Pembangunan.

Dalam perkembangannya, studi pembangunan juga menghasilkan teori-teori yang berkaitan erat dengan pembangunan itu sendiri. Ada 5 teori populer yang dikelompokkan oleh Todaro, yaitu teori pertumbuhan linear, teori pertumbuhan struktural, teori ketergantungan internasional, teori neo-klasik dan teori-teori baru.

Apabila kita berbicara tentang teori maka kita juga tidak akan lepas dengan strategi. Ada beberapa pendapat mengenai strategi-strategi pembangunan. Korten dalam Tjokrowinoto (1987, hal.26) dalam Suryono (2001, hal. 84:85) memberikan peta perbandingan karakteristik strategi pembangunan menjadi 3 yaitu:

1. Strategi Pertumbuhan (*Growth*),
2. Strategi Kebutuhan Dasar (*Basic needs*),
3. Strategi Berpusat pada Manusia (*People Center*).

Secara lebih jelas tentang ketiga strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Karakteristik	Strategi		
	<i>Growth</i>	<i>Basic Need</i>	<i>People Center</i>
Fokus Nilai	Industri Berpusat pada Industri	Pelayanan Berkiblat pada manusia	Manusia Berpusat pada manusia
Indikator	Ekonomi makro	Indikator sosial	Hubungan manusia dengan sumber Fasilitator
Peranan Pemerintah Sumber utama	<i>Entrepreneur</i>	<i>Service provider</i>	Kreativitas dan komitmen
Kendala	Modal	Kemampuan administratif dan anggaran	Struktur dan prosedur yang tidak mendukung
	Konsentrasi dan marginalisasi	Keterbatasan anggaran dan in-kompetensi aparat	

Sumber: Teori dan Isu Pembangunan, Agus Suryono, 2001 hal. 85

Selain strategi tersebut, ada strategi-strategi lain yang berkembang seiring dengan berkembangnya pembangunan dan banyaknya pemikiran baru tentang pembangunan. Tjokroamidjojo dalam bukunya Teori Strategi Pembangunan Nasional (1980, hal.60-72) menyebutkan 4 perkembangan strategi pembangunan, yaitu:

1. Strategi Pembangunan Bangsa (*Nation Building*).

Strategi pembangunan bangsa ini bertitik berat pada “*socio-political approach*” memang tepat bagi negara yang baru mencapai kemerdekaan dimana diperlukan konsolidasi politik dalam rangka integrasi nasionalnya. Tetapi jelas, seperti terbukti dalam sejarah, pendekatan “*political development*” atau “*economic development*” saja tidak cukup bagi pembangunan bangsa.

2. Strategi Pembangunan dengan Stabilitas.

Apabila suatu tingkat konsolidasi politik nasional telah tercapai dan iklim politik cukup stabil (yakni teradaptasinya kultur politik nasional oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat), suatu bangsa sudah dapat memulai pembangunan ekonominya secara lebih serius.

3. Strategi Pembangunan dengan Keadilan.

Dalam kepustakaan yang ada masih kelihatan bahwa keadilan yang dimaksud berupa lebih banyak perhatian terhadap aspek-aspek sosial dalam pembangunan. Hal ini diikuti dengan perluasan indikator-indikator pembangunan tidak hanya terbatas pada indikator-indikator kemajuan ekonomi belaka.

4. Reorientasi Strategi Pembangunan.

Dalam strategi ini, yang menjadi perhatian adalah permasalahan tentang masalah-masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, pada dekade 1970-an para pemikir kembali melakukan *rethinking* tentang tujuan dan strategi pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan manusia.

3. Definisi Program dan Proyek.

Pengertian atau definisi program banyak dikemukakan oleh para ahli. Dari berbagai definisi program maka kita dapat mengetahui bahwa program itu bersifat alokatif dan distributif, akan tetapi program juga bersifat inovatif dan multi fungsi. Hal itu sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh United Nations (Zauhar, 1993, hal.2) :

Programme is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities.

Dalam pengertian ini bisa dipahami bahwa program itu merupakan wujud dari aktivitas sosial yang diorganisir atau ditata sedemikian rupa dengan suatu tujuan tertentu yang lebih spesifik, yang terbatas pada tempat dan waktu. Hal itu juga berhubungan dengan kelompok proyek-proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi dan aktivitas.

Secara singkat proyek dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan dengan cara kerja tertentu, kriteria keberhasilan, lokasi yang jelas, jumlah biaya yang pasti, sumber pembiayaan yang telah ditetapkan, dan dikelola oleh sekelompok orang yang secara khusus ditunjuk itu (Siagian, 1984, hal.164). Selain itu, ada banyak lagi definisi proyek yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yang telah di kemukakan oleh Kadariah dkk :

Proyek merupakan suatu rangkaian aktivitas (activities) yang dapat direncanakan, yang di dalamnya menggunakan sumber-sumber (inputs), misalnya; uang dan tenaga kerja, untuk mendapatkan manfaat (benefits) atau hasil (returns) di masa yang akan datang. Aktivitas proyek ini mempunyai saat mulai (starting point) dan saat berakhir (ending point). (Kadariah dkk, 1978, hal. 1).

4. Tahapan atau Siklus Pengelolaan Program dan Proyek.

Setiap program dan proyek tertentu memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang yang lain. Program dan proyek tentang pembangunan desa tentu saja berbeda dengan program dan proyek tentang permasalahan sosial, agama dan lain sebagainya. Akan tetapi, diantara perbedaan itu masih terdapat adanya persamaan, terutama dalam proses pengelolaan program dan proyek tersebut. Ada 4 tahapan yang dilalui dalam pengelolaan program dan proyek (Zauhar, 1993, hal.4) yaitu:

1. Perencanaan.

Tahap awal yang dilakukan dalam pengelolaan program dan proyek selalu diawali dengan konsepsualisasi dan identifikasi. Konsepsualisasi dan identifikasi ini berkaitan dengan usulan atau ide yang muncul tentang suatu program dan proyek yang kemudian akan ditindak lanjuti dalam bentuk pembicaraan resmi yang kemudian tertuang dalam suatu bentuk usulan yang tertulis. Kegiatan ini biasanya disebut dengan kegiatan pra studi kelayakan. Tujuan dilakukannya studi pra kelayakan ini adalah untuk memberikan justifikasi bahwa program dan proyek yang diusulkan merupakan kegiatan yang logis dan penting. Untuk mengetahui bahwa program dan proyek itu logis dan penting dapat diketahui melalui efisiensi penggunaan tenaga, waktu dan biaya.

Tahap kedua yang dilakukan setelah kegiatan pra studi kelayakan adalah kegiatan studi kelayakan. Di dalam studi kelayakan ini harus memuat informasi serta analisis yang berkaitan dengan:

- a. Segi ekonomi dari suatu proyek;
- b. Segi keuangan suatu proyek terutama sumber pembiayaannya;
- c. Segi teknis suatu proyek, khususnya dalam pelaksanaan dan pengoperasian proyek;
- d. Dampak politik suatu proyek yang sering merupakan pertimbangan yang dominan dalam memproyeksikan suatu kegiatan;
- e. Segi manajemen suatu proyek dalam arti tersedianya tenaga pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan proyek, dan
- f. Desain sementara suatu proyek. (Siagian, 1984, hal.168)

Apabila proses pra studi kelayakan dan proses studi kelayakan sudah dianggap cukup maka **tahap ketiga** adalah tahap desain. Di dalam desain inilah akan tergambar rincian yang lebih detail dari suatu program atau suatu proyek. Jika desain ini memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, finansial, sosial dan politik maka tahap berikutnya adalah tahap persetujuan (approval). Disetujui atau tidaknya suatu program dan proyek merupakan indikasi kualitas dari suatu perencanaan. Semakin berkualitas suatu perencanaan program dan proyek, semakin besar pula kemungkinannya untuk di setujui. Layak atau tidaknya serta cara untuk menentukan prioritas proyek adalah didasarkan pada 7 (tujuh) pertimbangan berikut:

- 1) Perbandingan penilaian teknis. Penilaian teknis suatu proyek mengandung taksiran keuangan atau ekonomi dari biaya suatu proyek dibandingkan dengan keuntungan yang akan dihasilkan.
- 2) Perbandingan tingkat kemanfaatan yang dihasilkan bagi kelompok sasaran strategis. Proyek dapat dilihat dari segi tingkat keuntungan atau manfaat yang dihasilkan untuk kelompok sasaran tersebut.
- 3) Perbandingan tingkat kemampuan suatu proyek dalam melayani daerah strategis. Proyek dapat dinilai dari segi tingkat kemampuannya yang menghasilkan kemanfaatan dalam daerah strategis yang telah ditentukan.
- 4) Masuk tidaknya proyek dalam sektor strategis. Proyek dapat dinilai atas dasar masuk atau tidaknya proyek yang bersangkutan dalam sektor strategis tersebut.
- 5) Menjadi bagian atau tidak suatu proyek dari rangkaian proyek terpadu. Jika Rangkaian Proyek Terpadu (RPT) sudah ditentukan maka prioritas tertinggi diberikan kepada proyek yang menjadi bagian dari RPT.
- 6) Tingkat urgensi proyek. Tingkat mendesaknya sifat proyek ialah tolok ukur dari kesegeraan suatu proyek perlu dilaksanakan.
- 7) Analisa tujuan. Merupakan tolok ukur untuk mengukur sejauh mana suatu proyek memenuhi tujuan-tujuan utama tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Repelita, GBHN, Pola Dasar dan sebagainya. (Zauhar, 1993, hal.6)

2. Analisa Tujuan.

Analisa tujuan dilakukan untuk menentukan sejauh mana calon proyek memenuhi tingkat-tingkat tujuan Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Jika suatu calon proyek dapat diharapkan memberikan andil terhadap pencapaian tujuan-tujuan yang dirumuskan oleh pemerintah, maka nilai menurut tujuannya akan tinggi.

3. Implementasi Program dan Proyek.

Apabila kita cermati tentang pengertian program dan proyek, maka kita akan mengerti bahwa program itu terdiri dari berjenis-jenis proyek yang terkait satu sama lain. Mengingat sifatnya yang demikian itu maka dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan aspek koordinasi dan konsistensi menjadi sangat penting. Keberhasilan program dan proyek dengan demikian akan sangat tergantung pada kerjasama dengan organisasi atau instansi yang terkait. Akan tetapi tidak semua program dan proyek dibentuk koordinator program.

Keberhasilan program dan proyek juga dipengaruhi oleh keteladanan pimpinan program dan proyek. Hal ini diperkuat oleh hasil temuan yang dipaparkan dalam pertemuan di Tokyo tentang kasus empirik keberhasilan proyek besar di negara berkembang. Dari beberapa kasus itu nampak bahwa kemampuan, kesungguhan dan inspirasi semangat dari pimpinan merupakan determinan utama keberhasilan suatu program atau proyek. Masalah lain yang sering menghambat implementasi program dan proyek adalah masalah biaya. Hal ini terutama sekali muncul jika program dan proyek dibiayai dari sumber yang beragam, misalnya lewat bantuan program dan bantuan proyek serta lewat kredit ekspor.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi adalah tata kerja. Dalam hal ini perlu diatur secara jelas tentang pembagian tugas dalam organisasi, komunikasi vertikal-diagonal-horizontal dalam organisasi seperti sistem pelaporannya. Langkah penting dalam implementasi adalah pengendalian pelaksanaan. Sasaran dalam pengendalian adalah yang berkaitan dengan tujuan, sehingga pencapaian tujuan dapat lebih terjamin.

4. Evaluasi dan Monitoring.

Monitoring adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti, mengamati dan melacak jalannya pelaksanaan program dan proyek pembangunan

dengan menggunakan sistem pelaporan dan tinjauan langsung ke lokasi agar memperoleh data dan informasi yang jelas serta menghimpun masalah yang ada untuk segera dijadikan alternatif pemecahan sebagai input penyempurnaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dari dekat pelaksanaan pembangunan dan mengidentifikasi tindakan korektif kemudian dimungkinkan untuk pengambilan penyesuaian serta mendukung usaha penyempurnaan.

Monitoring dapat dibedakan ke dalam monitoring umum dan monitoring proyek. Monitoring umum adalah monitoring yang melihat semua kegiatan pembangunan sebagai obyeknya. Monitoring umum berfungsi mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut yang secara fungsional dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan.

Monitoring proyek adalah monitoring yang melihat kegiatan-kegiatan dalam suatu proyek sebagai obyek. Monitoring proyek berfungsi mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna kegiatan-kegiatan tersebut dalam hubungan dengan penggunaan input proyek, untuk mencapai hasil proyek yang diharapkan dan juga berfungsi untuk mengamati apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Monitoring proyek dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Umpan Balik (sistem pelaporan)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pelaporan ini adalah:

- 1) Siapa yang menjadi pemakai utama informasi monitoring tersebut.
- 2) Siapa pula yang memberi informasi utama. Secara berturut-turut dapat disebut secara berjenjang adalah: Pelaksana teknis, Pimpinan Proyek, Kepala Dinas atau Instansi, Departemen teknis sesuai bidang tugasnya.
- 3) Waktu penyampaian laporan atau kegiatan monitoring.
- 4) Isi Pelaporan menyebutkan:
 - a) Tujuan fungsional proyek, sasaran-sasarannya dan faktor ketidakpastian seperti tercantum dalam kerangka proyek.
 - b) Hasil proyek (realisasi proyek)

- b. Peninjauan Lapangan
- c. Mengikuti terus hasil umpan balik dan peninjauan lapangan untuk mendapatkan peringatan awal (*Early Warning System*).
- d. Evaluasi.

Evaluasi ini bisa dilakukan tergantung kepada kebutuhan apakah setiap 3 bulan, kwartal atau pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan, guna mengkaji sejauh mana sasaran dan tujuan fungsional proyek tersebut telah tercapai.

Berbeda dengan Zauhar, Gittinger (Gittinger, 1979, hal.1-27 dalam Pudjosumarto, 1988, hal.6-7) memberikan pemikirannya terhadap tahapan proyek yang ia sebut sebagai *Project Cycle* yang terdiri 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Identifikasi; dimana dalam tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mendapat gambaran mengenai kemampuan potensial dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan (identifikasi potensi proyek). Potensi tersebut dapat diperoleh dari survey lingkungan proyek yang akan dilaksanakan, dengan memperhatikan saran-saran dari ahli tehnik ataupun pemuka-pemuka masyarakat
2. *Preparation and Analysis*; yaitu mengadakan persiapan terhadap pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini biasanya menyangkut pembuatan *Feasibility Study* (FS) daripada daerah lingkungan proyek yang di tempati, meliputi analisa iklim masyarakat (*invironment analysis*), sosial ekonomi, budaya dan aspek lainnya.
3. *Appraisal*; merupakan tahap penilaian dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Di dalam tahap ini suatu tim dapat membarikan pandangannya, apakah suatu FS disetujui atau diperbaiki.
4. *Implementation* merupakan tahap implementasi daripada proyek yang direncanakan. Yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah :
 - 1) Bahwa proyek yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk dapat mencapai manfaat yang telah ditetapkan .
 - 2) Bahwa proyek yang akan dilaksanakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, baik itu pengaruh positif maupun bersifat negatif.

Tahap implementasi meliputi:

- 1) Periode investasi pada saat proyek utama (*master projects*) telah dikerjakan.
- 2) Periode investasi pada saat proyek keseluruhan telah selesai dikerjakan.
5. *Evaluation*; merupakan tahap penilaian. Evaluasi atau penilaian yang telah dilakukan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi rencana proyek yang akan datang. Evaluasi biasanya dilakukan oleh tim antar disiplin ilmu. Mengadakan evaluasi tidak mesti pada akhir proyek akan tetapi dapat dilakukan pada saat proyek sedang berjalan.

B. Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES).

1. Maksud dan Tujuan.

Dalam buku petunjuk operasional program JPES disebutkan bahwa maksud dari program ini sesungguhnya adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang khas atau spesifik Jawa Timur, dan mengedepankan pada pengembangan jenis kegiatan tertentu yang diharapkan dapat bermanfaat secara signifikan bagi masyarakat miskin yang kehidupan social-ekonominya berat. Secara umum program JPES sama seperti program penanggulangan kemiskinan lainnya yang bertujuan untuk menyelamatkan dan memberdayakan masyarakat miskin dengan memanfaatkan potensi lokal serta kekhasan program JPES yang dapat dikembangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang program pembangunan Jawa Timur.

Sedangkan tujuan dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi dan social masyarakat desa/kelurahan melalui penguatan pendapatan masyarakat yang mengkhhususkan pada:

- a. Peningkatan jumlah kegiatan pembangunan di pedesaan melalui stimultan Program JPES Pemprop Jawa Timur dalam mendorong program pembangunan pedesaan melalui APBD Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja warga masyarakat setempat di lokasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dan sarana dan prasarana.
- c. Pendayagunaan tenaga warga masyarakat lokal untuk meningkatkan penghasilan tambahan melalui kegiatan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja setempat (*off season job opportunity*).
- d. Peningkatan produktivitas dan kebersamaan, tanggung jawab dan rasa memiliki masyarakat setempat terhadap infrastruktur dan sarana yang telah dibangun yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- e. Penguatan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat, desa/kelurahan agar berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.

- f. Peningkatan SDM masyarakat desa melalui kegiatan nyata (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian) dalam berorganisasi melaksanakan pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

2. Ruang Lingkup, Sasaran dan Target.

Program JPES yang dibiayai dari dana APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2007 tetap difokuskan pada pola **padat karya**, yaitu program pembangunan sarana dan prasarana desa setempat yang pelaksanaannya melibatkan peran aktif tenaga kerja dan partisipasi masyarakat miskin setempat. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dana pendampingan (*cost sharing*) APBD Kabupaten/Kota masing-masing dapat menyusun program kemiskinan lain sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan sasaran dan target dari program JPES adalah sebagai berikut:

- a. Pada tingkat individu, yakni orang miskin di Propinsi Jawa Timur. Target yang ingin dicapai adalah keikutsertaan orang-orang miskin dalam program dan kegiatan pembangunan di wilayahnya, agar secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- b. Pada tingkat keluarga miskin, target yang ingin dicapai adalah masing-masing keluarga miskin dapat memiliki sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- c. Pada tingkat komunitas masyarakat miskin, target yang ingin dicapai adalah menumbuhkembangkan solidaritas dan interaksi sosial agar dapat saling bekerjasama dan mengembangkan kegiatan sosial yang dapat menambah penghasilan dan pengetahuan untuk bekal memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- d. Pada tingkat wilayah, diprioritaskan kepada desa atau kelurahan miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pendataan Sosial Ekonomi 2005 yang diperbaharui tahun 2006 Kabupaten/Kota Jawa Timur. Target yang ingin dicapai adalah masing-masing desa dan kelurahan miskin dapat memiliki prasarana dan sarana dasar yang layak dan bermanfaat.

3. Kriteria Anggota Kelompok Sasaran dan Hasil yang Diharapkan.

Kelompok masyarakat miskin yang menjadi target prioritas dalam JPES di masing-masing desa/kelurahan adalah warga termiskin dari masyarakat miskin di desa/kelurahan setempat. Untuk menentukan sasaran dalam program JPES adalah:

- a. Penduduk miskin produktif (pada umumnya usia kerja 19-55 tahun).
- b. Buruh (buruh tani, buruh nelayan, buruh industri kecil dan lain-lain).
- c. Perempuan miskin produktif yang tidak mempunyai penghasilan tetap.

Dengan dilaksanakannya Program JPES ini maka hasil yang diharapkan adalah:

- a. Masyarakat miskin mampu berkembang dan makin berdaya melalui dukungan pranata sosial, solidaritas dan daya kohesi sosial dalam kelompoknya;
- b. Masyarakat miskin mampu melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

C. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat.

1. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada *empowerment* yang berarti sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat menitik beratkan pada penekanan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir mereka sendiri. Pada dasarnya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996 dalam Setiana, 2005, hal.6)).

Pemberdayaan lebih berupa pada tindakan-tindakan yang konkrit yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan (Mubyarto 1993 dalam Suryono, 2006, hal.147). Apabila kita mengambil suatu kesimpulan dari pengertian antara Mubyarto dan Kartasasmita maka dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan itu adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian,

sehingga orang atau lembaga tersebut mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Terdapat tiga proses pentahapan pemberdayaan masyarakat yang perlu dilalui (Priyono, 1996 dalam Suryono, 2006, hal.147), yaitu:

1. Inisiasi. Masyarakat mendapatkan keberdayaan diri dari pihak luar, dilakukan oleh pihak luar dan diperuntukkan bagi masyarakat.
2. Partisipatoris. Masyarakat mendapatkan keberdayaan dari pihak luar, dilakukan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat.
3. Emansipatif. Masyarakat mendapatkan keberdayaan dari, oleh dan untuk mereka sendiri.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga jalur (Kartasmita 1995:- dalam Suryono, 2006, hal147-148), yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi atau protecting.

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai hubungan antar personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen (Khan 1997, dalam Suryono, 2006, hal.148). Pemberdayaan bisa diartikan sebagai bentuk desentralisasi yang melibatkan para bawahan dalam membuat keputusan (Byars dan Rue 1997, dalam Suryono, 2006, hal.148).

Namun, dalam pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa hambatan dalam prosesnya (Khan 1997, dalam Suryono, 2006, hal.152):

1. Manajemen publik (dalam hal ini adalah pemerintah) tidak memiliki keahlian yang cukup dalam proses pemberdayaan.
2. Kurangnya dorongan dan komitmen manajemen.
3. Adanya keengganan karyawan (bawahan atau rakyat) untuk diberdayakan.
4. Besarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan.
5. Manajemen gagal dalam menyediakan umpan balik (*feedback*) dan saran yang konstruktif.

Sebenarnya, program pemberdayaan memiliki tujuan (Suryono, 2006, hal.157), antara lain :

1. Meniadakan segala peraturan, prosedur, perintah dan lain-lain yang tidak perlu dan merintang organisasi untuk mencapai tujuan.

2. Menghapuskan hambatan-hambatan sebanyak mungkin (orang-orang, peraturan-peraturan dan sebagainya).
3. Melepaskan semua halangan-halangan yang hanya memperlamban reaksi dan merintangi aksi organisasi dan orang-orang yang bekerja didalamnya.

Pemberdayaan juga memberikan manfaat bagi individu-individu dan organisasi-organisasi (Suryono, 2006 hal.157-158), antara lain :

1. Merupakan kesempatan untuk meningkatkan kecakapan-kecakapan yang penting (kecakapan yang baru dan pengalaman yang beraneka ragam).
2. Memberikan rasa berprestasi yang lebih besar yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasi.
3. Meningkatkan semangat kerja.
4. Membantu mengurangi rasa stress.
5. Bertambahnya efektivitas organisasi karena berkurangnya / hilangnya hambatan kerja.
6. Pemberdayaan pada dasarnya memungkinkan organisasi untuk menanggapi pelanggan, dengan tuntutan pasar yang cepat, fleksibel, dan efisien dan hasilnya adalah berkurangnya pemborosan, penundaan dan kesalahan juga terbangunnya suatu tim kerja dimana staf menjadi sumber daya yang dimanfaatkan secara penuh.

Ada delapan butir pedoman pemberdayaan yang dapat dilaksanakan (Suryono, 2006 hal.158), antara lain sebagai berikut :

1. Mengembangkan visi bersama tentang apa yang hendak dicapai.
2. Mendidik.
3. Menyingkirkan rintangan-rintangan.
4. Mengungkapkan (menjelaskan tentang arti, manfaat-manfaat pemberdayaan) .
5. Menyemangati.
6. Memperlengkapi.
7. Menilai.
8. Memeberikan harapan.

2. Definisi Pembangunan Masyarakat.

Dalam perkembangannya, definisi mengenai pembangunan masyarakat memiliki banyak arti, seperti halnya yang disampaikan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Cook (1994) (dalam <http://subejo.staff.ugm.ac.id>) menggarisbawahi bahwa:

pembangunan atau secara spesifik pembangunan masyarakat adalah merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan. Ini merupakan tipe tertentu tentang perubahan menuju kearah yang positif. Singkatnya *community development* merupakan suatu tipe tertentu sebagai upaya yang disengaja untuk memacu peningkatan atau pengembangan masyarakat.

Sedangkan Giarci (2001) (dalam <http://subejo.staff.ugm.ac.id>) memandang *community development* sebagai:

suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini memfasilitasi penguatan ekonomi lokal dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan *collective action* dan melakukan *political pressure* serta membawa usaha-usaha bersama untuk memulai perubahan-perubahan di tingkat lokal dimana *networking* menjadi salah satu kata kuncinya.

Pembangunan masyarakat dapat dilihat dalam sudut pandang yang luas maupun sudut pandang yang sempit. Dalam sudut pandang yang luas pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial berencana. Dalam artian, sasaran pembangunan masyarakat adalah perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi, teknologi bahkan politik dan sosial. Dalam sudut pandang yang sempit pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial berencana di lokalitas tertentu, seperti kampung, desa, kota kecil atau kota besar.

Definisi pembangunan masyarakat yang telah diterima secara luas adalah definisi yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1956 yang berbunyi sebagai berikut:

Community development is the processes by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations and to enable them to contribute fully to national progress.

This complex of processes is thus made of two essentials elements: participation of the people themselves in efforts to improve their level of living with as much reliance as possible on their own initiative; and the provisions of technical and other services in ways which encourage initiative, self-help and mutual help and make these more effective. It is expressed in programmes designed to achieve a wide variety of specific improvements.

These programmes are usually concerned with local communities because of the fact that the people living together in a locality have many and varied interests in common. Some of their interests are expressed in functional groups organized to further a more limited range of interests not primarily determined by locality.

(20th Report to ECOSOC of the UN Administrative Committee on Coordination, E/2931, annex III, New York, 18 October 1956, dalam J. Bhattacharyya, Administrative Organisation for Development, 1972 hal.4 dalam Ndraha, 1990 hal.72-73.).

Menurut definisi tersebut, pembangunan masyarakat atau *community development* adalah suatu proses. Baik berupa inisiatif atau usaha masyarakat itu yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan berbagai komunitas, mengintegrasikan berbagai komunitas itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan negara, berjalan secara terpadu di dalam proses tersebut.

Proses tersebut meliputi dua elemen dasar, yaitu pertama partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri dan kedua bantuan dan pelayanan teknis yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan di dalam berbagai program yang dirancang untuk melancarkan perbaikan terhadap berbagai proyek-proyek khusus.

Pada dasarnya, fokus dalam pembangunan masyarakat ini terdiri dari dua hal yaitu pembangunan dan masyarakat. Pada sektor pembangunan, yang menjadi fokus adalah pada aspek ekonomi, yakni bagaimana meningkatkan pendapatan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produksi. Sedangkan pada sektor masyarakat, yang menjadi fokus adalah mengelola, membina dan melayani masyarakat.

Dunham (dalam Ndraha, 1990, hal.77) memaparkan adanya empat unsur dasar dalam pembangunan masyarakat, yaitu :

1. Program berencana.
2. Pambangkitan tekad masyarakat untuk menolong diri sendiri dan tidak selalu bergantung pada pihak lain.
3. Bantuan teknis (dari pihak lain), termasuk personil peralatan dan dana.
4. Pemanduan berbagai keahlian untuk membantu komunitas.

3. Pendekatan Pembangunan Masyarakat.

Pembangunan masyarakat yang pada dasarnya memfokuskan diri pada manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan berorientasi pada proses pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia, karena dalam pendekatan ini, yang lebih penting adalah bukan pada hasilnya secara material akan tetapi bagaimana proses sehingga hasil tadi diperoleh, apakah sudah melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya yang menggambarkan adanya pengakuan terhadap kapasitas masyarakat yang bersangkutan. Secara singkat, dalam proses pembangunan, masyarakat tidak diperlakukan sebagai obyek akan tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku pembangunan.

Ada 4 (empat) pendekatan di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat (Soetomo, 2006, hal.44-78), yaitu :

1. *Improvement vs Transformation.*

Salah satu unsur yang cukup esensial dari proses pembangunan masyarakat adalah adanya proses perubahan. Sebagai perubahan yang terencana, pada umumnya dikenal adanya target atas perubahan yang diharapkan.

Perbedaan di antara kedua kutub pendekatan yaitu *improvement approach* dan *transformation approach* terletak pada sikapnya terhadap eksistensi dari struktur sosial yang ada. Dalam *improvement approach*, walaupun dilakukan perubahan akan tetapi masih berbasis pada struktur yang ada. Sedangkan dalam *transformation approach* perubahan justru terjadi pada level struktur masyarakatnya melalui transformasi struktural.

2. Proses vs Hasil material.

Apabila kita melihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan pembangunan masyarakat ada yang mengutamakan

dan memberikan penekanan pada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan dapat terwujud. Namun ada pula yang lebih menekankan pada hasil material, dalam pengertian proses dan mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu dipersoalkan, yang penting dalam waktu yang relative singkat dapat dilihat hasilnya secara fisik.

Pendekatan yang pertama seringkali disebut sebagai pendekatan yang mengutamakan proses dan lebih menekankan pada aspek manusianya. Sedangkan pada pendekatan kedua disebut sebagai pendekatan yang lebih mengutamakan hasil material dan lebih menekankan pada target.

3. *Self help vs Technocrati.*

Perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan masyarakat dapat merupakan perubahan yang menggunakan kekuatan, potensi dan sumber-sumber dari masyarakat sendiri tetapi dapat pula sebagai perubahan yang didorong oleh potensi dan kekuatan dari luar. Pada kenyataannya, jarang kita temui suatu perubahan yang ada hanya bersumber dari salah satu di antara keduanya.

Perbedaan dalam hal itu terletak pada sumber mana yang lebih dominan. Pendekatan pembangunan masyarakat yang mengutamakan sumber, potensi dan kekuatan dari dalam biasa disebut dengan selfhelp approach. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip demokrasi dan prinsip menentukan nasib sendiri. Prinsip yang digunakan adalah pembangunan yang bersifat humanis yang mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa masyarakat sendiri dapat menjadi pelaku yang sangat berarti sekaligus menjadi pengendali pembangunan.

4. *Uniformitas vs Variasi lokal.*

Pendekatan yang lebih menitik beratkan pada keseragaman biasanya diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan masyarakat yang dirancang pada tingkat pusat, kemudian diterapkan pada seluruh masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan yang ada terutama karakteristik di masing-masing desa. Dalam pelaksanaannya menjadi

cenderung bersifat sentralistis dan top down. Pada umumnya, alasan yang dikemukakan bagi penggunaan pendekatan ini adalah masalah efisiensi, kemudahan dalam kontrol pelaksanaan, adanya kepastian program yang akan mempermudah dalam penyusunan perencanaan tingkat nasional, bahkan tidak jarang juga menggunakan alasan yang dikaitkan dengan masalah-masalah integrasi nasional.

Berbeda dengan pendekatan uniformitas, pendekatan yang menekankan pada variasi lokal ini lebih bersifat adaptif, fleksibel dan melalui proses belajar. Program-program yang berorientasi pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal ini memberikan alasan rasional agar masyarakat lokal terlibat sejak identifikasi perumusan masalah, perencanaan dan pelaksanaan program.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Pada dasarnya terdapat tiga macam metode penelitian yang utama yaitu metode historis, metode diskripsi dan metode penelitian eksperimental. Metode historis lebih menekankan pada gejala yang telah lampau, sedangkan metode diskriptif ditujukan pada masalah yang terjadi pada masa sekarang, dan metode eksperimental menekankan pada percobaan guna menemukan satu hasil atau lebih sesuai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Whitney 1960, dalam Nazir, 2005, hal.54). Sementara itu penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2005, hal.11)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Metode kualitatif juga dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2003, hal.5). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebenarnya memiliki tujuan atau arah bukan untuk menguji suatu hipotesis yang didasarkan atas teori tertentu melainkan untuk menemukan pola-pola yang mungkin dapat dikembangkan menjadi suatu teori.

B. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian memuat yang menjadi pusat perhatian dari suatu penelitian. Dan tidak ada satupun penelitian yang dilakukan tanpa adanya fokus, di mana fokus itu pada dasarnya adalah masalah (Moleong, 2000, hal.237). Karena merupakan satu hal yang penting maka sebaiknya fokus peneliti harus dilakukan sebelumnya agar peneliti memiliki arah yang jelas dan membantu peneliti membatasi bidang sasaran. Sehingga permasalahan yang diteliti nantinya tidak meluas dan pengumpulan data yang tidak diperlukan dapat dihindari.

Perlu ditekankan disini, walaupun fokus penelitian tidak dirumuskan secara ketat dan dapat mengalami perubahan selama proses penelitian, tetapi fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas hal-hal yang akan diteliti. Fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Fokus penelitian ini selalu disempurnakan selama proses penelitian dan bahkan memungkinkan untuk diubah pada saat berada di lapangan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Program JPES di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, antara lain meliputi:
 - a) Perencanaan Program JPES.
 - b) Pelaksanaan Program JPES.
2. Hasil yang diraih dalam pelaksanaan Program JPES di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, antara lain meliputi:
 - a) Hasil pelaksanaan program secara fisik.
 - b) Hasil pelaksanaan program secara non fisik
3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program JPES, anatara lain meliputi:
 - a) Faktor pendukung
 - (a) Masyarakat
 - (b) Anggaran
 - (c) Sarana
 - b) Faktor penghambat

- (a) Sumber daya manusia
- (b) Lembaga atau Birokrasi

C. Lokasi dan Situs Penelitian.

Sesuai dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu Pelaksanaan Program JPES (Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial) di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo maka situs dan lokasi penelitian yang ditentukan adalah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan Kecamatan Banyuanyar merupakan salah satu wilayah yang sangat merasakan dampak dari kenaikan BBM yang terjadi pada tahun 2006 dan juga Kecamatan Banyuanyar memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi.

Selain itu, masalah keberagaman yang terdapat di Kecamatan Banyuanyar mulai dari mata pencaharian, etnis dan lain lain membuat kondisi kehidupan khususnya kondisi perekonomian masyarakatnya berbeda-beda. Kompleksnya masalah perekonomian yang berkembang dan mengikuti arus global membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi ini mengingat latar belakang masyarakat yang terdapat di Kecamatan Banyuanyar memiliki keragaman atau memiliki pluralitas.

D. Sumber dan Jenis Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Informan.

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang dapat memberi informasi terkait dengan Pelaksanaan Program JPES di Kecamatan Banyuanyar. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah pengurus Program JPES yang terdiri dari Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Banyuanyar yakni Bpk. Sunardi SH. Serta Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yakni Bpk. Tjatur dan para staff di Kecamatan Banyuanyar sedangkan informan lainnya bisa berasal dari pegawai Kecamatan Banyuanyar.

b. Peristiwa.

Selain keterangan dari informan tersebut, peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dipandang cocok dan bermanfaat untuk mengungkap permasalahan atau fokus penelitian. Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Banyuwangor dalam melaksanakan Program JPES pada tahun 2007 melalui arsip-arsip.

c. Dokumen.

Data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data ini merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi misalnya skema dan bagan keorganisasian, peraturan-peraturan yang tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini, beberapa artikel yang diakses melalui internet yang berhubungan dengan Pelaksanaan Program JPES.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer.

Yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari nara sumber. Pada umumnya data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait sehingga memperoleh data dan informasi yang lengkap, yang mungkin tidak didapatkan dari data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh dari Camat Banyuwangor, Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Banyuwangor, Kepala Desa penerima Bantuan program serta warga sekitar yang telah mengetahui tentang Program JPES.

b. Data Sekunder.

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasannya adalah antara lain karena dokumen

merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian,

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah :

- 1) Buku kependudukan Kecamatan Banyuwangor
- 2) Buku Petunjuk Operasional Program Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial (JPES).

E. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data diperlukan tehnik-tehnik tertentu agar data yang diperoleh nantinya tidak terjadi penyimpangan dengan apa yang dimaksudkan, yaitu data yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti. sehingga dalam penelitian digunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang saling melengkapi, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*) dengan mendatangi lokasi. Sebelum memasuki lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu menyertakan surat pengantar dari Fakultas yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh kantor Bakesbang Linmaspol Probolinggo.
2. Ketika berada di lokasi (*getting along*), peneliti memperkenalkan diri pada pihak bersangkutan yaitu pada Camat Banyuwangor beserta staf. Selain itu peneliti juga menyampaikan maksud untuk mengadakan penelitian.
3. Pengumpulan data-data (*logging in data*) yang dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
 - a) Observasi, penggunaan teknik observasi ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara. Dalam proses ini peneliti tidak dapat mengamati proses pelaksanaan program mulai dari awal karena pada waktu penelitian ini dilakukan, pelaksanaan program telah dilaksanakan. Peneliti hanya datang ke kantor Kecamatan Banyuwangor dan mengamati kinerja pelaksana Program JPES tersebut.
 - b) Wawancara, merupakan suatu cara pengumpulan data primer melalui tanya jawab secara langsung dengan pimpinan maupun staff yang dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara.

- c) Dokumentasi, adalah pengumpulan data dengan mempelajari dan meyakinkan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Dokumen yang diperlukan untuk menunjang pemahaman dan penggalian data dalam penelitian ini berupa catatan resmi, arsip, makalah, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh peneliti :

- 1) Buku kependudukan Kecamatan Banyuwangor
- 2) Buku Petunjuk Operasional Program Jaring Pengaman Ekonomi Dan Sosial (JPES).

F. Instrumen Penelitian.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan antara lain adalah:

1. Peneliti sendiri. Peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif. Karena seorang peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2000, hal.121).
2. Catatan lapangan (*field note*). Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.
3. Interview Guide. Dalam ini peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. (Moleong, 2000, hal.136)
4. Dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. data ini dapat diperoleh dari arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini.

G. Analisis Data.

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa terhadap data tersebut. Analisa adalah proses menyusun data agar dapat di tafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori (Nasution, 1988 hal. 126)

Sementara itu adapun tahap-tahap dalam menganalisa data tersebut yaitu:

1. Reduksi data.

Yaitu proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terdapat di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, menyortir dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian data.

Yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk paling umum yang digunakan berupa teks uraian.

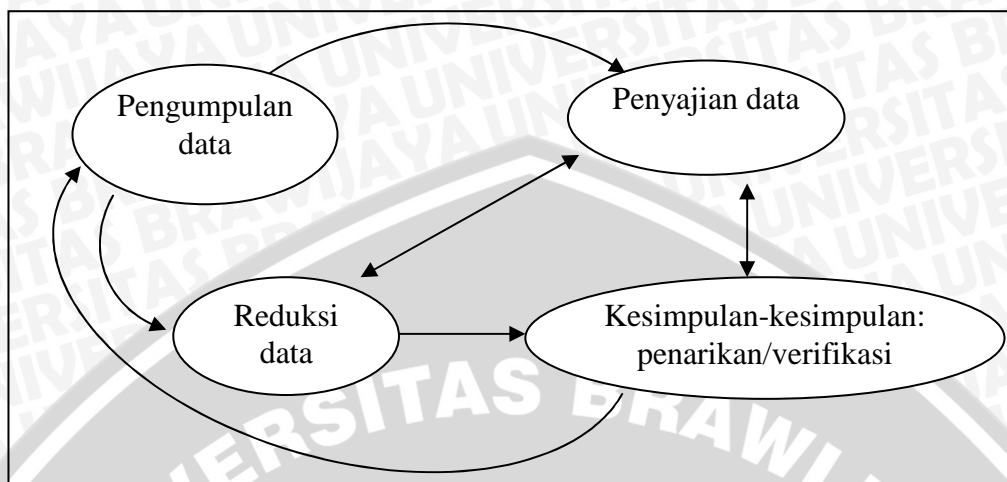
3. Penarikan kesimpulan.

Merupakan akhir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh di lapangan agar data tersebut valid

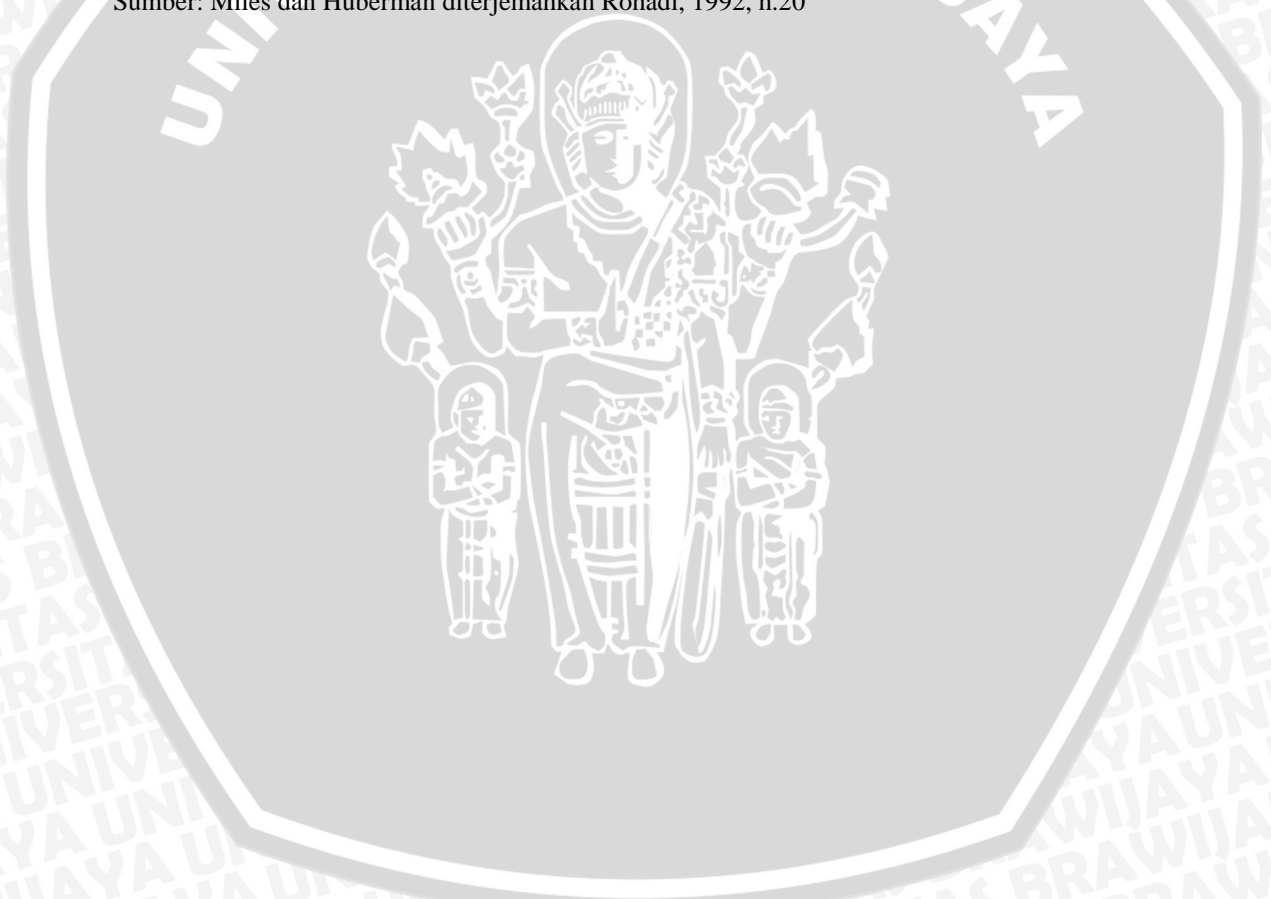
Ketiga tehnik analisa data tersebut, baik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan pada dasarnya sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 1992, hal.19).

Sehingga dalam penelitian kualitatif, analisis data pada akhirnya akan lebih banyak didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta sedikit sekali menggunakan data yang berupa angka. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan akan ditampilkannya tabel untuk mendukung kelengkapan data dan kevalidan data

Bagan 1. Proses Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman diterjemahkan Rohadi, 1992, h.20



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan terhadap deskripsi wilayah penelitian diharapkan akan membantu peneliti agar dapat memahami secara jelas tentang karakteristik dari populasi yang diteliti dan pada akhirnya akan membantu dalam menganalisa data. Agar dapat mengupas dengan lengkap dan menyeluruh dalam deskripsi penelitian, maka ada 3 (tiga) aspek yang relevan antara lain aspek demografis, ekonomi dan sosial budaya yang secara keseluruhan diharapkan mampu mencerminkan kondisi di lokasi penelitian sehingga dapat mendukung hasil penelitian. Penelitian ini mengambil deskripsi wilayah di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kecamatan Banyuanyar terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berada di bagian tengah selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Kecamatan Gending
Timur	: Kecamatan Maron
Selatan	: Kecamatan Tiris
Barat	: Kecamatan Tegalsiwalan

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, maka Kecamatan Banyuanyar berada pada ketinggian 81 meter diatas permukaan air laut. Iklim dikawasan Kecamatan Banyuanyar sebagaimana dengan Kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo yaitu beriklim tropis. Keadaan iklim pada umumnya ditinjau dengan indikator curah hujan, yaitu sebagai berikut:

Curah hujan terbesar	: 304 mm
Curah hujan terkecil	: 15 mm
Jumlah hari hujan	: 32 hari
Curah hujan setahun	: 517 mm

Temperatur udara di Kecamatan Banyuanyar sama halnya dengan Kecamatan atau daerah lain yang memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 250 meter diatas permukaan air laut suhu udaranya relatif panas.

14 desa yang terdapat di Kecamatan Banyuwangor adalah sebagai berikut: Gununggeni, Liprak Kidul., Sentulan, Gading Kulon, Klenang Kidul., Klenang Lor, Tarokan, Liprak Wetan, Liprak Kulon, Banyuwangor Kidul, Blado Wetan, Banyuwangor Tengah, Pendil dan Alassapi.

Kecamatan Banyuwangor memiliki jumlah penduduk \pm 51.826 (dalam Kecamatan Banyuwangor dalam angka) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Data Penduduk Kecamatan Banyuwangor menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
0-4	2.219	2.384	4.603
5-9	2.141	2.301	4.442
10-14	2.054	2.207	4.261
15-19	2.218	2.384	4.602
20-24	2.111	2.268	4.379
25-29	2.398	2.578	4.976
30-34	2.125	2.284	4.409
35-39	2.157	2.318	4.475
40-44	1.796	1.930	3.726
45-49	1.436	1.543	2.979
50-54	1.125	1.209	2.334
55-59	868	933	1.801
60-64	853	917	1.770
65-69	542	583	1.125
70-74	405	435	840
75 +	532	572	1.104
Jumlah	24.980	26.847	51.826

Sumber: Proyeksi berdasarkan SP 2000 dan Susenas 2006 (dalam Kecamatan Banyuwangor dalam Angka tahun 2006).

Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Banyuwangor yang terbanyak adalah oleh penduduk berusia antara 25 hingga 29 tahun yaitu sejumlah 4.976 jiwa. Angka kelahiran pun bisa di asumsikan tinggi, hal ini bisa kita lihat dengan tingginya jumlah penduduk yang berusia 0 hingga 4 tahun yaitu sejumlah 4.603 jiwa.

Selanjutnya, ditinjau dari aspek pendidikan, menurut sumber Kecamatan Banyuwangor dalam Angka Tahun 2005 bahwa komposisi penduduk Kecamatan Banyuwangor berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Data Penduduk menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Kecamatan Banyuwangor

no	Desa	Tidak sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat Akademi / PT
1	Sentulan	892	508	372	82	54	8
2	Gading Kulon	1454	297	1049	109	92	11
3	Klenang Kidul	1026	324	1153	204	143	16
4	Klenang Lor	1187	659	569	116	116	13
5	Alassapi	383	447	238	82	67	6
6	Pendil	1851	883	345	206	149	23
7	Tarokan	1279	558	751	173	147	17
8	Liprak Wetan	1652	719	840	248	144	12
9	Liprak Kidul	1621	402	2206	347	148	14
10	Liprak Kulon	1148	820	1478	569	173	19
11	Banyuwangor Tgh	986	328	572	151	108	11
12	Banyuwangor Kdl	949	326	931	167	109	11
13	Gununggeni	2472	1239	1328	174	93	12
14	Blado Wetan	412	901	534	114	94	14
	Jumlah	17312	8411	12366	2742	1637	187

Sumber: Kecamatan Banyuwangor dalam Angka Tahun 2005

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Banyuwangor berdasarkan data statistik Kecamatan Banyuwangor Dalam Angka Tahun 2005 ternyata penduduk yang masuk dalam kategori tidak tamat SD masih cukup besar yaitu mencapai 8411 jiwa. Mungkin kondisi ini akan bertambah apabila kita melihat angka atau jumlah penduduk yang buta huruf dan putus sekolah. Kondisi ini menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah untuk lebih memberikan perhatian dalam bidang pendidikan. Hal itu dapat diwujudkan dengan membuat kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan baik yang bersumber dana dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten.

Sedangkan komposisi penduduk Kecamatan Banyuwangor berdasarkan mata pencaharian menurut sumber Kecamatan Banyuwangor dalam Angka Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Data Penduduk menurut Mata Pencaharian
Kecamatan Banyuwang

No.	Desa	Mata Pencaharian Penduduk					
		PNS (1)	TNI / Polri (2)	Petani (3)	Buruh Tani (4)	Pedagang (5)	Buruh industri (6)
1	Gununggeni	31	-	812	448	662	17
2	Liprak Kidul	52	4	641	957	673	24
3	Sentulan	8	-	352	548	351	7
4	Gading Kulon	22	-	476	714	779	31
5	Klenang Kidul	13	-	494	478	507	63
6	Klenang Lor	57	1	326	481	402	41
7	Tarokan	46	-	431	685	114	28
8	Liprak Wetan	29	1	558	804	293	29
9	Liprak Kulon	24	2	499	771	559	31
10	Banyuwang Kdl	41	1	324	408	112	28
11	Blado Wetan	32	2	319	409	207	37
12	Banyuwang Tgh	28	-	321	418	116	32
13	Pendil	76	5	353	481	479	48
14	Alassapi	28	-	101	419	74	18
	Jumlah	487	16	6007	8021	5328	434



No.	Desa	Mata Pencaharian Penduduk				
		Usaha industri. Rumah tangga (7)	Jasa angkutan (8)	Buruh bangunan (9)	Pensiunan (10)	Lainnya (11)
1	Gununggeni	14	21	43	3	2726
2	Liprak Kidul	66	47	41	11	1798
3	Sentulan	17	18	16	1	399
4	Gading Kulon	19	32	18	7	597
5	Klenang Kidul	16	64	42	8	872
6	Klenang Lor	18	39	37	13	968
7	Tarokan	9	31	16	12	1273
8	Liprak Wetan	7	28	21	5	1451
9	Liprak Kulon	7	29	23	8	1796
10	Banyuanyar Kdl	6	31	19	6	1264
11	Blado Wetan	11	42	14	3	750
12	Banyuanyar Tgh	6	28	15	4	972
13	Pendil	68	43	69	11	1553
14	Alassapi	7	14	18	21	385
	Jumlah	271	467	392	113	16804

Sumber: Kecamatan Banyuanyar dalam Angka Tahun 2006

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kecamatan Banyuanyar menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai buruh tani dan petani, dan diikuti pedagang, buruh industri dan PNS TNI/Polri. Sementara itu, jasa angkutan, buruh bangunan, usaha industri rumah tangga, pensiunan dan bidang lainnya merupakan mata pencaharian yang menempati urutan berikutnya.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Banyuanyar banyak yang menekuni profesi atau bermata pencaharian sebagai petani dan juga sebagai buruh tani hal ini dibuktikan dengan luasnya tanah sawah atau tanah pertanian yang terdapat di Kecamatan Banyuanyar. Mayoritas tanah sawah yang terdapat di Kecamatan Banyuanyar merupakan tanah sawah yang bersifat teknis irigasi. Ini dikarenakan Kecamatan Banyuanyar terletak pada dataran yang memiliki sifat kering.

Selain bidang pertanian, penduduk di wilayah Kecamatan Banyuanyar juga banyak yang beternak. Jenis hewan yang banyak ditenakkan oleh para penduduk ini adalah sapi, khususnya sapi potong dan juga kambing dan domba. Desa Liprak

Kidul merupakan desa yang memiliki jumlah hewan ternak paling banyak di Kecamatan Banyuanyar yaitu mencapai 1750 ekor (data diperoleh dari Mantri Peternakan Kecamatan Banyuanyar dalam Kecamatan Banyuanyar dalam Angka).

Pemerintahan Kecamatan Banyuanyar

Kecamatan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seorang Camat akan dibantu beberapa orang staf. Hal itu sama halnya dengan apa yang terdapat di Kecamatan Banyuanyar dan Kecamatan-kecamatan lainnya. Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - b) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang pelaksanaan tugasnya;

- c) Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- d) Pelaksanaan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- e) Pelaksanaan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
- f) Penghimpunan rencana pembangunan daerah kecamatan;
- g) Pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- h) Pengkoordinasian dan pembagian tugas-tugas terhadap seksi-seksi sebagai perpanjangan tangan dari Camat;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan;
- 2) Melaksanakan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- 3) Menyelenggarakan tugas-tugas rumah tangga dan tata usaha perlengkapan;
- 4) Menyiapkan rapat, pertemuan, upacara dan acara lainnya;
- 5) Mengatur dan mengurus perjalanan dinas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun anggaran dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Mengadministrasikan keuangan;
- 3) Mengurus gaji pegawai;
- 4) Menghimpun data dan pelaporan keuangan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

3. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menghimpun rencana pembangunan daerah kecamatan;
 - 2) Memantau dan mengevaluasi serta mengadakan pengawasan terhadap hasil perencanaan;
 - 3) Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kecamatan;
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- c. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pelayanan pertahanan dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a) Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya;
 - b) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang pelaksanaan tugasnya;
 - c) Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
 - d) Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - e) Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan pertahanan;
 - f) Pendataan potensi kecamatan;
 - g) Perencanaan sarana fisik pamong praja;
 - h) Pemfasilitasian kegiatan pelaksanaan pemilihan umum;
 - i) Pengevaluasian pelaksanaan tugas dan pembuatan laporan;
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan;
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan program dan pembinaan ketentraman, ketertiban dan satuan polisi pamong praja;

- b) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang pelaksanaan tugasnya;
 - c) Penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d) Pengamanan daerah kecamatan dalam rangka mencegah gangguan ketertiban, bencana alam dan kegiatan lainnya;
 - e) Pelayanan dibidang perijinan;
 - f) Penyusunan program dan pembinaan kesatuan bangsa dan ideologi negara serta perlindungan masyarakat;
 - g) Pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian, kuliah kerja nyata dan lain-lain;
 - h) Penyiapan data dan pelaporan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- e. Seksi Perekonomian, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan produksi dan sarana perekonomian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka seksi Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian;
 - b) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang pelaksanaan tugasnya;
 - c) Perencanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang ekonomi masyarakat;
 - d) Penginventarisasian dan penganalisisan dibidang ekonomi;
 - e) Penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan;
 - f) Pengkoordinasian dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan;
 - g) Pembinaan untuk peningkatan usaha gotong royong;
 - h) Pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok;
 - i) Pemantauan harga dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak;
 - j) Pemantuan angkutan penumpang umum;
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Pembangunan, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik prasarana dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan desa/kelurahan dan pembangunan pada umumnya;
- b) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang pelaksanaan tugasnya;
- c) Perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik;
- d) Penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan system Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan;
- e) Penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup;
- f) Pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita;
- b) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang pelaksanaan tugasnya;
- c) Penyusunan program dan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja;
- d) Pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial;
- e) Pengevaluasian pelaksanaan tugas dan pembuatan laporan;

- f) Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan juga beban kerja.

B. Pelaksanaan Program JPES.

Dalam pelaksanaan program JPES, yang menjadi sasaran program adalah keluarga miskin sesuai dengan data BPS Pendataan Sosial Ekonomi 2005 yang diperbaharui pada tahun 2006 dan diprioritaskan yang belum pernah menerima program PAM-DKB. Dalam buku Petunjuk Operasional Program JPES, yang merupakan kriteria kegiatan program ini adalah sebagai berikut:

- a. Banyak menyerap tenaga kerja lokal setempat dan tidak memerlukan teknologi tinggi maupun alat-alat berat dan dikelola dengan manajemen sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- b. Bersifat produktif yang mempunyai nilai ekonomi dan menjadi kebutuhan warga masyarakat setempat;
- c. Merupakan fasilitas umum (*public facility*) berupa sarana dan prasarana yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan golongan maupun perorangan;
- d. Kegiatan bersifat mendukung program pembangunan daerah dan tidak merusak lingkungan;
- e. Atas kesepakatan bersama tidak ada ganti rugi tanah, tanaman dan lain-lainnya;
- f. Hasil pembangunan menjadi asset masyarakat desa/kelurahan.

Sedangkan yang menjadi ruang lingkup kegiatan Program JPES dalam buku Petunjuk Operasional Program JPES adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan /rehabilitasi meliputi: jembatan, jalan makadam, jalan rabat dan jalan paving yang berlokasi di desa setempat;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/normalisasi meliputi: saluran irigasi, talud atau plengsengan sungai dan pengerukan embung yang berlokasi dan untuk kepentingan masyarakat setempat;
- c. Pembuatan/perbaikan bangunan konservasi lahan, meliputi: pembersihan dan penyiapan lahan, pembuatan lubang tanaman, pembuatan teras atau talud, pembuatan saluran pembuang dan lain-lain;
- d. Pekerjaan rehabilitasi lahan bekas penambangan dan pembuatan terumbu karang;
- e. Pembangunan/rehabilitasi sanitasi lingkungan dan air bersih;
- f. Kegiatan sarana dan prasarana lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.

Seluruh kegiatan yang terdapat di dalam Program JPES ini merupakan kegiatan pembangunan yang bersifat pembangunan secara fisik. Pada dasarnya program ini memiliki tujuan yang sama dengan program pengentasan kemiskinan yang lainnya yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu untuk meringankan beban keluarga miskin dan mendorong pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat langsung bagi penduduk miskin. Akan tetapi yang tak kalah penting adalah tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu untuk menumbuhkembangkan kembali solidaritas dan daya kohesi sosial masyarakat agar dapat bekerjasama untuk meningkatkan keberdayaan dan tingkat kesejahteraannya.

a. Organisasi Pelaksana Program JPES

Program JPES ini merupakan Program yang dibentuk atau dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, maka organisasi pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program ini terdiri dari organisasi tingkat Propinsi hingga tingkat Desa. Secara rinci, sesuai dengan buku Petunjuk Operasional Program JPES akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Propinsi.

Organisasi Pelaksana Program JPES di tingkat Propinsi terdiri dari:

a. Pengarah, bertugas:

- a) Memberikan arahan kebijakan penyusunan Petunjuk Operasional Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur;
- b) Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial

b. Sekretariat, bertugas:

- a) Menyusun dan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan Pagu Alokasi Dana Bantuan Program JPES per Kabupaten/Kota.
- b) Menyusun Petunjuk Operasional Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial;
- c) Menyusun jadwal kegiatan dan pemantauan pelaksanaan program kerja;
- d) Menghimpun bahan-bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian program kerja Penyelenggara Program JPES sebagai bahan perumusan pelaksanaan kegiatan;
- e) Menghimpun usulan program kegiatan Program JPES dari Bupati/Walikota se Jawa Timur;
- f) Melakukan kerjasama dengan perbankan untuk penyaluran dana Program JPES kepada penerima bantuan serta Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota;
- g) Menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan Program JPES kepada Bupati/Walikota;
- h) Menyusun dan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang:
 - i. Pendamping Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) penerima bantuan;
 - ii. Lokasi (Kecamatan dan Desa/Kelurahan), nama Pokgakin dan Ketua Pokgakin, alamat, kegiatan, alokasi dana serta

nomor rekening Pokgakin (atas nama Ketua dan Bendahara);

- i) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program JPES.

c. Dewan Pakar selaku Tenaga Ahli Program JPES, bertugas:

- a) Memberikan pertimbangan dan saran terhadap penyusunan rumusan prosentase terhadap klasifikasi urutan Kabupaten/Kota miskin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur dan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan;
- b) Memberikan pertimbangan dan saran terhadap penyusunan Petunjuk Operasional Program JPES;
- c) Membantu pelaksanaan sosialisasi dan informasi tentang pelaksanaan Program JPES;
- d) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Program JPES sebagai perbaikan program selanjutnya;
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan.

d. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) se Jawa Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sosialisasi di wilayahnya;
- b) Melakukan pembinaan kepada Pendamping Propinsi;
- c) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap semua proses administrasi program dan kegiatan JPES;
- d) Membentuk Tim untuk melakukan verifikasi usulan program kegiatan Program JPES dari Bupati/Walikota sebagai dasar pertimbangan Gubernur menerbitkan Keputusan tentang lokasi (Kecamatan dan Desa/Kelurahan), nama Pokgakin dan Ketua Pokgakin, alamat, kegiatan, alokasi dana serta nomor rekening Pokgakin (atas nama Ketua dan Bendahara);
- e) Melakukan pemantuan kegiatan Program JPES;

- f) Mengkoordinasikan serta meneliti laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Program JPES dari Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan;
 - g) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Program JPES di masing-masing Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan.
- e. Untuk kelancaran pelaksanaan di lapangan, Tim Penyelenggara Program JPES Propinsi menunjuk dan menetapkan Pendamping Pokgakin, yang pembinaannya dilakukan Bakorwil dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan langsung oleh Tim Kabupaten/Kota Program JPES, untuk:
- a) Membantu kelancaran administratif dan teknis tugas Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Program JPES;
 - b) Bersama Camat dan Kepala Desa/Lurah membantu sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan Program JPES di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c) Bersama Kepala Desa/Lurah mendata anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran Program JPES;
 - d) Membantu mengkoordinasikan peran Pokgakin dalam kegiatan pelaksanaan Program JPES;
 - e) Membantu/memfasilitasi Pokgakin dalam menyusun proposal usulan kegiatan;
 - f) Membantu merekapitulasi usulan Desa/Kelurahan tentang kegiatan, lokasi dan Pokgakin;
 - g) Membantu memfasilitasi Pokgakin dalam menyusun laporan pertanggungjawaban;
 - h) Melaporkan secara periodik (bulanan) kegiatan Program JPES kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan tembusan Penyelenggara Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur.

2. Tingkat Kabupaten/Kota.

a. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah organisasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan koordinasi sebagai berikut:

- a) Pengarah : (1) Bupati/Walikota, (2) Sekretaris Daerah
- b) Ketua : Kepala Bappeda
- c) Sekretaris : Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Penyusunan Program atau Bagian yang terkait)
- d) Bendahara;
- e) Anggota dari unsur-unsur Bapemas/Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan

b. Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan pengelolaan Program JPES di wilayahnya;
- b) Mengkoordinasikan peran dinas/instansi dan unsur terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan Program JPES;
- c) Merekapitulasi/mensinkronisasi pelaksanaan Program JPES dengan program kemiskinan lainnya;
- d) Menetapkan pembagian alokasi dana Program JPES pada masing-masing Desa/Kelurahan sesuai prioritas program penanganan kemiskinan;
- e) Mensosialisasikan petunjuk operasional program dan kegiatan JPES kepada Camat, Kepala Desa/Lurah terkait;
- f) Menghimpun dan mengusulkan lokasi/kegiatan maupun nomor rekening Pokgakin Program JPES di wilayahnya kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi usulan Program JPES;
- g) Mengkoordinasikan usulan Program JPES dengan Bakorwil;
- h) Menyampaikan usulan Program JPES kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan;
- i) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program JPES di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- j) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan JPES setiap bulan kepada Gubernur Jawa Timur cq. Biro Administrasi Pembangunan dengan tembusan kepada Bakorwil.

3. Tingkat Kecamatan.

Camat merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program JPES di lingkup Kecamatan. Hal ini karena jabatannya sebagai Pembina JPES di tingkat Kecamatan dengan tugasnya sebagai berikut:

- a) Membantu Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program JPES di wilayahnya;
- b) Memfasilitasi diterbitkannya nomor rekening masing-masing Pokgakin pada Bank JATIM;
- c) Bersama Pendamping Pokgakin dan Perangkat Desa/Kelurahan terkait serta Bank JATIM meneliti usulan Desa/Kelurahan tentang kegiatan, lokasi, usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan Pokgakin di Desa/Kelurahan serta nomor rekening Ketua dan Bendahara Pokgakin;
- d) Menyampaikan kepada Bupati/Walikota tentang rekapitulasi usulan nama Pokgakin beserta lokasi, kegiatan, anggaran biaya, dan nomor rekening Pokgakin di wilayahnya melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- e) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan Program JPES di wilayahnya;
- f) Melaporkan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan JPES setiap bulan kepada Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

4. Tingkat Desa/Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program JPES di lingkup Desa/Kelurahan. Hal ini karena jabatannya sebagai Pembina JPES di tingkat Desa/Kelurahan dengan tugasnya sebagai berikut:

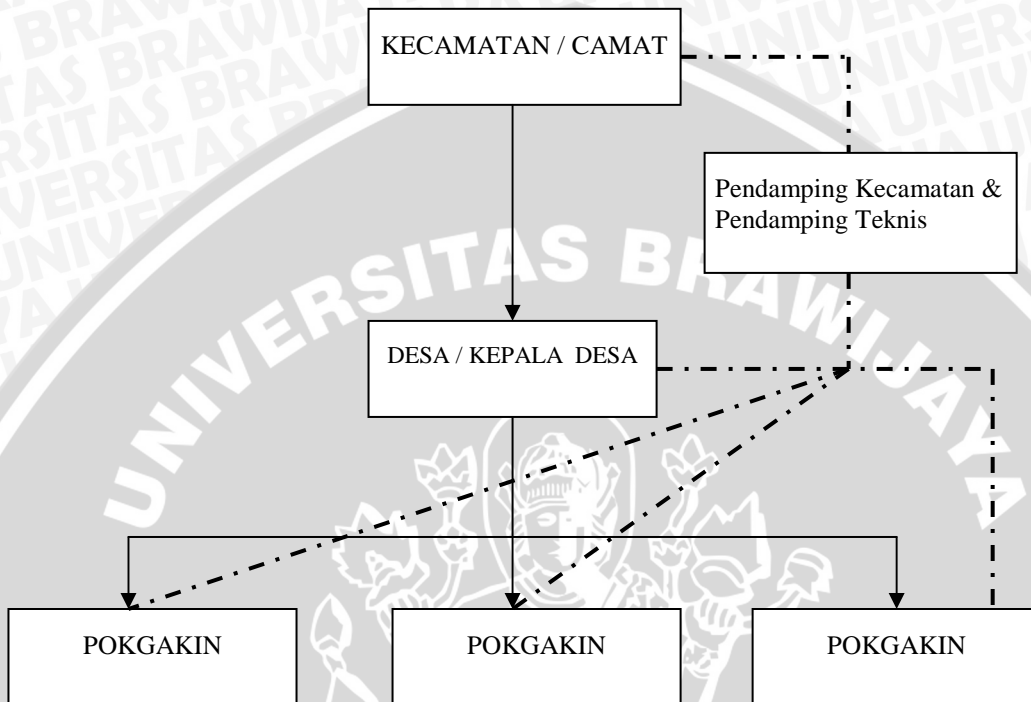
- a) Menyeleksi Pokgakin di wilayahnya yang belum pernah melaksanakan Program PAM-DKB tahun 2006;
- b) Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan dengan seluruh perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat serta Pokgakin dan Pendamping Pokgakin untuk menyusun rencana kegiatan sesuai dengan urutan prioritas kebutuhan masyarakat miskin setempat;
- c) Menetapkan Pokgakin sebagai pelaksana kegiatan Program JPES;
- d) Membahas dan menetapkan lokasi dan kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pokgakin dan menetapkan Ketua dan Bendahara;
- e) Memfasilitasi pengajuan nomor rekening pada masing-masing Pokgakin kepada Bank JATIM setempat;
- f) Mengusulkan kepada Camat urutan prioritas rencana kegiatan, lokasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta nomor rekening Ketua dan Bendahara Pokgakin;
- g) Melegalisasi setiap usulan pencairan dana masing-masing Pokgakin/kegiatan di wilayahnya;
- h) Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program JPES di wilayahnya;
- i) Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Camat.

Pada pelaksanaan Program JPES di Kecamatan Banyuwang, Camat mempunyai kuasa yang penuh terhadap pelaksanaan program ini. Akan tetapi, kuasa itu kemudian diserahkan kepada Kasi Pembangunan dan Kasi Kesra Kecamatan. Hal tersebut sudah diketahui oleh pimpinan di Kabupaten dan Propinsi.

Kasi Pembangunan dan Kasi Kesra berperan sebagai fasilitator antara pihak Pokgakin dengan pihak Tim Koordinasi Kabupaten. Selain itu pihak Kecamatan juga disertai dengan Pendamping Kecamatan yang berasal dari LSM di Kabupaten. Tim pendamping tersebut terdiri dari 1 orang pendamping Kecamatan

dan 1 orang pendamping teknis. Secara sederhana, dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 2.
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM JPES
KECAMATAN BANYUANYAR



Keterangan :

—————> : arah struktur

- - - - - : arah komunikasi / koordinasi

Sumber : analisa peneliti

Dari keterangan bagan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa arah koordinasi pelaksanaan program ini intinya terdapat pada tim pendamping Kecamatan dan pendamping teknis. Kedua tim ini akan memberikan pengarahan tentang segala sesuatu dalam pelaksanaan proyek ini mulai dari tingkat kelompok keluarga miskin hingga Kecamatan. Dengan kata lain bahwa kedua tim ini merupakan penghubung antara kelompok keluarga miskin dengan Desa hingga Kecamatan.

Tim pendamping Kecamatan ini mempunyai tugas penting untuk memberikan arahan tentang pelaksanaan program serta mendampingi kelompok keluarga miskin untuk lebih berpartisipasi dalam program. Sedangkan tim pendamping teknis memiliki tugas untuk mendampingi kelompok keluarga miskin

untuk merencanakan proyek ini dari tahapan awal yang bersifat teknis pelaksanaan.

b. Tahapan Program JPES.

Dalam pelaksanaan Program JPES seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan atau persiapan kemudian menuju ke tahap pelaksanaan hingga akhirnya tahap evaluasi jangka waktu yang diperlukan adalah kurang lebih 1 (satu) tahun. Sedangkan jenis kegiatannya terdiri dari 18 macam kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tingkat Propinsi hingga tingkat Desa/Kelurahan. Tak jarang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Jenis kegiatan dan jangka waktu pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Tim Penyelenggara dilaksanakan pada bulan Januari. Dimulai pada minggu ketiga dan keempat bulan Januari.
2. Koordinasi Tim Penyelenggara dilaksanakan pada bulan Februari. Dimulai pada awal bulan hingga akhir bulan.
3. Penyusunan Pagu Alokasi Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Maret. Dimulai pada awal bulan hingga akhir bulan.
4. Penyusunan Buku Petunjuk Operasional dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan April. Dimulai pada minggu ketiga dan keempat bulan Maret hingga sampai minggu pertama hingga minggu ketiga bulan April.
5. Pembahasan Draft PO dilaksanakan pada bulan April. Dimulai pada minggu ketiga hingga keempat bulan April.
6. Sosialisasi tingkat Propinsi dilaksanakan pada minggu pertama bulan Mei.
7. Sosialisasi tingkat Bakorwil dilaksanakan pada minggu pertama bulan Mei.
8. Sosialisasi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Mei. Dimulai pada minggu kedua hingga minggu ketiga bulan Mei.
9. Sosialisasi tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Mei. Dimulai pada minggu ketiga hingga minggu keempat bulan Mei.

10. Sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Mei hingga bulan Juni. Dimulai pada minggu keempat bulan Mei hingga minggu pertama bulan Juni.
11. Musyawarah Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) dilaksanakan pada bulan Juni. Dimulai pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan Juni.
12. Usulan Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni. Dimulai pada minggu kedua dan ketiga bulan Juni.
13. Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan Oktober. Dimulai pada minggu ketiga dan keempat bulan Juni hingga minggu pertama dan kedua bulan Oktober.
14. Monitoring Kegiatan dilaksanakan ketika tahapan pelaksanaan kegiatan telah selesai dilakukan.
15. Laporan Hasil Kegiatan dilaksanakan pada bulan Nopember hingga bulan Desember.
16. Evaluasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Desember. Dimulai pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan Desember.
17. Evaluasi Tingkat Bakorwil dilaksanakan pada bulan Desember yaitu pada minggu ketiga bulan Desember.
18. Evaluasi Tingkat Propinsi dilaksanakan pada bulan Desember yaitu pada minggu keempat bulan Desember.

Rangkaian kegiatan tersebut di atas merupakan rangkaian kegiatan Program JPES secara keseluruhan di tingkat Propinsi hingga tingkat Desa/Kelurahan. Terdapat perbedaan fakta antara kegiatan yang dilakukan di tingkat Desa/Kelurahan. Menurut jadwal pelaksanaan kegiatan program JPES pada tahun 2007 disebutkan bahwa pelaksanaan program yang dimulai dengan pekerjaan persiapan hingga pelaporan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga bulan Desember. Rincian kegiatan yang dilakukan dan juga jangka waktunya adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan yang dilaksanakan pada bulan Oktober. Dimulai pada minggu pertama bulan Oktober hingga minggu ketiga bulan Oktober.

2. Pekerjaan Perencanaan yang dilaksanakan pada bulan Oktober hingga bulan Nopember. Dimulai pada minggu ketiga bulan Oktober hingga minggu pertama bulan Nopember.
3. Pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan Nopember hingga bulan Desember. Dimulai pada minggu pertama bulan Nopember hingga minggu ketiga bulan Desember.
4. Pelaporan yang dilaksanakan pada bulan Nopember hingga bulan Desember. Dimulai pada minggu ketiga bulan Nopember hingga minggu keempat bulan Desember.

Namun, yang terjadi di Kecamatan Banyuwanyar adalah keterlambatan jadwal pelaksanaan. Sosialisasi program diadakan pada akhir bulan September 2007. Dan hal itu mengakibatkan adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan lainnya. Hal itu dinyatakan juga oleh bapak Hisbullah Huda selaku pendamping Kecamatan, sebagaimana dinyatakan berikut :

“keterlambatan proses sosialisasi ini nantinya akan berdampak sangat panjang terhadap proses yang lain. Kami sebenarnya hanya memiliki waktu yang sangat pendek untuk melaksanakan program ini semua. Kami juga akan berupaya secara maksimal agar setiap masyarakat penerima bantuan ini akan semakin paham dan dapat melaksanakan program sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Propinsi”.
(Wawancara dilakukan di Kantor Kecamatan Banyuwanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 11.30 WIB).

Dalam rangkaian kegiatan program dan proyek, akan diawali dengan kegiatan persiapan atau perencanaan. Hal ini pun sama dengan kegiatan Program JPES. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan persiapan atau perencanaan yang sesuai dengan buku Petunjuk Operasional Program JPES meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- A. Koordinasi Tingkat Propinsi. Dalam kegiatan ini, terdapat 3 (tiga) materi utama pembahasan program, yaitu:
 1. Pembahasan dan penyusunan Petunjuk Operasional Program JPES;
 2. Sinkronisasi Program JPES dengan program-program pemberdayaan lainnya;
 3. Penetapan alokasi dana Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan dari data BPS.

Apabila ke 3 (tiga) kegiatan tersebut telah dilaksanakan maka akan dilanjutkan dengan sosialisasi Program JPES.

B. Sosialisasi Program JPES yang dilaksanakan pada 5 (lima) tahapan, yaitu:

4. Tingkat Propinsi

1) Pengarah :

- a) Gubernur Jawa Timur
- b) Wakil Gubernur Jawa Timur
- c) Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur

2) Penyelenggara :

Tim Penyelenggara Program JPES

3) Narasumber :

- a) Kepala Bappeprop Jawa Timur;
- b) Kepala Bawasprop Jawa Timur;
- c) Tim Penyelenggara Program JPES;
- d) Direktur Bank JATIM.

4) Materi :

- a) Penjelasan umum pengelolaan JPES;
- b) Informasi alokasi dana per Kabupaten/Kota dan penentuan lokasi kegiatan di kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c) Penjelasan Petunjuk Operasional;
- d) Penjelasan Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;

- e) Konsep pemberdayaan, keswadayaan, ekonomi dan sosial;
- f) Penjelasan tentang Pokgakin;
- g) Penjelasan tentang mekanisme pengawasan;
- h) Penjelasan penyaluran dana melalui jasa perbankan (Bank JATIM)

5) Peserta :

- a) Bupati/Walikota se Jawa Timur;
- b) Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur;
- c) Dinas/Instansi terkait Propinsi;
- d) Bakorwil Propinsi Jawa Timur;
- e) Sekretaris Daerah, Bappeda, Bapemas Kabupaten/Kota se Jawa Timur

5. Tingkat Bakorwil:

1) Penyelenggara :

Bakorwil Propinsi Jawa Timur

2) Narasumber :

- a) Bakorwil Propinsi Jawa Timur;
- b) Tim Penyelenggara Program JPES
- c) Bank JATIM.

3) Materi :

- a) Sosialisasi tentang Penjelasan Petunjuk Operasional;
- b) Penjelasan Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;

- c) Penjelasan Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan, serta tugas dan fungsinya.

4) Peserta :
 Dinas/instansi terkait wilayah
 Bakorwil yang terdiri dari Asisten,
 Bappeda, Bapemas
 Kabupaten/Kota, Camat lokasi
 Program JPES se wilayah
 Bakorwil.

6. Tingkat Kabupaten/Kota:

- 1) Penyelenggara :
 Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- 2) Narasumber :
 - a) Bakorwil Propinsi Jawa Timur;
 - b) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
 - c) Bank Jatim.
- 3) Materi :
 - a) Penjelasan Pengelolaan Petunjuk Pelaksanaan JPES;
 - b) Administrasi Pengelolaan Program;
 - c) Penjelasan penunjukan/pembentukan lembaga pengelola progam;
 - d) Penjelasan pembentukan Pokgakin.
 - e) Penjelasan pengajuan dan penyaluran dana melalui jasa perbankan.

4) Peserta :

- a) Camat terkait;
- b) Kepala Desa/Lurah lokasi Program JPES;
- c) Pendamping Pokgakin.

7. Tingkat Kecamatan:

1) Penyelenggara :

Camat, bekerjasama dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota

2) Narasumber :

a) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;

b) Camat;

c) Pendamping Pokgakin;

d) Bank JATIM

3) Materi :

a) Penjelasan Pengelolaan JPES;

b) Penjelasan Petunjuk Operasional;

c) Administrasi Pengelolaan Program;

d) Penjelasan pembentukan Pokgakin. Poin 1 s/d 3 Penekanan materi pada kegiatan tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.

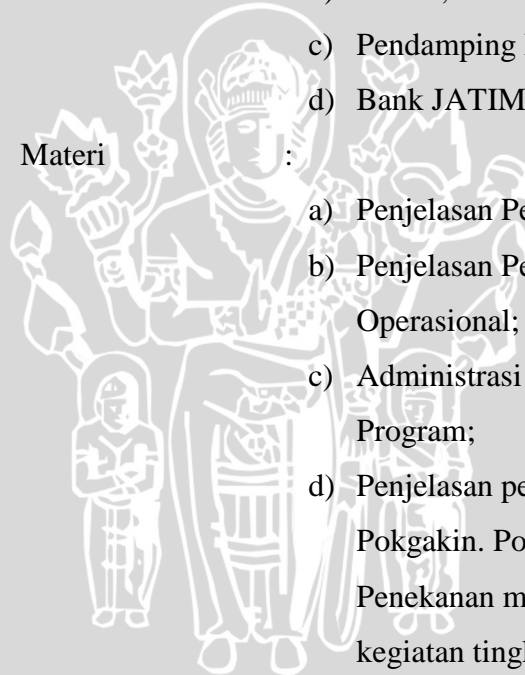
e) Penjelasan pegajuan dan penyaluran dana melalui jasa perbankan.

4) Peserta :

a) Sekretaris Desa/Kelurahan;

b) LPMD/K atau Lembaga lain;

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



- c) Para Tokoh masyarakat;
- d) Kepala Dusun. Poin 1 s/d 4 yang mendapat alokasi Program JPES

8. Tingkat Desa/Kelurahan:

1) Penyelenggara :
Desa/Kelurahan bekerjasama dengan Pendamping Pokgakin.

2) Narasumber :
a) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;

- b) Camat;
- c) Pendamping Pokgakin;
- d) Bank JATIM

3) Peserta :
a) Pengurus LPMD/K atau lembaga lain;

- b) Para Tokoh Masyarakat;
- c) Kelompok Keluarga Miskin (Pogkakin);

4) Materi :
a) Penjelasan Pengelolaan Program JPES;

b) Penjelasan Petunjuk Operasional;

c) Administrasi Pengelolaan Program. Poin 1 s/d 2 penekanan materi pada kegiatan tingkat Desa/Kelurahan.

Dalam proses sosialisasi ini merupakan tahapan yang panjang dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi program

JPES di Kecamatan Banyuanyar diselenggarakan secara intensif. Selain para peserta sosialisasi yang tersebut di atas, pihak Kecamatan juga menyertakan beberapa unsur antara lain unsur BPD, unsur PKK dan ketua RT/RW. Alasan mengapa pihak Kecamatan menyertakan kedua unsur ini adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman antar warga. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Kasi Pembangunan Kecamatan Banyuanyar, bahwa:

“Kami sengaja melibatkan beberapa unsur di dalam masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa di desanya sedang dilaksanakan program Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Ketika program tersebut selesai dilaksanakan, kami juga berharap agar masyarakat mampu menjaga hasil yang telah dicapai oleh program tersebut. Selain itu, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.” (Wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 09.30 WIB.)

Selain itu, pernyataan tentang keterlibatan beberapa unsur masyarakat juga diungkapkan oleh Kasi Kesra Kecamatan Banyuanyar, bahwa:

“Keterlibatan beberapa unsur masyarakat dalam proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir pertama memang bertujuan agar semua penduduk mengetahui tentang adanya program yang dilaksanakan di desanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah agar masyarakat mampu membina suatu hubungan yang baik dalam pelaksanaan program ini. Yang saya maksud adalah gotong royong.” (Wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 11.10 WIB.)

Dari kedua pernyataan tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa dengan keterlibatan banyak pihak dalam tahapan sosialisasi maka diharapkan penduduk mengetahui adanya program yang sedang dilaksanakan di desanya. Selain itu, pentingnya kebersamaan adalah suatu upaya untuk lebih mempererat komunikasi dan persaudaraan antar warga.

Proses sosialisasi ini dilaksanakan di desa-desa penerima bantuan program, yaitu:

1. Desa Banyuanyar Tengah, sosialisasi dilakukan pada tanggal 27 September 2007.
2. Desa Blado Wetan, sosialisasi dilakukan pada tanggal 24 September 2007.

3. Desa Gunung Geni, sosialisasi dilakukan pada tanggal 24 September 2007.
4. Desa Sentulan, sosialisasi dilakukan pada tanggal 29 September 2007.
5. Desa Klenang Lor, sosialisasi dilakukan pada tanggal 29 September 2007.
6. Desa Pendil, sosialisasi dilakukan pada tanggal 29 September 2007.

C. Perencanaan

Dalam tahapan pelaksanaan program JPES ini, perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan setelah proses kegiatan sosialisasi telah selesai dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan dan rencana alokasi anggaran secara partisipatif. Tahapan kegiatan perencanaan dalam buku Petunjuk Operasional Program JPES meliputi:

1. Musyawarah Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin).

Musyawarah Pokgakin merupakan musyawarah yang diikuti oleh seluruh anggota Pokgakin untuk memilih Ketua Pokgakin yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah dan Pendamping Pokgakin. Musyawarah Pokgakin ini dihadiri oleh para anggotanya dengan agenda sebagai berikut:

- a) Menentukan Ketua dan Bendahara serta nama Pokgakin sebagai penanggungjawab kegiatan dan keuangan;
- b) Menentukan jenis dan rencana kegiatan, termasuk alokasi anggaran;
- c) Kegiatan (a) dan (b) difasilitasi oleh LPMD/K atau Lembaga sejenis yang ditetapkan, Kepala Desa/Lurah dan Pendamping Pokgakin.

Berita acara musyawarah dicatat di dalam formulir dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Pokgakin yang terbentuk membuat kesepakatan untuk menentukan jenis kegiatan/padat karya dan dicatat berdasarkan urutan prioritas. Rencana kegiatan yang disepakati diajukan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah desa/kelurahan sesuai dengan prioritas kebutuhan utama prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Usulan Pokgakin yang disepakati disusun berdasarkan usulan prioritas dan direkap menjadi usulan desa/kelurahan di dalam formulir dan disampaikan kepada Camat. Untuk efektivitas Program JPES dalam pemberdayaan miskin, usulan kegiatan masing-masing desa/kelurahan agar berkisar antara Rp. 75 juta sampai dengan Rp. 125 juta.

2. Pengesahan Usulan Kegiatan Tingkat Kecamatan.

Setelah musyawarah Pokgakin dan penentuan rencana kegiatan dan anggaran selesai, maka Camat dan Pendamping Pokgakin melakukan penelitian usulan kegiatan Pokgakin terhadap kelengkapan dokumen, antara lain:

- a) Kuitansi asli (bukan fotokopi) rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar bermaterai, yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Pokgakin;
- b) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) rangkap 3 (tiga) atas nama Ketua dan Bendahara Pokgakin;
- c) Fotokopi rekening (tabungan) Bank JATIM rangkap 3 (tiga) atas nama Ketua dan Bendahara Pokgakin;
- d) Proposal usulan kegiatan rangkap 2 (dua) asli dan fotokopi yang berisikan:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur cq. Biro Keuangan yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin, mengetahui Kepala Desa/Lurah;
 - 2) Susunan keanggotaan Pokgakin yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin mengetahui Kepala Desa/Lurah;
 - 3) Dokumentasi (foto lokasi kegiatan JPES);
 - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin dan Kepala Desa/Lurah;
 - 5) Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

Hasil penelitian tersebut akan direkap dan menjadi usulan Camat dan dikirim ke Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan formulir dengan dilengkapi dokumen yang sudah diteliti.

Adapun rencana anggaran biaya dari masing-masing desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Rancangan Anggaran Biaya
Program JPES 2007

Jenis kegiatan : pembangunan jalan paving
Volume : Dsn. Pande I 2 x 225m
 Dsn. Pande II 2 x 225m
Desa : Banyuanyar Tengah
Kecamatan : Banyuanyar

no	Jenis	volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga	Total harga
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	<u>Bahan :</u>				
	1. pasir pasang	27 m3	54.750,00	1.451.970,00	44.000.509,80
	2. semen PC	111 sak	37.000,00	4.094.272,00	
	3. bata merah	21.840 bh	290,00	6.333.600,00	
	4. paving t=6	867m2	28.000,00	24.276.000,00	
	5. pasir karuk	207,24 m3	36.800,00	7.626.472,80	
B.	<u>Peralatan:</u>				
	1. cangkul	80 bh	50.000,00	4.000.000,00	
	2. skrop	80 bh	30.000,00	2.400.000,00	
	3. timba	65 bh	7.500,00	487.500,00	
	4. benang	6 rol	10.000,00	60.000,00	
	5. selang waterpass	30 m	3.000,00	90.000,00	
	6. meteran	20 bh	25.000,00	500.000,00	
	7. gergaji	15 bh	40.000,00	600.000,00	
	8. cetok	60 bh	20.000,00	1.200.000,00	
	9. kasutan	60 bh	10.000,00	600.000,00	
	10.kuas	27 bh	7.500,00	202.500,00	
11.palu	10 bh	30.000,00	300.000,00		
C	<u>Upah kerja:</u>				20.559.500,00
	1. pekerja	520 HOK	22.000,00	11.434.500,00	
	2. tukang	240 HOK	30.000,00	7.200.000,00	
	3. mandor	55 HOK	35.000,00	1.925.000,00	
	Jumlah				75.000.000,80

Tabel 5.

**Rancangan Anggaran Biaya
Program JPES 2007**

Jenis kegiatan : pembangunan jalan rabat

Volume : 2 x 625 x 0,1 m

Desa : Pendil

Kecamatan : Banyuwangor

no	Jenis	volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga	Total harga
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bahan :				
	1. pasir pasang	80 m3	54.750,00	4.359.469,00	
	2. semen PC	719 sak	37.000,00	26.593.750,00	
	3. batu pecah 2/3	93 m3	96.000,00	8.880.000,00	
	4. tanah urug	81 m3	48.000,00	3.900.000,00	
A.	5. papan kayu meranti 2/20	0,64 m3 0,05 m3	2.875.000,00 2.415.000,00	1.831.149,00 115.920,00	
	6. kayu meranti 2/3	8 kg	7.500,00	60.000,00	
	7. paku				45.740.287,50
	Peralatan:				
	1. cangkul	30 bh	50.000,00	1.500.000,00	
	2. skrop	30 bh	30.000,00	900.000,00	
	3. timba	50 bh	7.500,00	375.000,00	
	4. benang	8 rol	10.000,00	80.000,00	
	5. selang waterpass	10 m	3.000,00	30.000,00	
B.	6. meteran	4 bh	25.000,00	100.000,00	
	7. gergaji	5 bh	30.000,00	150.000,00	
	8. cetok	15 bh	20.000,00	300.000,00	
	9. kasutan	15 bh	10.000,00	150.000,00	
	10. kuas	10 bh	7.500,00	75.000,00	
	11. sewa molen	36 hari	200.000,00	7.200.000,00	
					10.860.000,00
	Upah kerja:				
	1. pekerja	500 HOK	22.000,00	11.000.000,00	
C	2. tukang	200 HOK	30.000,00	6.000.000,00	
	3. mandor	40 HOK	35.000,00	1.400.000,00	
					18.400.000,00
	Jumlah				75.000.287,50

Tabel 6.
Rancangan Anggaran Biaya
Program JPES 2007

Jenis kegiatan : pembangunan jalan paving
Dsn. Batu I, Dsn. Batu II, Dsn. Tugu I, Dsn. Tugu II, Dsn. Sukun
Volume : 2 x 510 m
Desa : Blado Wetan
Kecamatan : Banyuwangor

no	Jenis	volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga	Total harga
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Bahan :				
	1. pasir pasang	27 m ³	54.750,00	1.451.970,00	44.000.805,28
	2. semen PC	111 sak	37.000,00	4.094.272,00	
	3. batu merah	21.840 bh	290,00	6.333.600,00	
	4. paving t=6	867 m ²	28.000,00	24.276.000,00	
5. pasir karuk	207,25 m ³	36.800,00	7.626.767,50		
B.	Peralatan:				10.440.000,00
	1. cangkul	80 bh	50.000,00	4.000.000,00	
	2. skrop	80 bh	30.000,00	2.400.000,00	
	3. timba	65 bh	7.500,00	487.500,00	
	4. benang	6 rol	10.000,00	60.000,00	
	5. selang waterpass	30 m	3.000,00	90.000,00	
	6. meteran	20 bh	25.000,00	500.000,00	
	7. gergaji	15 bh	40.000,00	600.000,00	
	8. cetok	60 bh	20.000,00	1.200.000,00	
	9. kasutan	60 bh	10.000,00	600.000,00	
	10.kuas	27 bh	7.500,00	202.500,00	
11.palu	10 bh	30.000,00	300.000,00		
C	Upah kerja:				20.559.500,00
	1. pekerja	520 HOK	22.000,00	11.434.500,00	
	2. tukang	240 HOK	30.000,00	7.200.000,00	
	3. mandor	55 HOK	35.000,00	1.925.000,00	
	Jumlah				75.000.305,28

Tabel 7.
Rancangan Anggaran Biaya
Program JPES 2007

Jenis kegiatan : pembangunan jalan rabat

Volume : 2 x 600 x 0,1 m

Desa : Gunung Geni

Kecamatan : Banyuanyar

no	Jenis	volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga	Total harga
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bahan :				
	1. pasir pasang	76 m3	54.750,00	4.185.090,00	
	2. semen PC	690 sak	37.000,00	25.530.000,00	
	3. batu pecah 2/3	89 m3	96.000,00	8.524.000,00	
	4. tanah urug	78 m3	48.000,00	3.744.000,00	
A.	5. papan kayu meranti	0,65 m3	2.875.000,00	1.880.196,00	
	2/20	0,05 m3	2.415.000,00	115.920,00	
	6. kayu meranti 2/3	8 kg	7.500,00	60.000,00	
	7. paku				44.040.006,25
	Peralatan:				
	1. cangkul	30 bh	50.000,00	1.500.000,00	
	2. skrop	30 bh	30.000,00	900.000,00	
	3. timba	50 bh	7.500,00	375.000,00	
	4. benang	8 rol	10.000,00	80.000,00	
	5. selang waterpass	10 m	3.000,00	30.000,00	
B.	6. meteran	4 bh	25.000,00	100.000,00	
	7. gergaji	5 bh	30.000,00	150.000,00	
	8. cetok	15 bh	20.000,00	300.000,00	
	9. kasutan	15 bh	10.000,00	150.000,00	
	10.kuas	10 bh	7.500,00	75.000,00	
	11.sewa molen	40 hari	200.000,00	8.000.000,00	
					11.660.000,00
	Upah kerja:				
	1. pekerja	525 HOK	22.000,00	11.550.000,00	
C	2. tukang	200 HOK	30.000,00	6.000.000,00	
	3. mandor	50 HOK	35.000,00	1.750.000,00	
					19.300.000,00
	Jumlah				75.000.006,25

Tabel 8.
Rancangan Anggaran Biaya
Program JPES 2007

Jenis kegiatan : pembangunan jalan makadam di Dsn. Pelle
Volume : 440m x 2m
Desa : Sentulan
Kecamatan : Banyuwangor

no	Jenis	volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga	Total harga
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Bahan :				
	1. batu kali / belah	319,20 m3	77.000,00	24.578.400,00	45.124.200,00
	2. pasir urug	52,80 m3	49.500,00	2.613.600,00	
	3. sirtu	52,80 m3	57.750,00	3.049.200,00	
	4. pasir pasang	23,40 m3	60.500,00	1.415.700,00	
	5. semen	371 sak	36.300,00	13.467.300,00	
B.	Peralatan:				
	1. benang / tali	3 bh	2.200,00	6.600,00	
	2. cangkul	3 bh	35.750,00	107.250,00	
	3. timba	10 bh	8.250,00	82.500,00	
	4. cetok	3 bh	13.750,00	41.250,00	
	5. ganco	2 roll	41.250,00	82.500,00	
	6. keranjang bambu	10 bh	6.600,00	66.000,00	
	7. palu besi 5 kg	3 bh	33.000,00	99.000,00	
	8. palu besi 1,5 kg	2 bh	16.500,00	33.000,00	
	9. meteran 50 m	1 bh	55.000,00	55.000,00	
	10. meteran 5 m	1 bh	7.700,00	7.700,00	
	11. wales	3 hari	350.000,00	1.050.000,00	
12. mob + demob		2.000.000,00	2.000.000,00		
C	Upah kerja:				26.245.000,00
	1. pekerja	619 HOK	25.000,00	15.475.000,00	
	2. upah pecah batu	295 HOK	25.000,00	7.375.000,00	
	3. tukang	78 HOK	35.000,00	2.730.000,00	
	4. mandor	19 HOK	35.000,00	665.000,00	
Jumlah					75.000.000,00

Tabel 9.
Rancangan Anggaran Biaya
Program JPES 2007

Jenis kegiatan : pembangunan jalan rabat
Volume : 2 x 625 x 0,1 m
Desa : Klenang Lor
Kecamatan : Banyuanyar

no	Jenis	volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga	Total harga
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	<u>Bahan :</u>				
	1. pasir pasang	80 m3	54.750,00	4.359.469,00	
	2. semen PC	719 sak	37.000,00	26.593.750,00	
	3. batu pecah 2/3	93 m3	96.000,00	8.880.000,00	
	4. tanah urug	81 m3	48.000,00	3.900.000,00	
	5. papan kayu meranti 2/20	0,64 m3 0,05 m3	2.875.000,00 2.415.000,00	1.831.149,00 115.920,00	
	6. kayu meranti 2/3	8 kg	7.500,00	60.000,00	
	7. paku				45.740.287,50
B.	<u>Peralatan:</u>				
	1. cangkul	30 bh	50.000,00	1.500.000,00	
	2. skrop	30 bh	30.000,00	900.000,00	
	3. timba	50 bh	7.500,00	375.000,00	
	4. benang	8 rol	10.000,00	80.000,00	
	5. selang waterpass	10 m	3.000,00	30.000,00	
	6. meteran	4 bh	25.000,00	100.000,00	
	7. gergaji	5 bh	30.000,00	150.000,00	
	8. cetok	15 bh	20.000,00	300.000,00	
	9. kasutan	15 bh	10.000,00	150.000,00	
	10.kuas	10 bh	7.500,00	75.000,00	
11.sewa molen	36 hari	200.000,00	7.200.000,00		
				10.860.000,00	
C	<u>Upah kerja:</u>				
	4. pekerja	500 HOK	22.000,00	11.000.000,00	
	5. tukang	200 HOK	30.000,00	6.000.000,00	
	6. mandor	40 HOK	35.000,00	1.400.000,00	
				18.400.000,00	
	Jumlah				75.000.287,50

3 Pengesahan Usulan Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota.

Usulan Camat yang telah dikirim kepada Bupati/Walikota akan diteliti dan diproses lagi di tingkat Kabupaten/Kota. Nantinya, hasil tersebut akan dijadikan suatu pengesahan usulan tingkat Kabupaten/Kota. Sebelum usulan tersebut di sahkan, maka usulan tersebut akan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Pengesahan kegiatan dilakukan melalui penelitian dokumen usulan Camat terhadap kegiatan Pokgakin dari masing-masing Desa/Kelurahan oleh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- b) Pengesahan terhadap dokumen usulan kegiatan Pokgakin dari Desa/Kelurahan masing-masing Kecamatan akan direkap dalam formulir dan akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Tim Penyelenggara JPES Propinsi dan dilengkapi dengan:
 - 1) Daftar rekapitulasi nomor rekening Bank JATIM atas nama Ketua dan Bendahara seluruh Pokgakin Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Bank Jatim;
 - 2) Kuitansi asli (bukan fotokopi) rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar bermaterai, yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Pokgakin, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sudah Terima dari: Gubernur Jawa Timur
 - ii. Jumlah uang: sebesar 50 % dari pagu alokasi dana kegiatan masing-masing Pokgakin;
 - iii. Buat Pembayaran: Bantuan Sosial Untuk JPES Tahap I dalam rangka..... (*sesuai dengan kegiatan Pokgakin*)
 - 3) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) rangkap 3 (tiga) atas nama Ketua dan Bendahara Pokgakin;
 - 4) Fotokopi rekening (tabungan) Bank Jatim rangkap 3(tiga) atas nama Ketua dan Bendahara Pokgakin.
 - 5) Proposal usulan kegiatan rangkap 2 (dua) asli dan fotokopi yang berisikan sebagai berikut:
 - i. Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin menegtaahui Kepala Desa/Lurah;
 - ii. Susunan keanggotaan Pokgakin yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin mengatahui Kepala Desa/Lurah;

- iii. Dokumentasi (foto lokasi kegiatan Program JPES);
- iv. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin, Kepala Desa/Lurah dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- v. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

3) Pengesahan Usulan Kegiatan Tingkat Propinsi.

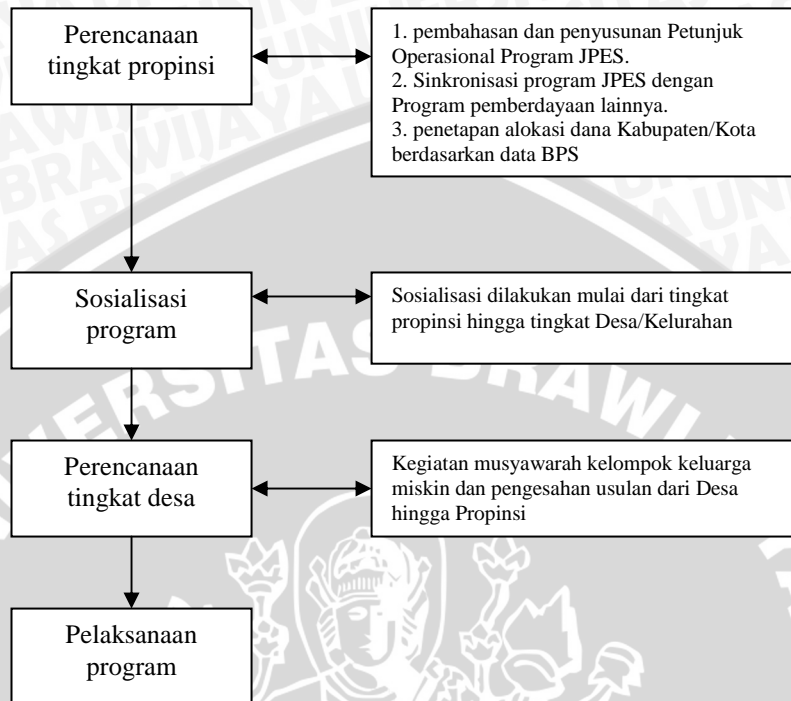
Setelah pengesahan usulan di tingkat Kabupaten/Kota telah dilaksanakan maka Gubernur Jawa Timur atas usulan kegiatan Program JPES dari Bupati/Walikota menetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Kegiatan program JPES per Kabupaten/Kota.

Secara sederhana peneliti memberikan gambaran tentang tahapan program JPES sebagai berikut :



Bagan 3.

Alur tahapan Program JPES



Keterangan :

→ : alur tahapan

↔ : ruang lingkup kegiatan

Sumber: analisa peneliti

Dalam penetapan kelompok keluarga miskin yang akan menerima bantuan program ini, pedoman yang digunakan adalah data penerimaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan keluarga miskin tersebut haruslah bertempat tinggal di daerah atau kawasan yang akan di jadikan lokasi pelaksanaan proyek tersebut. Dengan demikian, daftar nama penerima bantuan program JPES adalah sebagai berikut :

Tabel 10.
 DAFTAR ANGGOTA POKMAS BLADO WETAN
 DESA BLADO WETAN KECAMATAN BANYUANYAR
 KABUPATEN PROBOLINGGO

No.	Nama	L/P	No.	Nama	L/P
1.	Faisal	L	14.	Zainal	L
2.	Abd. Rahman	L	15.	Galuh	L
3.	M. Ali	L	16.	Muhaimin	L
4.	Ali Wafa	L	17.	Sultan	L
5.	Busakri	L	18.	Muhtar	L
6.	Zainuddin	L	19.	Haryono	L
7.	As'ari	L	20.	Fadhi	L
8.	Abd. Hari	L	21.	M. Buhar	L
9.	Kholil	L	22.	Sumi	L
10.	Busari	L	23.	Samsul	L
11.	Rofi'un	L	24.	Kholik	L
12.	Khusaini	L	25.	M. Nasu	L
13.	Maksim	L	26.	Sudarmanto	L

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 11.
 DAFTAR ANGGOTA POKMAS GUNUNG GENI
 DESA GUNUNG GENI KECAMATAN BANYUANYAR
 KABUPATEN PROBOLINGGO

No.	Nama	L/P	No.	Nama	L/P
1.	Buhori	L	18.	P. Hos	L
2.	Abu Harun	L	19.	Surles	L
3.	Abd. Azis	L	20.	Tolianto	L
4.	Hasan	L	21.	Saturi	L
5.	Nurhalil	L	22.	Amin Sulihan	L
6.	Sulaiman	L	23.	Rusdi	L
7.	Misrup	L	24.	Niton	L
8.	Emin	L	25.	Dul duran	L
9.	Hamid Mida	L	26.	Halil	L
10.	Mufida	L	27.	Muhammad	L
11.	Mu'is	L	28.	Syuro	L
12.	Hamid	L	29.	Asim	L
13.	Musa'ir	L	30.	Rohim	L
14.	Sari	L	31.	Sarip	L
15.	Nur Asin	L	32.	Suri	L
16.	Prawi	L	33.	Sunarto	L
17.	Slamet	L	34.	Marsudi	L

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 12.
 DAFTAR ANGGOTA POKMAS SENTULAN
 DESA SENTULAN KECAMATAN BANYUANYAR
 KABUPATEN PROBOLINGGO

No.	Nama	L/P	No.	Nama	L/P
1.	Sugianto	L	14.	Muhdi	L
2.	Babul Khoir	L	15.	Sajari	L
3.	Pipin Ulandari	P	16.	Supri	L
4.	Mardiono	L	17.	Sumiati	P
5.	Anan Susilo	L	18.	Rijo	L
6.	Nursani	P	19.	Basori	L
7.	Marput	L	20.	Sukirno	L
8.	Marfuk	L	21.	Sugianto	L
9.	Aswati	P	22.	Ardianto	L
10.	Suhaena	P	23.	Jumat	L
11.	Sunar	L	24.	Sulami	P
12.	Sutarji Muri	L	25.	Fatur S.	L
13.	Sami D.	L	26.	Uswatun	P
			27.	Sumaise	P

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 13.
 DAFTAR ANGGOTA POKMAS KLENANG LOR
 DESA KLENANG LOR KECAMATAN BANYUANYAR
 KABUPATEN PROBOLINGGO

No.	Nama	L/P	No.	Nama	L/P
1.	Nasdur	L	14.	M. Toha	L
2.	Haeri	L	15.	Ali Tasik	L
3.	Sudiono	L	16.	Satam	L
4.	Ahmad fausi	L	17.	Sarino	L
5.	Sapuji	L	18.	Jumal	L
6.	Suardi Sugi	L	19.	Sahur	L
7.	Holil	L	20.	Supar	L
8.	Sami'an	L	21.		
9.	Ahmad	L	22.		
10.	Ali Musta'in	L	23.		
11.	Suparman	L	24.		
12.	Maksun Ismail	L	25.		
13.	Kerto Tumin	L	26.		

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 14.
 DAFTAR ANGGOTA POKMAS PENDIL
 DESA PENDIL KECAMATAN BANYUANYAR
 KABUPATEN PROBOLINGGO

No.	Nama	L/P	No.	Nama	L/P
1.	Maskuri	L	14.	Ansori	L
2.	Kusnadi	L	15.	Atim	L
3.	Suraji	L	16.	Kari	L
4.	Holili	L	17.	Karsito	L
5.	Amar Hasan	L	18.	Abd. Hamid	L
6.	Hasan	L	19.	P. Ti Na'at	L
7.	Sanip	L	20.	Kusnadi	L
8.	Ahmat	L	21.	Ahmad	L
9.	Hasan	L	22.	Sahari	L
10.	Surin	L	23.	Nahari	L
11.	Miarto	L	24.	Fauzen	L
12.	Jumadi	L	25.	Ali Wafa	L
13.	Salim	L	26.	Murhan	L
			27.	Rasid	L

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 15.
 DAFTAR ANGGOTA POKMAS BANYUANYAR TENGAH
 DESA BANYUANYAR TENGAH KECAMATAN BANYUANYAR
 KABUPATEN PROBOLINGGO

No.	Nama	L/P	No.	Nama	L/P
1.	Sahar	L	14.	Madra'i	L
2.	Zainuddin	L	15.	Mulyawan	L
3.	Mus	L	16.	Rohim	L
4.	Bahrul Ulum	L	17.	Hamid	L
5.	Taufik	L	18.	Holik	L
6.	Sahran	L	19.	Nasir	L
7.	Sakri	L	20.	Rozak	L
8.	Heril	L	21.	Marisin	L
9.	Jalil	L	22.	Fathur	L
10.	Man Dulla	L	23.	Musta'in	L
11.	Ahmad	L	24.		
12.	Ardi	L	25.		
13.	Tahir	L	26.		

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Setiap kelompok keluarga miskin tersebut memiliki susunan struktural yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Adapun susunan struktural kelompok keluarga miskin dari masing-masing desa adalah sebagai berikut:

1. Desa Banyuanyar Tengah. Ketua: Ahmad Nesor, Sekretaris: M. Amin, Bendahara: Abd. Latif dan anggota adalah kelompok keluarga miskin
2. Desa Blado Wetan. Ketua: Rasidi, Sekretaris: M. Amin, Bendahara: Buhori dan anggota adalah kelompok keluarga miskin.
3. Desa Gunung Geni. Ketua: Nur Husen, Sekretaris: Ach. Nesor, Bendahara: Marem Sri Kinasih dan anggota adalah kelompok keluarga miskin.
4. Desa Sentulan. Ketua: Sumarto, Sekretaris: Babul Hoir, Bendahara: Fathur dan anggota adalah kelompok keluarga miskin.
5. Desa Klenang Lor. Ketua: Purwono, Sekretaris: Sapuji, Bendahara: Ach. Gozali dan anggota adalah kelompok keluarga miskin.
6. Desa Pendil. Ketua: Ach. Yasid, Sekretaris: Cung Wahyudi, Bendahara: Imuddin dan anggota adalah kelompok keluarga miskin.

Ada beberapa permasalahan yang di alami setelah pemilihan struktural kelompok keluarga miskin, salah satunya adalah kurangnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh ketua dan staf kelompok keluarga miskin tersebut. Ada beberapa pihak yang sebenarnya tidak sanggup menerima jabatan tersebut. Hal itu dibenarkan oleh ketua kelompok keluarga miskin dari desa Sentulan, Bpk. Sumarto melalui pernyataannya:

“Sebenarnya saya keberatan kalau ditunjuk menjadi ketua(Pokgakin). Saya saja ndak lulus SMP. Kok bisa dijadikan ketua. Kan masih ada teman-teman yang lain yang lebih pintar dari saya. Saya takut kalau nanti saya melakukan kesalahan yang besar dan nanti (program) tidak berjalan lancar. Bagaimana nanti saya harus tanggung jawab?” Wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 13.00 WIB

Untuk mengatasi hal tersebut, tim pendamping telah siap membantu persoalan yang nantiya akan di hadapi. Pendamping Kecamatan menegaskan hal yang sama:

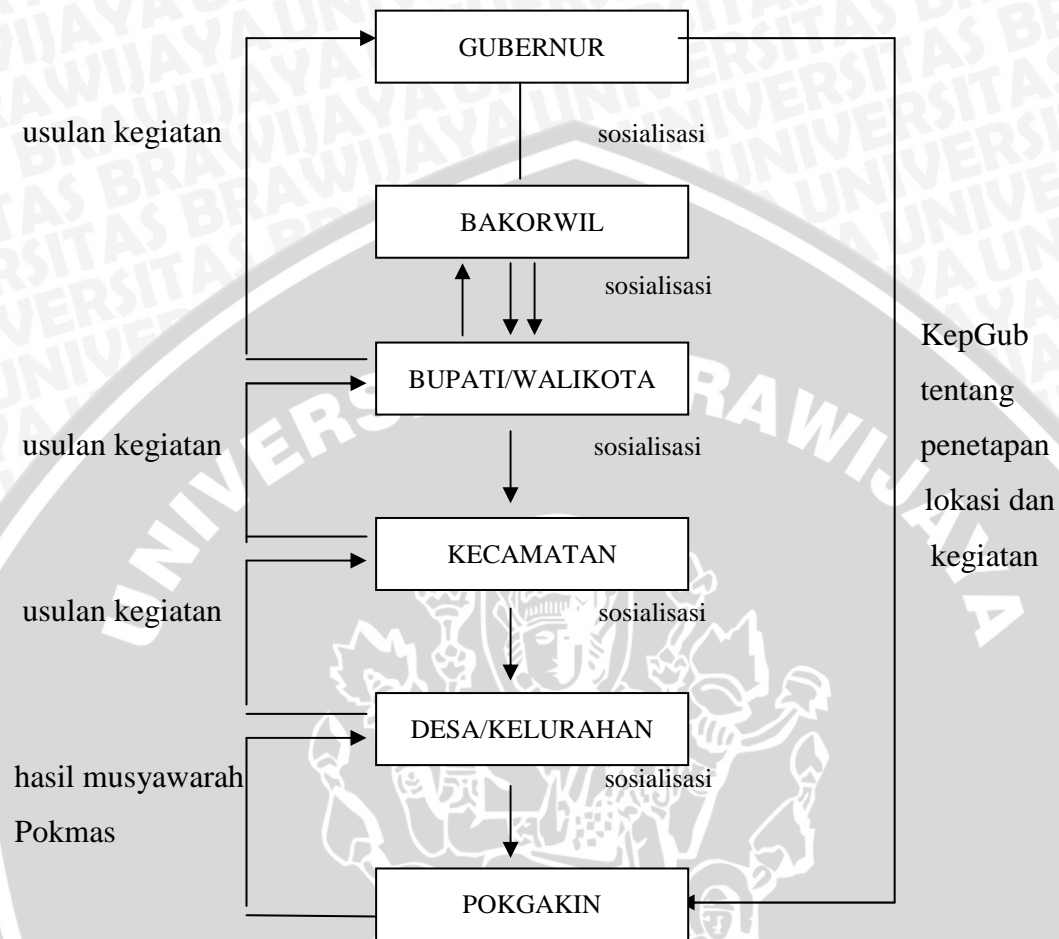
“Untuk persoalan tentang sumber daya manusia yang nantinya akan kami hadapi, terutama masalah teknis, kami siap membantu penduduk secara maksimal. Kami pun bersedia datang apabila penduduk membutuhkan kami mendadak. Yang penting disini, kami sebagai fasilitator akan berupaya untuk sebaik mungkin membantu mereka.” Wawancara dilakukan di Kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 11.40 WIB.

Setelah dilakukan proses perencanaan dan musyawarah Pokgakin di masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyuanyar maka disepakati yang menjadi bidang atau ruang lingkup pelaksanaan program JPES 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Desa Pendil dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan rabat.
- b. Desa Blado Wetan dengan jenis kegiatan program adalah pembanguna jalan paving.
- c. Desa Gunung Geni dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan rabat.
- d. Desa Banyuanyar Tengah dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan paving. Ada 2 lokasi dalam pembangunan jalan paving di desa Banyuanyar Tengah yaitu dusun Pande I dan dusun Pande II.
- e. Desa Klenang Lor dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan rabat.
- f. Desa Sentulan dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan makadam di dusun Pelle.

Secara singkat alir atau proses perencanaan ini dapat dilihat melalui bagan alur perencanaan seperti berikut ini :

Bagan 4.
Bagan Alir Perencanaan



Sumber: buku Petunjuk Operasional Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur tahun 2008.

c. Mekanisme Program JPES.

Dalam pelaksanaan Program JPES ini, ada 2 poin penting yang dijadikan dasar agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan Program JPES harus sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Kegiatan Program JPES per Kabupaten/Kota dan apabila harus terjadi perubahan dilakukan dengan mekanisme permohonan dari Bupati/Walikota untuk ditetapkan dalam perubahan Keputusan Gubernur.

- b. Usulan perubahan tidak diperkenankan untuk memindah lokasi ke desa lain, kecuali ada pernyataan dari Kepala Desa lokasi kegiatan semula dan harus tetap dalam daftar desa miskin sesuai dengan data BPS.

Pelaksanaan suatu program atau proyek tidak lepas dari adanya suatu dana yang digunakan untuk pembiayaan program atau proyek tersebut. Program JPES pun demikian, sumber pendanaan atau pembiayaan ini berasal dari dana APBD Propinsi Jawa Timur dan juga dana pendamping (*cost sharing*). Adapun yang dimaksud dengan dana pendamping (*cost sharing*) ini adalah dana atau kontribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui APBD. Secara rinci akan di jelaskan seperti di bawah ini:

1. Sumber Pembiayaan.

Dana Program JPES dari APBD Propinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur dengan kode rekening 5.1.5.01.007 dan kode rekening 5.1.7.02.001.

2. Struktur Pembiayaan.

Struktur pembiayaan Program JPES adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran Program JPES diarahkan untuk:
 - a) Bantuan Baiya kegiatan;
 - b) Bantuan Belanja Operasional;
- 2) Bantuan biaya kegiatan Program JPES difokuskan untuk kegiatan Padat Karya, yang alokasi per Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan daftar urut IPM versi BPS tahun 2006 dan jumlah keluarga miskin (Gakin) yang belum tertangani. Konsep pembagian alokasi per Kabupaten/Kota adalah daerah IPM rendah dan mempunyai jumlah keluarga miskin besar akan mendapatkan alokasi dana yang besar serta dialokasikan minimal sebesar Rp. 100 juta. Jumlah keluarga miskin yang dipakai dalam perhitungan adalah jumlah keluarga miskin menurut BPS dikurangi

dengan jumlah keluarga miskin yang telah tertangani oleh Program PAM-DKB pada tahun 2006.

Tata cara perhitungan adalah:

a) Menetapkan faktor koreksi (FK) dengan perhitungan:

$$FK_{(n)} = \frac{1 / IPM}{1 / IPM} \times FK_{(n-1)}$$

b) Menetapkan bobot masing-masing daerah:

$$Bobot_{(n)} = 1/IPM_{(n)} \times Gakin_{(n)} \times FK_{(n)}$$

c) Menetapkan Koefisien Alokasi:

$$Koef_{(n)} = Bobot_{(n)} / \text{Total Bobot}$$

d) Menetapkan alokasi:

$$\text{Alokasi} = Koef_{(n)} \times (\text{Total Alokasi} - (38 \times \text{Rp. 100 juta}))$$

3) Belanja Operasional dipergunakan untuk:

- a) Tugas-tugas operasional, sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan monitoring evaluasi (monev);
- b) Belanja Operasional untuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, Camat dan Kepala Desa/Lurah termasuk di dalamnya untuk kegiatan persiapan/perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan serta biaya pembuatan papan nama proyek;
- c) Belanja untuk penunjang kegiatan Program JPES tingkat Propinsi untuk kegiatan persiapan/perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan.

Dengan pembagian Belanja Operasional tersebut a), b), dan c), sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengalokasikan biaya administrasi atau sejenisnya dari alokasi dana APBD Proinsi Jawa Timur (Bantuan Biaya Kegiatan).

3. Mekanisme Penyaluran.

Penyaluran dana bantuan dilaksanakan dengan mekanisme: Gubernur Jawa Timur selaku pemberi bantuan menyalurkan dana bantuan kepada Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan

Pokgakin yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur melalui rekening penerima bantuan dengan tatacara sebagai berikut:

1) Mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Kegiatan Program JPES per Kabupaten/Kota, mekanisme penyaluran dan pengajuan serta pencairan dana kegiatan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Tahap Pertama.

Tahap pertama dalam penyaluran dan pengajuan serta pencairan dana kegiatan meliputi:

- i. Biro keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyalurkan dana kegiatan Program JPES per Kabupaten/Kota sebesar 50% dari pagu kegiatan yang ditujukan kepada rekening Ketua dan Bendahara Pokgakin di Bank JATIM terdekat;
- ii. Masing-masing Pokgakin dapat mencairkan dana pada rekeningnya di Bank JATIM;
- iii. Bank JATIM harus mencairkan dalam waktu yang sama dengan permohonan pencairan oleh Pokgakin.

b) Tahap Kedua

Tahap kedua dalam penyaluran dan pengajuan serta pencairan dana kegiatan meliputi:

- i. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pembayaran tahap kedua keada Gubernur Jawa Timur, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - Surat permohonan pencairan dana Tahap II kepada Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - SK Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (stempel asli);

- Fotokopi SK Jabatan Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- Fotokopi rekening Bank JATIM (giro) rangkap 3 (tiga) atas nama Ketua dan Bendahara Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- Fotokopi KTP rangkap 3 (tiga) atas nama Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- Kuitansi asli (bukan fotokopi) rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar bermaterai yang ditandatangani Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

ii. Pembayaran tahap kedua kepada Pokgakin dilakukan setelah kemajuan pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 30% melalui permohonan Pokgakin kepada Tim koordinasi Kabupaten/Kota yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan:

- Laporan kemajuan fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh Ketua Pokgakin dan diketahui oleh Pendamping Pokgakin dan Kepala Desa/Lurah;
- Rencana penggunaan dana tahap kedua;
- Kuitansi asli (bukan fotokopi) rangkap 3 (tiga), 1 (lembar) bermaterai, yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Pokgakin, dengan rincian sebagai berikut:

⇒ Sudah Terima dari: Ketua Tim Koordinasi Kabupaten;

⇒ Jumlah Uang: sebesar 50% dari pagu alokasi dana kegiatan masing-masing Pokgakin;

⇒ Buat Pembayaran: Bantuan Sosial untuk JPES tahap II dalam rangka..... (*sesuai dengan kegiatan Pokgakin*).

iii. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota cq. Pemegang Rekening Program JPES tahap kedua membuat perintah

transfer kepada Bank JATIM untuk pembayaran tahap kedua ke rekening Pokgakin selaku pemohon.

2) Mekanisme penyaluran dan pengajuan serta pencairan belanja operasional Program JPES tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi:

- a. Belanja Operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- b. Belanja Operasional Kecamatan;
- c. Belanja Operasional Desa/Kelurahan

Ketiga macam belanja operasional tersebut nantinya akan disalurkan melalui rekening Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pencairan dana Belanja Operasional kepada Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota;
- b. SK Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (stempel asli);
- c. Fotokopi SK Jabatan Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- d. Fotokopi Rekening Bank JATIM (giro) rangkap 3 (tiga) atas nama Ketua dan Bendahara Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- e. Fotokopi KTP rangkap 3 (tiga), atas nama Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- g. Kuitansi asli (bukan fotokopi) rangkap 3 (tiga), 1 (satu) bermaterai yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan rincian:
 - i. Sudah Terima dari: Gubernur Jawa Timur;

- ii. Jumlah Uang: sebesar pagu alokasi dana Belanja Operasional masing-masing Kabupaten/Kota (Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan);
- iii. Buat Pembayaran: Bantuan Keuangan JPES dalam rangka Belanja Operasional Program JPES tahun.... Kabupaten/Kota

Selanjutnya Tim Koordinasi Kabupaten/Kota menyalurkan dana Belanja Operasional Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dengan demikian Tim Koordinasi Kabupaten/Kota ikut mengendalikan pengelolaan Belanja Operasional di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- 3) Honorarium pendamping Pokgakin diberikan setiap bulan berdasarkan Keputusan Gubernur melalui rekeningnya dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Rekening Bank Jatim (tabungan) rangkap 3 (tiga) atas nama Pendamping Pokgakin;
 - b. Fotokopi KTP rangkap 3 (tiga) atas nama Pendamping Pokgakin;
 - c. Kuitansi asli (bukan fotokopi) rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar bermaterai yang ditandatangani oleh Pendamping Pokgakin, dengan rincian:
 - i. Sudah Terima dari: Gubernur Jawa Timur
 - ii. Jumlah Uang: sebesar honorarium Pendamping Pokgakin;
 - iii. Buat Pembayaran: Honorarium Pendamping Pokgakin Program JPES tahun..... Kabupaten/Kota..... bulan..... tahun.....

- 4) Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, apabila Program JPES tidak dilaksanakan sampai batas akhir masa anggaran atau masih terdapat sisa penggunaan dana pada rekening Ketua/Bendahara Kabupaten/Kota, Kecamatan,

Desa/Kelurahan atau rekening Pokgakin, maka Tim Koordinasi Kabupaten/Kota memerintahkan kepada pemegang rekening penerima bantuan/Pokgakin, untuk menyetorkan kembali dana tersebut ke Kas Daerah Propinsi Jawa Timur melalui Bank JATIM.

- 5) Bank JATIM mempunyai kewajiban setiap bulan untuk menyampaikan laporan penyaluran dana Program JPES di setiap Kabupaten/Kota kepada Biro Administrasi Pembangunan.

4. Pengelolaan Dana.

Struktur pengelolaan dana Program JPES Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Propinsi meliputi Belanja Operasional untuk Kegiatan Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk:
 - a) Biro Administrasi Pembangunan
 - b) Bappeprop
 - c) Bawasprop
 - d) Badan Koordinasi Wilayah
 - e) Pendamping Program JPES
- 2) Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Belanja Operasional Program JPES Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- 3) Pengelolaan dana Bantuan Sosial untuk kegiatan Program JPES oleh Pokgakin dilakukan secara swakelola yang bersifat padat karya dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.

5. Dana Pendampingan (*Cost Sharing*).

Agar penangan Program JPES di Jawa Timur dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna dan terpadu, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyertakan dana Pendampingan (*Cost Sharing*) dalam APBD Kabupaten/Kota tahun Anggaran berikutnya.

6. Partisipasi Masyarakat.

Masyarakat dan lembaga lainnya di lokasi sasaran dapat berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Program JPES baik berupa bantuan dana maupun dalam bentuk lain yang dikoordinasikan dan diadministrasikan oleh Kepala Desa/Lurah.

7. Pajak.

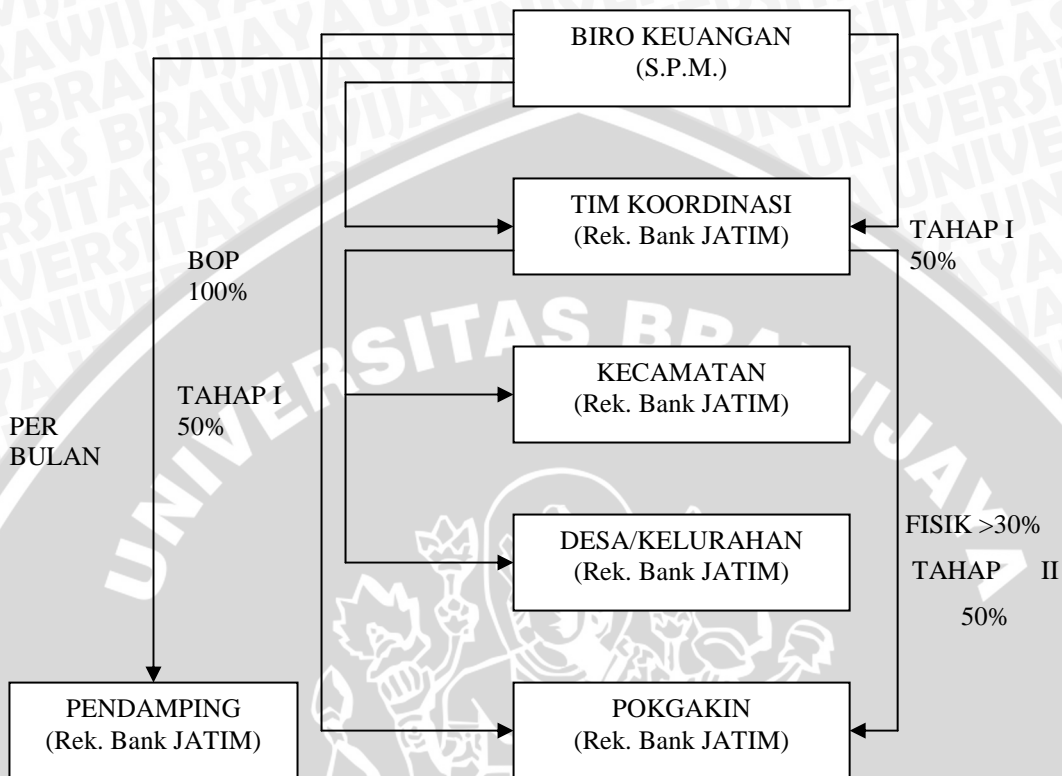
Berdasarkan pasal 16A Undang-undang PPN jo Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPPN untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPh atas pembelian BKP dan JKP, maka:

- 1) Atas hibah yang diserahkan kepada Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin) yang dilakukan, belum ada kegiatan yang terhutang pajak sehingga tidak perlu di pungut PPh pasal 22 maupun PPN dan PPh BM, apabila dalam bentuk uang;
- 2) Atas kegiatan swakelola yang dilaksanakan Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin), menjadi tanggungjawab apabila terdapat kegiatan yang terhutang pajak.

Secara ringkas, proses atau tahapan penyaluran dana Program JPES dapat dilihat dalam bagan seperti di bawah ini:

Bagan 5.

Bagan Alir Penyaluran Dana.



Sumber: buku Petunjuk Operasional Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur tahun 2008.

Dalam hal penyaluran dana, ada dua tahap yang dilakukan masing-masing tahap adalah sebesar 50%. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 16.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP I

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan paving
Pokgakin : Blado Wetan
Desa : Blado Wetan
Kecamatan : Banyuanyar
Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	15 Nov 07	1	Pembelian alat kerja	Darmaji	6.340.000,00
2.	15 Nov 07	2	Pembelian pasir pasang 28m3	Soni	1.533.000,00
3.	16 Nov 07	3	Pembelian semen 90 sak	Jalil	3.330.000,00
4.	16 Nov 07	4	Pembelian batu merah 15.000 biji	Sugianto	4.350.000,00
5.	16 Nov 07	5	Pembelian paving 400 m2	Sugianto	11.200.000,00
6.	16 Nov 07	6	Pembelian pasir urug 97 m3	Halim	3.569.600,00
7.	22 Nov 07	7	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.507.000,00
8.	29 Nov 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.661.000,00
9.					
10.					
			JUMLAH		37.490.600,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 17.
**RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
 JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
 PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
 TAHAP II**

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan paving
 Pokgakin : Blado Wetan
 Desa : Blado Wetan
 Kecamatan : Banyuanyar
 Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	7 Des 07	1	Pembelian alat kerja	Darmaji	6.340.000,00
2.	7 Des 07	2	Pembelian semen 21 sak	Jalil	1.533.000,00
3.	7 Des 07	3	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.330.000,00
4.	14 Des 07	4	Pembelian pasir urug 114m ³	Soni	4.350.000,00
5.	14 Des 07	5	Pembelian paving 467m ³	Sugianto	11.200.000,00
6.	14 Des 07	6	Pembelian batu bata 6.840 biji	Sugianto	3.569.600,00
7.	14 Des 07	7	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.507.000,00
8.	21 Des 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.661.000,00
9.	28 Des 07	9	Pembayaran upah kerja	Gakin	
10.					
			JUMLAH		37.490.600,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 18.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP I

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton

Pokgakin : Pendil

Desa : Pendil

Kecamatan : Banyuanyar

Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	15 Nov 07	1	Pembelian pasir pasang 58 m3	Soni	3.175.500,00
2.	15 Nov 07	2	Pembelian alat kerja	Jalil	3.660.000,00
3.	16 Nov 07	3	Pembelian kayu	Darmaji	2.020.750,00
4.	16 Nov 07	4	Pembelian batu pecah 72 m3	Soni	6.912.000,00
5.	16 Nov 07	5	Pembelian tanah uruk 60 m3	Halim	2.880.000,00
6.	16 Nov 07	6	Pembelian semen 150 sak	Sugianto	5.550.000,00
7.	22 Nov 07	7	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.605.000,00
8.	23 Nov 07	8	Pembelian semen 160 sak	Jalil	5.920.000,00
9.	29 Nov 07	9	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.605.000,00
10.					
			JUMLAH		37.328.250,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 19.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP II

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton

Pokgakin : Pendil

Desa : Pendil

Kecamatan : Banyuanyar

Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	7 Des 07	1	Pembayaran sewa molen	Darmaji	7.200.000,00
2.	7 Des 07	2	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.143.000,00
3.	11 Des 07	3	Pembelian batu pecah 20,5 m3	Soni	1.968.000,00
4.	12 Des 07	4	Pembelian pasir pasang 21,7 m3	Soni	1.188.000,00
5.	12 Des 07	5	Pembelian tanah uruk 21,5 m3	Jalil	1.020.000,00
6.	12 Des 07	6	Pembelian semen 200 sak	Jalil	7.400.000,00
7.	14 Des 07	7	Pembayaran upah kerja	Gakin	2.989.000,00
8.	21 Des 07	8	Pembelian semen 209 sak	Jalil	7.723.750,00
9.	21 Des 07	9	Pembayaran upah kerja	Gakin	2.989.000,00
10.	21 Des 07	10	Pembayaran upah kerja	Gakin	2.051.000,00
			JUMLAH		37.671.750,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 20.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP I

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton

Pokgakin : Sentulan

Desa : Sentulan

Kecamatan : Banyuwangor

Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	15 Nov 07	1	Pembayaran batu kali 94 m3	Halim	7.238.000,00
2.	15 Nov 07	2	Pembayaran pasir uruk 58 m3	Soni	2.871.000,00
3.	16 Nov 07	3	Pembayaran sirtu 34 m3	Soni	3.118.500,00
4.	16 Nov 07	4	Pembelian alat kerja	Darmaji	580.000,00
5.	16 Nov 07	5	Pembelian semen 125 sak	Jalil	4.537.500,00
6.	16 Nov 07	6	Pembayaran pasir pasang 21 m3	Soni	1.270.500,00
7.	22 Nov 07	7	Pembayaran batu kali 75 m3	Halim	5.775.000,00
8.	22 Nov 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	4.375.000,00
9.	24 Nov 07	9	Pembelian semen 68 sak	Jalil	2.468.400,00
10.	29 Nov 07	10	Pembayaran upah kerja	Gakin	5.250.000,00
			JUMLAH		37.483.900,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuwangor

Tabel 21.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP II

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton

Pokgakin : Sentulan

Desa : Sentulan

Kecamatan : Banyuanyar

Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	7 Des 07	1	Pembelian batu kali 100 m3	Halim	7.700.000,00
2.	7 Des 07	2	Pembelian pasir pasang 22,44 m3	Soni	147.700,00
3.	7 Des 07	3	Pembelian semen 178 sak	Jalil	6.461.400,00
4.	7 Des 07	4	Pembayaran upah kerja	Gakin	5.250.000,00
5.	7 Des 07	5	Pembelian batu kali 46 m3	Halim	3.542.000,00
6.	12 Des 07	6	Pembayaran upah kerja	Gakin	4.375.000,00
7.	20 Des 07	7	Pembayaran sewa wales dan mobilisasi		3.050.000,00
8.	21 Des 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.955.000,00
9.	28 Des 07	9	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.035.000,00
10.					
			JUMLAH		37.516.100,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 22.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP I

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton
Pokgakin : Banyuanyar Tengah
Desa : Banyuanyar Tengah
Kecamatan : Banyuanyar
Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	15 Nov 07	1	Pembelian pasir pasang 28 m3	Soni	1.533.000,00
2.	15 Nov 07	2	Pembelian semen 80 sak	Darmaji	2.960.000,00
3.	16 Nov 07	3	Pembelian alat kerja	Jalil	8.430.000,00
4.	16 Nov 07	4	Pembelian paving 350 m2	Sugianto	9.800.000,00
5.	16 Nov 07	5	Pembelian pasir urug 96 m3	Halim	3.532.800,00
6.	16 Nov 07	6	Pembelian batu bata 15.000 biji	Sugianto	4.350.000,00
7.	22 Nov 07	7	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.143.000,00
8.	29 Nov 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.661.000,00
9.					
10.					
			JUMLAH		37.319.800,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 23.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP II

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton
Pokgakin : Banyuanyar Tengah
Desa : Banyuanyar Tengah
Kecamatan : Banyuanyar
Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	7 Des 07	1	Pembelian alat-alat kerja	Jalil	2.095.800,00
2.	7 Des 07	2	Pembelian semen sak 31 sak	Jalil	1.134.272,00
3.	7 Des 07	3	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.297.000,00
4.	7 Des 07	4	Pembelian paving 350 m ²	Sugianto	14.476.000,00
5.	7 Des 07	5	Pembelian batu bata 6.840 biji	Sugianto	1.983.600,00
6.	14 Des 07	6	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.451.000,00
7.	20 Des 07	7	Pembelian pasir uruk 114,96 m ³	Halim	4.320.528,00
8.	21 Des 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.605.000,00
9.	28 Des 07	9	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.407.000,00
10.					
			JUMLAH		37.680.200,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 24.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP I

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton

Pokgakin : Gunung Geni

Desa : Gunung Geni

Kecamatan : Banyuwangor

Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	15 Nov 07	1	Pembayaran pasir pasang 47 m ³	Soni	2.573.250,00
2.	15 Nov 07	2	Pembayaran batu pecah 50 m ³	Halim	4.800.000,00
3.	16 Nov 07	3	Pembayaran tanah urug 54 m ³	Halim	2.592.000,00
4.	16 Nov 07	4	Pembelian alat kerja	Darmaji	3.660.000,00
5.	16 Nov 07	5	Pembelian semen 120 sak	Jalil	4.440.000,00
6.	16 Nov 07	6	Pembelian papan kayu	Darmaji	2.060.000,00
7.	22 Nov 07	7	Pembelian semen 150 sak	Jalil	5.550.000,00
8.	22 Nov 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.451.000,00
9.	24 Nov 07	9	Pembelian semen 120 sak	Darmaji	4.440.000,00
10.	29 Nov 07	10	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.815.000,00
			JUMLAH		37.382.000,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuwangor

Tabel 25.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP II

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton
Pokgakin : Gunung Geni
Desa : Gunung Geni
Kecamatan : Banyuanyar
Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	7 Des 07	1	Pembayaran sewa molen	Darmaji	8.006.000,00
2.	7 Des 07	2	Pembelian pasir pasang 29,44 m ³	Soni	1.611.840,00
3.	7 Des 07	3	Pembelian batu pecah 38,8 m ³	Halim	3.724.800,00
4.	7 Des 07	4	Pembelian tanah uruq 21,5 m ³	Halim	1.080.000,00
5.	7 Des 07	5	Pembelian semen 150 sak	Jalil	5.550.000,00
6.	7 Des 07	6	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.815.000,00
7.	12 Des 07	7	Pembelian paku dll	Jalil	67.360,00
8.	14 Des 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.661.000,00
9.	15 Des 07	9	Pembelian semen 150 sak	Jalil	5.550.000,00
10.	21 Des 07	10	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.143.000,00
11.	21 Des 07	11	Pembayaran upah kerja	Gakin	1.409.000,00
			JUMLAH		37.613.000,00

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 26.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP I

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton

Pokgakin : Klenang Lor

Desa : Klenang Lor

Kecamatan : Banyuanyar

Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	15 Nov 07	1	Pembelian alat kerja	Darmaji	3.660.000,00
2.	15 Nov 07	2	Pembelian semen 150 sak	Jalil	5.550.000,00
3.	16 Nov 07	3	Pembelian batu pecah 58 m3	Soni	5.568.000,00
4.	16 Nov 07	4	Pembelian tanah uruk 47 m3	Halim	2.256.000,00
5.	16 Nov 07	5	Pembelian pasir pasang 54 m3	Soni	2.956.500,00
6.	16 Nov 07	6	Pembelian papan kayu	Jalil	2.020.750,00
7.	22 Nov 07	7	Pembelian semen 125 sak	Darmaji	4.625.000,00
8.	22 Nov 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.815.000,00
9.	24 Nov 07	9	Pembelian semen 80 sak	Darmaji	2.960.000,00
10.	29 Nov 07	10	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.969.000,00
			JUMLAH		

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Tabel 27.
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
TAHAP II

Jenis kegiatan : Pembangunan jalan rabat beton
Pokgakin : Klenang Lor
Desa : Klenang lor
Kecamatan : Banyuanyar
Kabupaten : Probolinggo

Alokasi dana : Rp. 75.000.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian Penggunaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	7 Des 07	1	Pembayaran sewa molen	Darmaji	7.262.800,00
2.	7 Des 07	2	Pembelian semen 180 sak	Jalil	6.660.000,00
3.	7 Des 07	3	Pembelian batu pecah 34,5 m3	Soni	3.312.000,00
4.	7 Des 07	4	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.969.000,00
5.	7 Des 07	5	Pembelian tanah urug 32,7 m3	Soni	1.569.600,00
6.	7 Des 07	6	Pembelian pasir pasang 25,6 m3	Soni	1.401.600,00
7.	10 Des 07	7	Pembelian semen 184 sak	Jalil	6.798.750,00
8.	14 Des 07	8	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.349.000,00
9.	28 Des 07	9	Pembayaran upah kerja	Gakin	3.297.000,00
10.					
			JUMLAH		37.619.750

Sumber: LPJ Program JPES 2007 Kec. Banyuanyar

Angka yang menunjukkan Rp. 75.000.000 merupakan nominal bantuan yang diterima oleh masing-masing desa. Pencairan dilakukan dengan 2 tahap, masing-masing tahap adalah sebesar Rp. 37.500.000.

C. Hasil yang di raih dalam pelaksanaan Program JPES.

Sesuai dengan tujuan Program JPES yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Desa/Kelurahan melalui penguatan pendapatan masyarakat yang mengkhhususkan pada:

- a. Peningkatan jumlah kegiatan pembangunan di pedesaan melalui stimultan Program JPES Pemprop Jawa Timur dalam mendorong program pembangunan pedesaan melalui APBD Kabupaten/Kota.

- a. Penyediaan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja warga masyarakat setempat di lokasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dan sarana dan prasarana.
- b. Pendayagunaan tenaga warga masyarakat lokal untuk meningkatkan penghasilan tambahan melalui kegiatan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja setempat (*off season job opportunity*).
- c. Peningkatan produktivitas dan kebersamaan, tanggung jawab dan rasa memiliki masyarakat setempat terhadap infrastruktur dan sarana yang telah dibangun yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- d. Penguatan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat, desa/kelurahan agar berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.
- e. Peningkatan SDM masyarakat desa melalui kegiatan nyata (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian) dalam berorganisasi melaksanakan pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

Maka akan ada 2 (dua) fokus yang dijadikan tolok ukur tentang hasil dari pelaksanaan program ini, yaitu hasil pelaksanaan program secara fisik dan hasil pelaksanaan program secara non fisik.

a. Hasil Pelaksanaan Program secara fisik

Sesuai dengan tujuan program pada poin pertama yaitu Peningkatan jumlah kegiatan pembangunan di pedesaan melalui stimultan Program JPES Pemprop Jawa Timur dalam mendorong program pembangunan pedesaan melalui APBD Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup program yang di fokuskan pada pola padat karya, serta hasil musyawarah Pokgakin hasil yang diperoleh secara fisik pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Desa Pendil dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan rabat. Volume 2m x 625m x 0,1m.
- b. Desa Blado Wetan dengan jenis kegiatan program adalah pembanguna jalan paving. Volume 2m x 500m.

- c. Desa Gunung Geni dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan rabat. Volume 2m x 600m x 0,1m.
- d. Desa Banyuanyar Tengah dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan paving. Ada 2 lokasi dalam pembangunan jalan paving di desa Banyuanyar Tengah yaitu dusun Pande I dengan volume 2m x 255m dan dusun Pande II dengan volume 2m x 255m.
- e. Desa Klenang Lor dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan rabat. Volume 2m x 625m x 0,1m.
- f. Desa Sentulan dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan makadam di dusun Pelle. Volume 2m x 440m.

Sedangkan pada tahun 2008 hasil secara fisik yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Desa Liprak Kidul dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan makadam. Volume 2m x 420m.
2. Desa Liprak Wetan dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan paving. Volume 2m x 250m.
3. Desa Alassapi dengan jenis kegiatan program adalah pembangunan jalan rabat. Volume 2m x 625m x 0,1m.

Selanjutnya, Kasi Pembangunan Kecamatan Banyuanyar juga menyampaikan bahwa:

“Hasil pelaksanaan program yang berupa fisik atau pembangunan sarana dan prasarana ini memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Masyarakat merasakan adanya suatu kemudahan terutama dalam transportasi. Dengan pembangunan jalan paving, masyarakat merasakan kelancaran dalam mengayuh sepeda untuk melakukan mobilitas ke tempat lain.” (wawancara dilakukan di Kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus pukul 09.40 WIB)

Hal yang sama disampaikan pula oleh Sdr. Rohman, warga dusun Pande, desa Banyuanyar Tengah yang di temui oleh peneliti di depan rumahnya yang terletak di seberang jalan paving, ia menyampaikan bahwa:

“Dengan adanya jalan paving, warga bisa bepergian dengan nyaman. Warga tidak perlu lagi mengayuh sepeda dengan pelan, Mas. Semua bisa sampai di tujuan dengan lancar dan cepat. Warga desa lain juga semakin mudah untuk datang ke desa kami, terutama untuk urusan dagang.” (wawancara dilakukan di teras kediaman responden tanggal 14 Agustus 2008 pukul 10.13 WIB)

Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan dilaksanakannya Program JPES ini banyak warga masyarakat yang terbantu terutama dalam hal kelancaran akses transportasi. Karena kelancaran akses transportasi ini maka diharapkan laju perekonomian di Kecamatan Banyuwangor meningkat. Kemudahan akses jalan ini nantinya akan mempermudah para penduduk yang berprofesi sebagai pedagang bertransaksi dengan pedagang lain.

b. Hasil Pelaksanaan Program secara non fisik

Apabila kita memperhatikan tentang tujuan pelaksanaan program ini mulai poin b hingga poin f maka secara khusus program ini memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu hasil pelaksanaan program yang bersifat non fisik. Secara umum, hasil yang dapat diperoleh dan dilihat dari pemberdayaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat miskin memperoleh lapangan kerja walaupun hanya bersifat sementara, akan tetapi hal tersebut di harapkan menjadi suatu pemacu bagi mereka untuk dapat lebih berkarya dan tidak menggantungkan diri pada pemerintah.
- b. Rasa kebersamaan yang tumbuh di dalam masyarakat semakin kuat.
- c. Masyarakat desa lebih bertanggung jawab dalam menjaga hasil program karena mereka merasa bahwa itu adalah hasil kerja keras yang memiliki manfaat yang lebih banyak.
- d. Partisipasi dan Sumber Daya Masyarakat lebih meningkat daripada sebelumnya. Hal itu dapat dirasakan melalui banyaknya masyarakat yang turut berpartisipasi walaupun dalam bentuk saran.

Hasil pelaksanaan program secara non fisik tersebut dirasa positif dan hal tersebut dapat dijadikan suatu motivasi tersendiri bagi Pemerintah Desa. Karena hal itu, Pemerintah Desa dapat memfasilitasi masyarakatnya yang mempunyai keinginan untuk maju. Hal tersebut juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Banyuwangor, bahwa:

“Banyak perubahan positif yang dapat kami rasakan dengan adanya Program JPES ini. Masyarakat desa lebih aktif dalam memberikan sumbangsih pikirannya. Kami dapat melihat bahwa ada keinginan dari mereka untuk lepas dari kemiskinan dan berusaha untuk lebih maju lagi.

Kebersamaan yang terjalin selama ini pun semakin erat. Masyarakat bahu membahu untuk saling menolong dan berupaya untuk saling bekerja sama.” (wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 09.40 WIB)

Kepala Desa Banyuanyar Tengah masa jabatan 2003-2008 yang juga terlibat dalam pelaksanaan program ini pada tahun 2007, Bpk. Sahidil Muntarom juga mengatakan yang serupa:

“Kami senang dengan adanya program ini. Banyak warga kami yang merasakan manfaatnya. Kami merasa dengan adanya program ini, kebersamaan warga terjalin dengan sangat bagus. Hasil yang diperoleh dalam program ini juga memberikan kemudahan bagi warga kami. Dengan adanya program ini, saya sebagai Kepala Desa dapat mengetahui bahwa banyak warga kami yang cerdas. Mereka banyak yang menyampaikan saran dan kritik, kadang-kadang kritik yang mereka sampaikan membuat telinga saya merah. Tapi, kritik itu untuk membangun, Mas.” (wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 10.00 WIB)

Terkait dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh kedua responden tersebut di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa program ini tidak hanya memberikan hasil secara fisik yang bagus, akan tetapi hasil secara non fisik yang juga bisa membuat perubahan. Rasa kebersamaan, tanggung jawab dan partisipasi warga sedikit demi sedikit mulai tumbuh. Hal ini penting untuk dijaga karena kebersamaan, tanggung jawab dan partisipasi yang terdapat pada warga desa bisa dijadikan bahan usulan untuk lebih meningkatkan pembangunan desa menuju ke arah yang lebih baik.

D. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program JPES.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program akan tidak dapat lepas kaitannya dengan faktor pendukung dan penghambat. Tujuan kita mempelajari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu program adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan suatu program agar apabila program tersebut akan dilanjutkan pada masa yang akan datang dapat diminimalisir risikonya. Maupun meniadakan resiko dan program yang dilaksanakan akan berjalan dengan sempurna.

a. Faktor Pendukung.

Sama halnya dengan program lainnya, program JPES juga memiliki faktor pendukung sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Ada 3 (tiga) faktor pendukung yang peneliti amati selama pelaksanaan program ini, yaitu masyarakat, anggaran dan sarana.

- a. Masyarakat. Pada faktor pendukung yang pertama ini peneliti menyebutkan tentang masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program JPES, masyarakat banyak yang terlibat, terutama masyarakat miskin. Program JPES ini memang di khususkan untuk masyarakat miskin, akan tetapi masyarakat yang produktif dalam artian masyarakat miskin yang masih mampu untuk bekerja.

Di Kecamatan Banyuwangi terdapat banyak masyarakat miskin. Kondisi inilah yang mengakibatkan program ini dapat berjalan dan mendapatkan apresiasi yang baik masyarakat miskin. Mereka sangat tertarik bahkan antusias dalam menyambut program ini. Dalam pelaksanaannya, ternyata banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan program. Rasa kebersamaan pun menjadi bertambah erat karena diadakannya program ini.

- b. Anggaran. Program JPES memiliki sumber pendanaan atau pembiayaan yang berasal dari dana APBD Propinsi Jawa Timur dan juga dana pendamping (*cost sharing*). Adapun yang dimaksud dengan dana pendamping (*cost sharing*) ini adalah dana atau kontribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui APBD. Dengan demikian, dalam pelaksanaan program ini terjamin adanya sumber pendanaan sehingga program ini dapat berjalan dengan baik hingga akhir.
- c. Sarana. Sarana yang dimaksud dalam pelaksanaan program ini adalah fasilitator yang membantu para penerima dana program dalam melaksanakan tugasnya. Fasilitator ini disebut juga dengan pendamping. Selain itu ada sarana lain seperti alat-alat penunjang program yang terdapat di masing-masing desa.

Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Banyuanyar tentang faktor pendukung program ini, bahwa:

“Dalam pelaksanaan program JPES di Kecamatan Banyuanyar ini, ada 3 (tiga) faktor pendukung yang sangat berpengaruh, yaitu masyarakat, anggaran dan sarana. Masyarakat dalam hal ini sebagai sasaran target program ini. Ketiga hal tadi sangat saling berkaitan. Kalau diibaratkan, ketiganya seperti lingkaran.” (Wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 09.40 WIB)

Pernyataan lain juga terungkap lewat wawancara dengan Kepala Desa Banyuanyar Tengah masa jabatan 2003-2008 yang juga terlibat dalam pelaksanaan program ini pada tahun 2007, Bpk. Sahidil Muntarom:

“Ada banyak hal yang mendukung dalam terlaksananya program ini. Salah satunya adalah pembiayaan atau sumber dana. Dengan adanya kelancaran sumber dana di program ini, diharapkan nantinya program ini akan berjalan lagi sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Kam juga berharap agar dalam pelaksanaan program JPES ini di tahun depan ada penambahan dana agar dapat di pakai untuk membangun sarana yang lain.” (Wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 10.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui adanya faktor pendukung pelaksanaan program. Salah satu faktor penting adalah tentang pembiayaan atau sumber dana program tersebut. Adanya kelancaran tentang sumber dana itu diharapkan akan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dilaksanakan

4.4.2 Faktor Penghambat.

Apabila ada faktor pendukung, maka akan ada faktor penghambat. Sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara dengan Kasi Pembangunan Kecamatan Banyuanyar, maka ada 2 (dua) faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini, yaitu Sumber Daya Manusia dan Lembaga/Birokrasi. Kedua faktor ini merupakan permasalahan utama yang patut menjadi perhatian dalam melaksanakan program serupa selanjutnya.

- a. Sumber Daya Manusia. Karena program ini dilaksanakan di daerah pedesaan, maka banyak terdapat masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah. Mayoritas penduduk Kecamatan Banyuanyar adalah tamatan SD (Sekolah Dasar). Akan tetapi, masih lebih banyak lagi penduduk yang tidak sekolah. Faktor ini yang mengakibatkan Sumber Daya Manusia lemah.

Dalam pelaksanaan program ini, masalah teknis masih menjadi perhatian khusus terutama dalam beberapa bidang pengerjaan. Untuk tenaga teknis, pihak Kecamatan harus mendatangkan beberapa teknis dalam pengerjaan program. Tentunya hal ini memerlukan waktu pengerjaan yang agak lama dibandingkan dengan jadwal.

- b. Lembaga atau Birokrasi. Maksud dari Lembaga atau Birokrasi dalam faktor penghambat ini adalah lambatnya instruksi atau perintah pelaksanaan dan koordinasi dengan Propinsi. Keterlambatan pemberian instruksi atau perintah pelaksanaan program diartikan sebagai lambatnya respon Pemerintah Propinsi dalam upayanya untuk melaksanakan tahapan-tahapan program tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan tertundanya pelaksanaan program ini. Untuk pelaksanaan di tahun 2008, pelaksanaan program ini masih di tahap sosialisasi Tingkat Bakorwil dan sosialisasi Tingkat Kabupaten/Kota. Apabila kita melihat jadwal pelaksanaan program ini maka seharusnya hingga bulan September ini akan memasuki tahapan pelaksanaan kegiatan. Hal ini patut dijadikan koreksi bagi Pemerintah Propinsi sebab banyak daerah yang telah mempersiapkan diri dengan program ini.

Pendapat tentang adanya keterlambatan ini juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Banyuwangor sebagai berikut:

“Keterlambatan ini memang biasa terjadi, sehingga bisa dikatakan bahwa program ini bersifat insidental. Insidental dalam pengertian program ini bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa berpatokan pada jadwal pelaksanaan yang ada di dalam buku Petunjuk Operasional. Seharusnya program ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal sehingga kami bisa merasakan dampak positifnya semakin cepat, apalagi masyarakat di Kecamatan Banyuwangor sangat antusias dengan program ini.” (Wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Banyuwangor tanggal 13 Agustus 2008 pukul 09.40 WIB)

Hal lain juga di ungkapkan oleh Bapak Sahidil Muntarom:

“Hal yang kadang-kadang membuat program ini terasa sulit adalah karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Rata-rata pendidikan masyarakat di Desa kami adalah tamatan SD, tapi banyak juga yang tidak lulus SD. Ketika saya memberi penjelasan, saya sering mengulangi berkali-kali. Penduduk masih banyak yang belum paham

kalau hanya dijelaskan 1 (satu) kali.” (Wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Banyuanyar tanggal 13 Agustus 2008 pukul 10.00 WIB)

Dari hasil dari kedua wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa ada 2 permasalahan yang mendasar yang menjadi penghambat terlaksananya program ini dengan baik. Pertama adalah tentang profesionalisme lembaga, rasa profesionalisme ini harus dimiliki oleh semua pihak terutama lembaga pelaksana program agar untuk pelaksanaan program di periode selanjutnya dapat dipercaya oleh banyak kalangan. Kedua adalah sumber daya manusia yang lebih tepatnya ditujukan pada tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami program tersebut.

E. Pembahasan

a. Pelaksanaan Program JPES.

Dalam pelaksanaan suatu program dan proyek, maka kita akan mengenal adanya tahapan atau siklus pengelolaan program dan proyek. Tahapan atau siklus ini digunakan agar dalam melaksanakan program atau proyek tertentu dapat berjalan secara sistematis dan berurutan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Secara garis besar, ada 4 tahapan atau siklus dalam pelaksanaan program dan proyek yang disebutkan oleh Zauhar yaitu perencanaan, analisa tujuan, implementasi program dan proyek, dan evaluasi dan monitoring (Zauhar, 1993, hal.4)

Program JPES (Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial) merupakan suatu program yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam upayanya untuk menganggulangi kemiskinan. Program ini memang tidak jauh berbeda dengan program lainnya, terutama dalam segi pelaksanaannya. Sama halnya dengan program lain, pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa tahapan. Namun, secara garis besar tahapan-tahapan tersebut dapat diringkas menjadi 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam setiap variabel pelaksanaannya, memiliki beberapa indikator atau perangkat.

Pada tahapan perencanaan terdapat 3 (tiga) indikator yaitu koordinasi, sosialisasi dan perencanaan program. Ketiga indikator tersebut dilaksanakan mulai tingkat Propinsi hingga ke tingkat Desa/Kelurahan. Apabila kita meninjau tentang

konsep tahapan pelaksanaan program atau proyek, terdapat studi kelayakan. Untuk program JPES ini, peneliti masih belum tahu bagaimana proses atau tahapan ini dilakukan. Akan tetapi, menurut analisa yang peneliti lakukan lebih lanjut, studi kelayakan program JPES ini berasal dari pelaksanaan program PAM-DKB pada tahun 2006. Segala informasi tentang PAM-DKB telah dipelajari oleh tim ahli dari Propinsi untuk kemudian diadaptasikan pada program JPES.

Pada pelaksanaan program, ada indikator yang menjelaskan tentang struktur organisasi pelaksana program. Dalam struktur juga dijelaskan tentang tugas masing-masing bagian. Adanya kejelasan tentang pembagian tugas dan wewenang (*job description*) ini nantinya akan mempermudah alur komunikasi dan koordinasi antar bagian. Kerapian koordinasi dan komunikasi ini nantinya akan sangat berpengaruh dalam hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan program.

Dari apa yang telah peneliti amati, struktur organisasi pelaksana program JPES ini cukup panjang akan tetapi prosedur dalam pelaksanaannya tidak terlalu rumit. Setiap bagian mulai dari Pemerintah Propinsi hingga Pemerintah Desa/Kelurahan akan saling berkoordinasi guna mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah dicapai oleh program itu.

Satu hal yang juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program adalah pembiayaan. Tanpa adanya pembiayaan atau sumber dana dalam pelaksanaan suatu program, maka akan mustahil program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Program JPES memiliki sumber pendanaan atau pembiayaan yang berasal dari dana APBD Propinsi Jawa Timur dan juga dana pendampingan (*cost sharing*) dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun yang dimaksud dengan dana pendampingan (*cost sharing*) ini adalah dana atau kontribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui APBD.

Sesuai dengan keputusan Gubernur yang menyatakan bahwa perihal keuangan program JPES ini di atur dalam peraturan perundangan yang berlaku maka secara tidak langsung terdapat adanya jaminan tentang pengadaan sumber dana. Selain itu, adanya *cost sharing* ini juga dapat membantu beban APBD Propinsi Jawa Timur dalam merealisasikan program ini.

Program JPES ini berpedoman pada pembangunan secara fisik dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai fasilitator atau media. Korten dalam Tjokrowinoto (1987, hal.26) dalam Suryono (2001, hal. 84:85) memberikan peta perbandingan karakteristik strategi pembangunan menjadi 3 yaitu:

1. Strategi Pertumbuhan (*Growth*),
2. Strategi Kebutuhan Dasar (*Basic needs*),
3. Strategi Berpusat pada Manusia (*People Center*).

Apabila peneliti amati, strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur melalui Program JPES ini mengacu pada strategi berpusat pada manusia atau (*people center*). Hal ini berdasar pada fokus program yaitu pada manusia khususnya pada masyarakat miskin di Kecamatan Banyuwangi. Program ini dikhususkan untuk meningkatkan nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan melibatkan pelaksanaan pembangunan itu sendiri dengan masyarakat sekitar. Masyarakat miskin yang menjadi sasaran program merupakan subyek sekaligus obyek. Disebut subyek karena masyarakat yang melakukan pembangunan dan disebut obyek karena masyarakat merupakan sasaran pembangunan.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam hal ini berperan sebagai fasilitator pembangunan. Pemerintah Propinsi menyediakan dana untuk kebutuhan pelaksanaan program dan juga tenaga ahli untuk memberikan instruksi atau penanganan secara teknis. Masyarakat dituntut secara aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Tjokroamidjojo dalam bukunya Teori Strategi Pembangunan Nasional (1980, hal.60-72) menyebutkan 4 perkembangan strategi pembangunan, yaitu:

1. Strategi Pembangunan Bangsa (*Nation Building*).
2. Strategi Pembangunan dengan Stabilitas.
3. Strategi Pembangunan dengan Keadilan.
4. Reorientasi Strategi Pembangunan.

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur juga merupakan strategi pembangunan dengan keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam pembangunan ini adalah bukan hanya melihat suatu pembangunan hanya melalui aspek ekonomi akan tetapi semua aspek yang terkandung di dalamnya terutama aspek sosial. Aspek sosial ini terwujud dengan arah pelaksanaan program yang mengacu pada pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya, inti dari pelaksanaan program ini adalah pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Timur memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur urusan pemerintahannya termasuk untuk mengatur warganya. Di Jawa Timur, angka kemiskinan masih relatif tinggi, oleh karena itu melalui otonomi daerah tersebut maka Pemerintah Propinsi Jawa Timur berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan.

Terdapat tiga proses pentahapan pemberdayaan masyarakat yang perlu dilalui (Priyono, 1996 dalam Suryono, 2006, hal.147), yaitu:

- 1) Inisiasi. Masyarakat mendapatkan keberdayaan diri dari pihak luar, dilakukan oleh pihak luar dan diperuntukkan bagi masyarakat.
- 2) Partisipatoris. Masyarakat mendapatkan keberdayaan dari pihak luar, dilakukan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat.
- 3) Emansipatif. Masyarakat mendapatkan keberdayaan dari, oleh dan untuk mereka sendiri.

Menurut hasil dari pengamatan peneliti, pemberdayaan masyarakat yang terwujud melalui Program JPES ini dalam tahapan pemberdayaan masyarakat masih pada tahap inisiasi dan partisipatoris. Hal ini dikarenakan masih adanya campur tangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program. Campur tangan yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur adalah dalam hal teknis pelaksanaan serta pembiayaan program. Hal ini sangatlah wajar mengingat Pemerintah Propinsi Jawa Timur merupakan pihak penggagas program yang telah membuat konsep program secara jelas.

Konsep pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh program ini terkendala oleh jumlah masyarakat miskin yang mengikuti program ini. Tidak semua masyarakat miskin menjadi anggota kelompok masyarakat di program ini. Hal ini disebabkan oleh adanya prioritas terhadap masyarakat miskin yang tinggal di daerah atau lokasi yang berdekatan dengan proyek ini. Hal ini patut di sayangkan karena hanya sebagian masyarakat miskin saja yang terbantu dengan program ini.

Satu hal yang patut menjadi sorotan adalah tentang penetapan jumlah penduduk miskin penerima bantuan program yang berdasarkan data penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) tahun 2005-2006. Tidak adanya pembaruan data tentang jumlah penduduk miskin membuat beberapa kalangan, terutama masyarakat miskin merasa keberatan. Pemerintah Propinsi Jawa Timur seharusnya

melakukan pendataan ulang jumlah keluarga miskin untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program ini dan menghindari konflik horizontal antar warga.

Arah yang kemudian akan ditunjukkan pemberdayaan masyarakat melalui program ini adalah pembangunan masyarakat. Giarci (2001) (dalam <http://subejo.staff.ugm.ac.id>) memandang *community development* sebagai:

suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini memfasilitasi penguatan ekonomi lokal dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan *collective action* dan melakukan *political pressure* serta membawa usaha-usaha bersama untuk memulai perubahan-perubahan di tingkat lokal dimana *networking* menjadi salah satu kata kuncinya.

Pembangunan sarana yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini merupakan suatu bentuk untuk pembangunan masyarakat melalui peningkatan sarana atau fasilitas lingkungan. Pembangunan fisik ini dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat secara tidak langsung. Dengan adanya pembangunan di bidang fisik diharapkan dampak terhadap bidang lain khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan mengalami perubahan.

b. Hasil Pelaksanaan Program

Program JPES yang inti dari pelaksanaannya adalah pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada pembangunan masyarakat maka yang perlu diperhatikan adalah hasil secara materi yang akan dicapai akan tetapi proses sehingga hasil tersebut diperoleh. Ini karena dalam pembangunan masyarakat, orientasinya menuju pada pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Ada 4 (empat) pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat yang dikemukakan oleh Soetomo (2006, hal.44-87) yaitu :

1. *Improvement vs Transformation.*
2. *Proses vs Hasil material.*
3. *Self help vs Technocrati.*
4. *Uniformitas vs Variasi lokal.*

Setelah peneliti mengamati proses pembangunan masyarakat di Kecamatan Banyuwang, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *Proses vs Hasil Material*. Pernyataan ini didasarkan

atas pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa mekanisme pelaksanaan program JPES di Kecamatan Banyuwangi melibatkan masyarakat dan adanya penekanan terhadap kerjasama antar masyarakat dalam proses pembangunan sehingga berbuah hasil yang baik yaitu terlaksananya program sesuai dengan tujuan awal.

Hasil yang dicapai dalam program ini ada 2 bentuk yaitu secara fisik maupun non fisik. Hasil secara fisik dapat dilihat secara riil, akan tetapi hasil secara non fisik hanya dapat dirasakan perubahannya. Hasil secara non fisik ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dimana yang menjadi inti dari pelaksanaan program ini adalah partisipasi masyarakat pelaksana program. Sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti pelaksanaan program ini cukup tinggi. Dalam pelaksanaan ini, pemerintah menerapkan strategi *People Center* dimana kegiatan pembangunan berfokus pada manusia.

Dalam tujuan awalnya, Pemerintah Propinsi Jawa Timur berupaya untuk mengentaskan kemiskinan akan tetapi dengan cara yang bijak. Cara yang bijak ini dalam artian tidak mengakibatkan masyarakat miskin bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah dalam membantu meringankan beban kemiskinan mereka. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat miskin dalam program ini merupakan upaya Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memberdayakan masyarakat miskin dan mengarahkannya pada pembangunan masyarakat. Masyarakat di tuntut untuk mampu bekerja keras dalam upayanya untuk menghidupi keluarganya.

c. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.

a.) Faktor Pendukung.

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan, pelaksanaan Program JPES di Kecamatan Banyuwangi ini memiliki 3 (tiga) faktor pendukung yaitu masyarakat, anggaran dan sarana. Masyarakat miskin terlibat dalam program ini, tetapi itu bagi mereka yang produktif. Produktif dalam artian mereka sanggup bekerja. Jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Banyuwangi memang cukup tinggi, walaupun dalam pelaksanaan program dan proyek ini tidak melibatkan semua masyarakat miskin akan tetapi setidaknya dapat membantu mengurangi jumlah angka kemiskinan.

Anggaran di sini jelas posisinya, sudah ditentukan oleh Pemerintah Propinsi dan secara tidak langsung akan menjamin keberlangsungan program ini. Penyediaan anggaran disini tidak lepas karena posisi Pemerintah khususnya Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai fasilitator pelaksanaan program. Penyediaan sarana pelaksanaan program di masing-masing desa membantu para pelaksana program mempermudah dalam menyelesaikan tugas mereka.

Keseriusan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program ini diwujudkan dalam penyediaan dana melalui APBD Propinsi dan juga dana pendampingan (*cost sharing*) yang ada dalam APBD Kbaupaten/Kota. Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga ikut menyertakan Bank Jatim sebagai pihak yang ikut membantu dalam penyediaan rekening masyarakat miskin serta dalam proses penyaluran dana

b.) Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa hambatan dalam prosesnya (Khan 1997, dalam Suryono, 2006, hal.152):

1. Manajemen publik (dalam hal ini adalah pemerintah) tidak memiliki keahlian yang cukup dalam proses pemberdayaan.
2. Kurangnya dorongan dan komitmen manajemen.
3. Adanya keengganan karyawan (bawahan atau rakyat) untuk diberdayakan.
4. Besarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan.
5. Manajemen gagal dalam menyediakan umpan balik (*feedback*) dan saran yang konstruktif.

Berbagai hambatan-hambatan yang telah diungkapkan oleh Khan merupakan hambatan yang umumnya melekat pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Baik faktor internal maupun faktor eksternal harus dicari upaya pemecahannya agar pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Yang patut menjadi perhatian adalah faktor penghambat pelaksanaan program JPES, karena setelah diadakan penelitian dalam faktor ini disebutkan bahwa birokrasi atau lembaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat dominan. Perlu adanya perbaikan dalam kinerja lembaga atau birokrasi dalam memberikan instruksi pelaksanaan program sehingga pelaksanaan program tidak tertunda dan mengalami kemunduran dalam penyelesaiannya.

Dalam mewujudkan *Good Governance*, kinerja aparaturnya harusnya lebih profesional lagi dan dituntut untuk melayani dengan maksimal. Hal ini tidak terlihat dalam pelaksanaan program JPES, bukti keterlambatan jadwal pelaksanaan adalah salah satu contoh nyata bagaimana program ini dilaksanakan tidak sesuai dengan semangat untuk mewujudkan *Good Governance*.

SDM menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Kondisi sosial berpengaruh dalam hal ini dan diperlukan upaya yang lebih keras lagi bagi penyelenggara program ini agar program ini berjalan dengan baik. Untuk mengimbangi hal itu, pelaksana program harus menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki kompetensi bagus di bidangnya. Itu dilakukan agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam Bab IV di atas, maka kami menarik kesimpulan sebagai berikut:

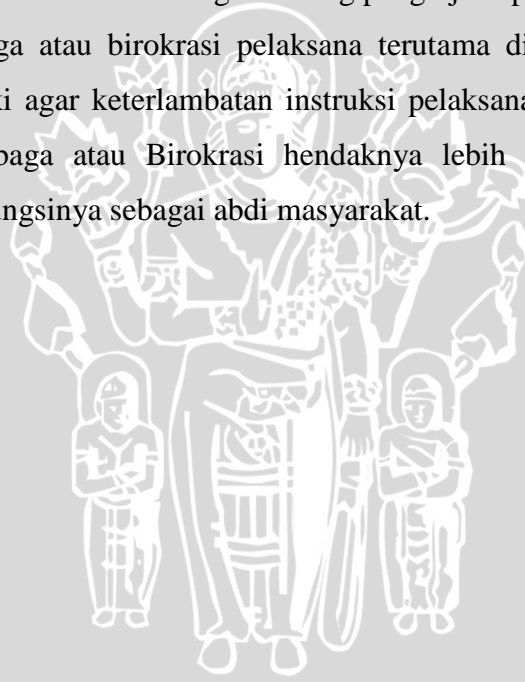
- a. Dalam pelaksanaan Program JPES di Kecamatan Banyuwang, secara ringkas terdapat tiga fase pelaksanaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Program ini dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur guna menaggulangi angka kemiskinan yang semakin tinggi. Masyarakat miskin menjadi subyek dan obyek dalam pelaksanaan ini. Pelaksanaan program ini mengacu pada pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah menginginkan masyarakat ikut berperan serta dalam upayanya mengurangi angka kemiskinan yang tinggi serta berperan dalam pembangunan.
- b. Ruang lingkup program ini adalah kegiatan padat karya, jadi hasil pelaksanaan program ini lebih menonjol di bidang pembangunan secara fisik. Hal itu direalisasikan dengan pembangunan sarana dan prasarana di masing-masing desa. Hasil program secara non fisik dapat kita amati tentang kebiasaan masyarakat yang sedikit berubah, yaitu tentang partisipasi dan rasa kebersamaan. Setelah program ini dilaksanakan, partisipasi masyarakat cukup tinggi dan rasa kebersamaan yang terjalin antar warga semakin erat.
- c. Setiap pelaksanaan program pasti ada faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Dalam pelaksanaan program JPES faktor pendukungnya adalah masyarakat, anggaran dan sarana. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia atau tingkat pendidikan yang rendah dan lembaga atau birokrasi. Peranan lembaga atau birokrasi ini menjadi sorotan karena sebagai penyelenggara kurang profesional dalam pelaksanaan tugas. Keterlambatan instruksi tentang pelaksanaan program ini menjadi

kendala yang sangat serius mengingat masih banyak masyarakat yang menantikan program ini.

B. Saran

Saran yang dapat kami sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu bahan masukan yang mungkin dapat direalisasikan guna perbaikan program ini selanjutnya ataupun pelaksanaan program yang sejenis. Saran yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran yang dikucurkan untuk program ini adalah 125 hingga 150 juta rupiah. Keseragaman jumlah dana ini mungkin akan berakibat adanya daerah yang keberatan sebab belum tentu daerah tersebut membutuhkan dana sebesar itu, ada yang kurang dan ada yang lebih. Sebaiknya penetapan dana disesuaikan dengan bidang pengerjaan program.
- b. Kinerja lembaga atau birokrasi pelaksana terutama di Tingkat Propinsi perlu diperbaiki agar keterlambatan instruksi pelaksanaan program dapat di atasi. Lembaga atau Birokrasi hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bryant, Coralie dan Louise, G. 1989. White. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Duncan, William R. 1996. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*. USA: Project Management Institute.
- Jomo, Frans Wiryanto. 1986. *Membangun Masyarakat*. Bandung: PT. Alumni.
- Kadariah, dkk. 1978. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mikkelsen, Britha. 1995. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Milles, M.E3. dan Hubberman A.M. 1992. *Analisa Data Kualitatif; terjemahan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif; cetakan ke-13*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, Muh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pudjosumarto, Muljadi. 1988. *Evaluasi Proyek. Uraian Singkat dan Soal Jawab*. Yogyakarta: Liberty.

Setiana, Lucie. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siagian, S.P. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Peberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: UM Press.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Tata Langkah dan Teknik Teoritisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP Malang.

Internet:

Subejo. 2004. Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. (online) (<http://subejo.staff.ugm.ac.id/?p=66>) diakses tanggal 25 Februari 2008.

Suharyanto. 2006. Teori Pembangunan Masyarakat. (online) ([http://aurajogja.files.wordpress.com/2006/09/teori-pembangunan-masyarakat a5.PDF](http://aurajogja.files.wordpress.com/2006/09/teori-pembangunan-masyarakat%20a5.PDF).) diakses tanggal 25 Februari 2008.

Haryono, Bambang Santoso. -. Prinsip dan Strategi Pembangunan Sosial dan Politik dalam Perspektif Masyarakat Madani. (online) (<http://publik.brawijaya.ac.id/simple/us/jurnal/pdf/7Prinsip%20%20strategi%20Pembangunan%20Sosial%20%20Politik.pdf>.) diakses 20 Maret 2008.

Waluyoajati. -. Landasan Teori. (online) (<http://www.damandiri.or.id/file/waluyoajatiunmuhsurakartabab2.pdf>.) diakses tanggal 25 Februari 2008.

Peraturan:

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM Dan Kemiskinan (PAM-DKB) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006.

Buku Pedoman Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur 2007



Lampiran 1

INTERVIEW GUIDE

A. Masyarakat (penerima bantuan program)

- 1) Apakah anda tahu program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial?
- 2) Bagaimana sikap anda menanggapi program tersebut?
- 3) Apakah program tersebut bermanfaat?
- 4) Dalam hal apa program tersebut dapat dirasakan manfaatnya?

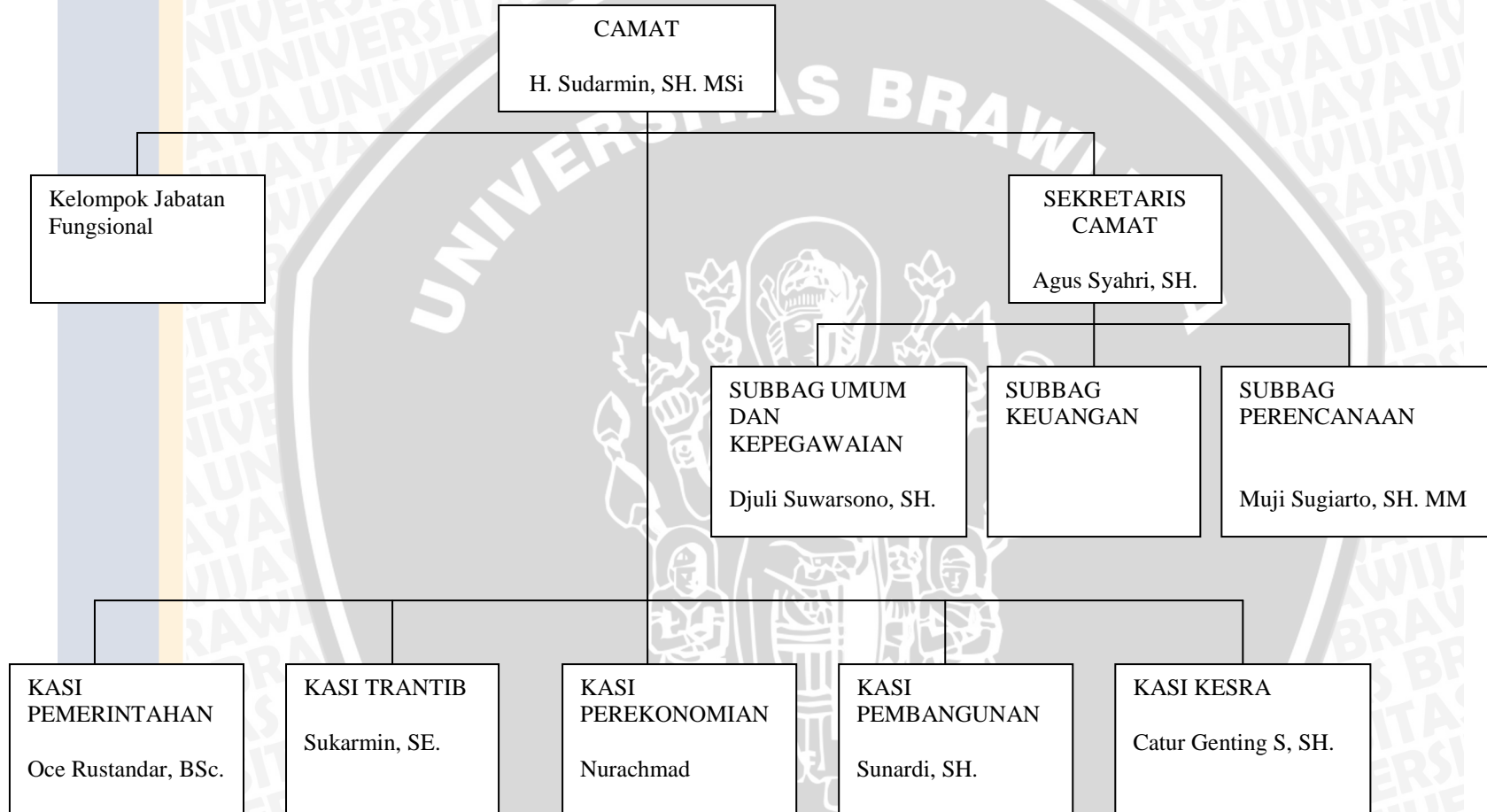
B. Staff Kecamatan Banyuwang

- 1) Seperti apa gambaran secara umum tentang program JPES ini ?
- 2) Bagaimana dengan struktur pelaksana program ini?
- 3) Bagaimana alur tahapan pelaksanaan program ini?
- 4) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini?
- 5) Apa saja yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program ini?
- 6) Bagaimana respon masyarakat secara umumnya?

C. Pihak Pendamping Kecamatan

- 1) Bagaimana pelaksanaan teknis program ini?
- 2) Kendala apa yang dihadapi saat pelaksanaan program ini?
- 3) Sejauh mana pihak pendamping kecamatan mengatasi kendala tersebut?

STRUKTUR KECAMATAN BANYUANYAR





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
(FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE)

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145; Telp (0341) 553737, 568914, 556703, dan 5511611 pes
Fax. (0341) 553737; Email: fia@brawijaya.ac.id

Program studi: •SI Adm. Publik•SI Adm. Bisnis•DIII Kesekretariatan•DIII Pariwisata•Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan
S3 Ilmu Administrasi

Nomor : 4685 / J.10/ 1.14/ P 6/ 2008
Lampiran : -
Perihal : Riset / Survey

Kepada : Yth
Bpk. Kepala BAKESBANG LINMAS
Kabupaten Probolinggo
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, mohon dengan hormat meminta bantuan Bapak untuk memberikan kesempatan melakukan riset / survey bagi mahasiswa:

1. Nama Mahasiswa : Arie Dwi Ardina
 - a. NIM : 0410310013
 - b. Tingkat / Semester : SI / VIII
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
 - e. Alamat Mahasiswa : Perum Leces Permai blok D no 5, Leces, Probolinggo
2. Tema Riset / Survey : Pelaksanaan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM (PAM-DKB) di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo
3. Tempat Riset / Survey : Kantor Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo
4. Lamanya Riset / Survey : 1 bulan
5. Peserta : 1 orang

Kami percaya bahwa demi pembinaan pendidikan kita, maka bapak akan bersedia untuk membantu kami.

Demikian atas bantuan dan kesediaan bapak kami ucapkan terima kasih.

Malang, 25 Juni 2008

A.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Prof. Drs. H. Solichin A.W, MA, PhD

NIP 130 704 332



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
(FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE)

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145; Telp (0341) 553737, 568914, 556703, dan 5511611 pes
Fax. (0341) 553737; Email: fia@brawijaya.ac.id

Program studi:•SI Adm. Publik•SI Adm. Bisnis•DIII Kesekretariatan•DIII Pariwisata•Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan
S3 Ilmu Administrasi

Nomor : 5594/J.10/ 1.14/ P 6/ 2008

Lampiran :

Perihal : Riset / Survey

Kepada : Yth

Bpk. Kepala BAKESBANG LINMAS

Kabupaten Probolinggo

Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, mohon dengan hormat meminta bantuan Bapak untuk memberikan kesempatan melakukan riset / survey bagi mahasiswa:

1. Nama Mahasiswa : Arie Dwi Ardina
 - a. NIM : 0410310013
 - b. Tingkat / Semester : SI / VIII
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
 - e. Alamat Mahasiswa : Perum Leces Permai blok D no 5, Leces, Probolinggo
2. Tema Riset / Survey : Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial dan Ekonomi (JPES) di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo
3. Tempat Riset / Survey : Kantor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo
4. Lamanya Riset / Survey : 2 minggu
5. Peserta : 1 orang

Kami percaya bahwa demi pembinaan pendidikan kita, maka bapak akan bersedia untuk membantu kami.

Demikian atas bantuan dan kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih

Malang, 5 Agustus 2008

A.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik




Prof. Drs. H. Solichin A.W., MA, PhD
NIP. 130 704 332



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Ahmad Yani 23 – Telpon (0335) 421440-434455

PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072/284 /426.302/2008

- Membaca** : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Jl. Mayjen. Haryono No. 163 Malang, tertanggal 25 Juni 2008 Nomor : 4685/J.10/ 1.14/P6/2008 Perihal penelitian/ survey / research
- Mengingat** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1972;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Gub/187/1972 tanggal 17 Juli 1972 ;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor : S.KDH.I/257/I/BB/1973 tanggal 18 Mei 1973.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : ARIE DWI ARDINA
NIM : 0410310013
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa / i
Alamat Mahasiswa : Perum Leces Permai Blok D No. 5 Leces Probolinggo.

Thema/Acara Survey/Resarch : ***“Plaksanaan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM (PAM- DKB) di Kccamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggor “***

Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Kantor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo

Lamanya Survey / Research : 1 (satu) Bulan , terhitung mulai surat dikeluarkan .

Pengikut peserta Survey / Research : 1 (satu) Orang.

Dengan **ketentuan sebagai berikut** :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 30 Juni 2008

Kepala BAKESBANGPOL DAN LINMAS.
KABUPATEN PROBOLINGGO
Drs. H. ABDUL AZIS.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 101 098

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Probolinggo;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Dan.Ramil Banyuanyar
5. Sdr. Kepolsek Kec. Banyuanyar.
6. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Univ. Brawijawa Malang.

7. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072/310. /426.302/2008

- Membaca** : Surat dari Universitas Brawijaya Malang tertanggal 5 Agustus 2008 nomor : 5594/J.10/I.14/P 6/2008 , Perihal Riset / Survey .
- Mengingat** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1972;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Gub/187/1972 tanggal 17 Juli 1972 ;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor : S.KDH.I/257/I/BB/1973 tanggal 18 Mei 1973.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;

- Nama Peneliti / Penanggung Jawab : Arie Dwi Ardina .
N I P/NPM : 0410310013
Jabatan : Mahasiswa
Alamat Mahasiswa : Perum Leces Permai Blok D no. 5 Leces .
Thema/Acara Survey/Resarch : “ Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial dan Ekonomi (JPSE) di Kecamatan Banyuanyar Kab. Probolinggo. ”
- Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Kantor Kec. Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.
- Lamanya Survey / Research : 2 (dua) Minggu , terhitung sejak surat dikeluarkan .
Pengikut : 1 (satu) Orang Mahasiswa

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat..
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 15. Agustus 2008

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. ABDUL AZIS.M.Si

Perbina Tingkat I
NIP. 510 101 098

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Probolinggo;
3. Sdr. Kapolres Kab. Probolinggo;
4. Sdr. Camat Bnyuanyar .
6. Sdr. Ka. Polsek Banyuanyar .
7. Sdr. Dan Ramil Banyuanyar .
8. Sdr. Dekan / Ketua Jurusan Adm. Public.
9. Sdr. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BANYUANYAR

Jl. Raya Banyuanyar No.14 Telp. 7610001
BANYUANYAR 67275

Banyuanyar, /2 Nopember 2008

Nomor : 072/498/426.812/2008
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Survey / Research

Kepada
Yth. Sdr. Dekan / Ketua Jurusan
Administrasi Public
Universitas Brawijaya Malang
di
MALANG

Berdasarkan surat Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Probolinggo tanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 072/310/426.502/2008 perihal sebagaimana tersebut pada pokok, maka bersama ini kami beritahukan bahwa:

Nama Peneliti/Penanggung Jawab : ARIE DWI ARDINA
N I M : 0410310013
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum Leces Permai Blok D No.5
Kec. Leces Kabupaten Probolinggo.
Thema / Acara Survey / Research : Pelaksanaan Program Jaring
Pengaman Sosial dan Ekonomi
(JPES) di Kecamatan Banyuanyar
Kabupaten Probolinggo
Tempat dilakukan Survey/Research : Kantor Kecamatan Kabupaten
Probolinggo.
Lamanya Survey / Research : 2 (dua) Minggu terhitung sejak tanggal
15 Agustus 2008 s/d 29 Agustus 2008.

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Survey/Research dengan baik sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum Pemerintah setempat.

2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan yang tidak baik.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



KAMAT BANYUANGOR

H. SUDARMIN, SH, M.Si

Pembina

NIP. 510 067 484

CURRICULUM VITAE

- 1. Nama : Arie Dwi Ardina
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3. Tempat/ tanggal lahir : Probolinggo, 20 Juli 1986
- 4.. Usia : 22 tahun
- 5. Tinggi/berat badan : 173 cm/73 kg
- 6. Status : Belum menikah
- 7. Alamat : asal: Perum Leces Permai Blok D no 5 Leces,
 Probolinggo, Jawa Timur. 67273
 kost : jln. Sumber sari gang 3 no 236 rt/rw: 1/11,
 Malang. Jawa Timur. 65145
- 8. Telp/handphone : (0335) 680305 / 081803843898,085649743023.
- 9 E-mail : ariescott_13@yahoo.co.id
- 10. Pendidikan :

Tahun akademik	Jenjang pendidikan
1991-1992	TK Idaman
1992-1994 1994-1998	SDN Jorongon 1 SDN Sumber Kedawung 3 Leces
1998-2001	SMP Negeri 1 Leces
2001-2004	SMU Darul Ulum 1 Jombang
2004-sekarang	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Jurusan Administrasi Publik

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

